

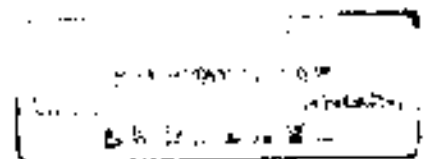
DISERTASI

PENGARUH FAKTOR SOSIAL EKONOMI TERHADAP KEMISKINAN MASYARAKAT MELALUI AKSESIBILITAS PUBLIK DI KABUPATEN BURU PROVINSI MALUKU



DJUNAI DI RUPELU

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2005**



**PENGARUH FAKTOR SOSIAL EKONOMI TERHADAP
KEMISKINAN MASYARAKAT MELALUI AKSESIBILITAS PUBLIK
DI KABUPATEN BURU PROVINSI MALUKU**

DISERTASI

**Untuk memperoleh Gelar Doktor
dalam Program Studi Ilmu Ekonomi
Pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga
Telah dipertahankan di hadapan
Panitia Ujian Doktor Terbuka
Pada hari : Rabu
Tanggal : 7 Juli 2005
Pukul 10.⁰⁰ WIB**

Oleh :

**DJUNAI DI RUPELU
NIM : 099712443 D**

Lembar Pengesahan.

**DISERTASI INI TELAH DISETUJUI
PADA TANGGAL, 28 JANUARI 2006**


Oleh :

Promotor



Prof. Dr. Murdijanto Purbangkoro, S.E., S.U.

Ko-Promotor



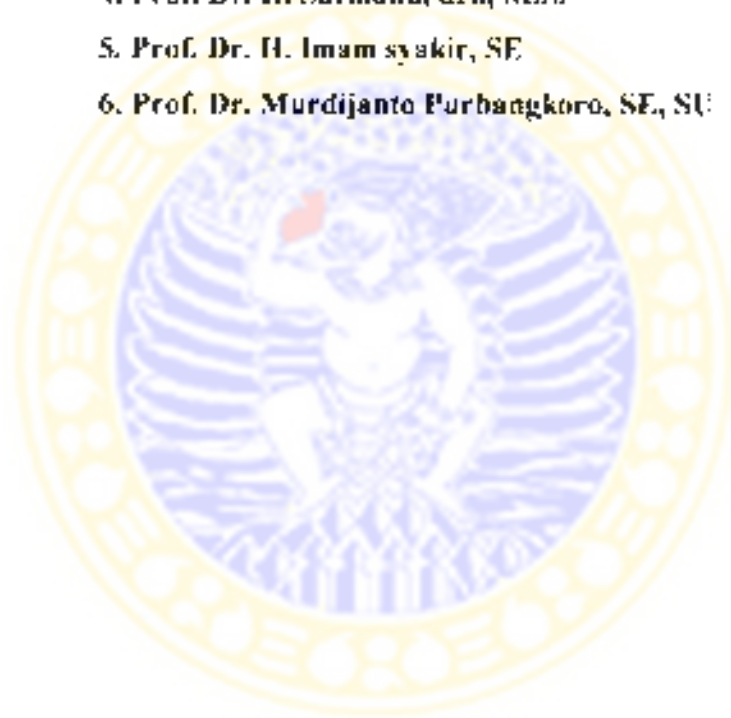
Prof. Dr. H. Imam Syakir, S.E.

Udah diuji Pada :

Tanggal . 1 Juni 2005

PANTIA PENGUJI DISERTASI

- Ketua** : Prof. Dr. Soedjono Abipraja, SE
Anggota : 1. Prof. Dr. H. Effendie, SE
2. Prof. Drs. Kasto, MA
3. Prof. Dr. H. Suroso Imam Zadjuli, SE
4. Prof. Dr. H. Sarmanu, drh, M.S.
5. Prof. Dr. H. Imam syakir, SE
6. Prof. Dr. Murdijanto Purbangkoro, SE, SU



Ditetapkan dengan Surat Keputusan
Rektor Universitas Airlangga
Nomor 4354 JO3.PP:2005
Tanggal 10 Juni 2005

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis haturkan ke hadirat Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan KaruniaNya sehingga disertasi ini dapat diselesaikan. Penyelesaian disertasi ini melalui serangkaian kegiatan yang panjang dimulai dari pengumpulan data, bimbingan, arahan dan dukungan berbagai pihak. Karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada:

Prof. Dr. Murdijanto Purbangkoro, SE., SU., Guru Besar Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Jember, selaku Promotor dan pendidik, yang penuh perhatian dan kesabaran telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sampai dengan selesainya disertasi ini

Prof. Dr. H. Imam Syakir, SE., Guru Besar Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga Surabaya, selaku Ko Promotor yang dengan segala kesabarannya di tengah kesibukan beliau sebagai teoritis yang memiliki wawasan yang luas telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, dorongan dan mengarahkan penulis dalam penyelesaian disertasi ini

Prof. Dr. Purihito, dr., Rektor Universitas Airlangga Surabaya yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas kepada penulis untuk menimba ilmu dan menyelesaikan pendidikan Program Doktor pada Universitas Airlangga Surabaya.

Prof. Dr. H. Mubammad Azin, dr., Direktur Program Pascasarjana Universitas Airlangga yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk

mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Program Doktor pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga.

Prof. Dr. H. Soedijono, dr., Mantan Direktur Program Pascasarjana Universitas Airlangga yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk mengikuti pendidikan Program Doktor pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga.

Prof. Dr. H. Effendie, SE., Ketua Program Studi Ilmu Ekonomi pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga yang telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga selesainya disertasi ini.

Prof. Dr. H. Suroso Imam Zadjuli, SE, Mantan Ketua Program Studi Ilmu Ekonomi pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga yang telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga selesainya disertasi ini.

Prof. Armijn Rangkuti, SE, Mantan Ketua Program Studi Ilmu Ekonomi pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga yang telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga selesainya disertasi ini.

Prof. Dr. H. B. Tetelapta, M. Pd., Rektor Universitas Pattimura Ambon, **Prof. Dr. M. Huliselan, MA.,** Mantan Rektor Universitas Pattimura Ambon, **Dra. H. Husnie Heatihu,** Bupati Buru dan **Ir. Bakri Lumbessy, MBA.,** Wakil Bupati Buru. **Rusdi Sangadji, SH.,** Mantan Bupati Buru yang telah memberikan ijin dan bantuan kepada penulis untuk menyelesaikan Pendidikan Doktor pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga.

Ramli Umusugi, S.Pi., Wael Mansur, Ir., dan Zainudin Boy, Jr. Ketua dan Wakil-Wakil Ketua DPRD Kabupaten Buru yang secara langsung

maupun tidak langsung telah memberikan dorongan dan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan Pendidikan Doktor pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga.

M. Saleh Wattiheluw, Drs., MM dan Rabea Muin, Ir., MESi, Ketua Komisi D yang membidangi Pendidikan pada DPRD Kabupaten Bura dan DPRD Provinsi Maluku yang telah memberikan dorongan dan motivasi yang sangat berharga sehingga studi ini dapat diselesaikan.

Prof. Dr. H. Suroso Imam Zadjuli, SE., Prof. Dr. H. Umar Nimran, MA., Prof. Dr. Soedjono Abipraja, SE., Prof. Dr. H. Sarmanu, drh, M.S., Prof. Dr. H. Imam syakir, SE., Prof. Dr. Kasto, MA., Prof. Dr. Hari Susanto, SU., Prof. Dr. Idrus Safei, M.Sc., Prof. Dr. Kuntowibisono, Prof. Dr. E.M.B. Santika., Staf pengajar Program Doktor Ilmu Ekonomi Program Pascasarjana Universitas Airlangga yang selama ini telah ikhlas memberikan tambahan bekal ilmu dan wawasan yang sangat berguna bagi perjalanan karir penulis selanjutnya.

Semua staf pengajar, mulai dari Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi yang secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan yang terbaik kepada penulis sehingga muncul rasa ingin tahu yang dijawab dengan belajar dan terus belajar dan dengan do'a para beliauah penulis dapat menyelesaikan pendidikan ini.

Tim penguji ujian kualifikasi: **Prof. Dr. Suroso Imam Zadjuli, SE., Prof. Dr. effendie, SE. Prof. Dr. Umar Nimran, MA., Prof. Dr. M. Idrus., Prof. Dr. H. Sarmanu, drh., M.S., Prof. Dr. Soedjono Abipraja, SE., Dr. Maryunani, SE, MA.,** yang telah memberikan masukan untuk penyempurnaan usulan penelitian.

Tim penilai usulan penelitian yang terdiri dari Prof. Dr. Suroso Imam Zadjuli, SE., Prof. Dr. Umar Nimran, MA., Prof. Dr. M. Idrus., Prof. Dr. H. Sarmanu, drh., M.S., Prof. Dr. Soedjono Abipraja, SE., Prof. Dr. H. Imam Syakir, SE., Prof. Dr. Murdijanto Purbanggoro, SE, SU., yang telah memberikan masukan, perbaikan dan saran guna penyempurnaan pelaksanaan penelitian di lapangan.

Tim penilai naskah Disertasi yang terdiri dari Prof. Dr. Effendie, SE., Prof. Dr. Soedjono Abipraja, SE., Prof. Dr. Suroso Imam Zadjuli, SE., Prof. Dr. Umar Nimran, MA., Prof. Dr. H. Sarmanu, drh., M.S., Prof. Dr. H. Imam Syakir, SE., Prof. Dr. Murdijanto Purbanggoro, SE, SU., yang telah memberikan masukan, perbaikan dan saran guna penyempurnaan pelaksanaan penelitian di lapangan.

Tim penguji Ujian tahap I yang terdiri dari Prof. Dr. Soedjono Abipraja, SE., Prof. Dr. Effendie, SE., Prof. Dr. Suroso Imam Zadjuli, SE., Prof. Dr. Umar Nimran, MA., Prof. Dr. H. Sarmanu, drh., M.S., Prof. Dr. H. Imam Syakir, SE., Prof. Dr. Murdijanto Purbanggoro, SE, SU., Prof. Dr. Kasto, MA. yang telah memberikan masukan, perbaikan dan saran guna penyempurnaan penulisan disertasi ini.

Kepala Kesbanglinmas Kabupaten Buru, Kepala Bappeda Kabupaten Buru, Kadis Kependudukan dan Keluarga Berencana, Kepala Tata Usaha dan Staf Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Buru, Kepala Badan Statistik Kabupaten Buru, Para Kepala Kecamatan se Kabupaten Buru dan warga masyarakat yang menjadi responden atas segala bantuan dan dukungan yang

telah diberikan, terutama yang berhubungan dengan pengumpulan data lapangan atau data primer maupun data sekunder.

Abdullah Bin Musa, Zainab, Halimah Mardjan., (Almarhumah), Saadiyah Muin., (Almarhumah) dan Nur Raupete Ayahanda dan Ibunda yang telah melahirkan dan membesarkan dengan doa dan restu sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan ini

R. Muin, Ir., M.Si., Zainal Arifiyanto, Djunaidi., Firmaw Gazali., Faisal Raudhi, Vera Melinda Djunaidi., Istriku tercinta dan anak-anaku tersayang atas segala pengorbanan, kesaharan, pengertian, perhatian dan dorongan disertai doa restunya sehingga memungkinkan penulis dapat menyelesaikan pendidikan pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga.

Tertentu banyak pihak, baik langsung maupun tidak langsung ikut memberikan bantuan dan dukungan yang cukup besar kepada penulis masing-masing: Dr. Rafael Purtono, SE., MS dan keluarga. Dr. Teguh Hadi Prijono, MS dan keluarga. Prof. Dr. Sugianto, SE, M.Si., Prof. Dr. Imam Yusuf, SE, M.Si., Prof. Dr. Elyano Lasam, SE, M.Si. Prof. Dr. Haryono Sujono, MS. Dr. Tressia Melitina, SE, M.Si., Dr. Thomas Fentury, M.Si dan masih banyak lagi tidak mungkin disebutkan satu persatu. Penulis yakin kerja kemanusiaan seperti ini hasilnya tidak dilihat dalam jangka pendek. Karena itu keikhlasan dalam pengabdian semua pihak, penulis sampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat, hidayah dan petunjuk-Nya kepada kita semua. Amin.

RINGKASAN

Pengaruh Faktor Sosial Ekonomi Terhadap Kemiskinan Masyarakat Melalui Aksesibilitas Publik Di Kabupaten Buru Provinsi Maluku

Djunaidi Rupelu

Masalah besar di negara sedang berkembang adalah banyaknya penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan atau disebut dengan penduduk miskin. Terjadinya kemiskinan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu terbatasnya modal yang dimiliki, tingkat pendidikan yang rendah, budaya yang menghambat serta keterbatasannya dalam mengakses fasilitas publik.

Provinsi Maluku, khususnya Kabupaten Buru memiliki sumber daya alam yang potensial baik di daratan maupun lautan. Idealnya potensi tersebut dapat dimanfaatkan untuk menciptakan dan meningkatkan pendapatan melalui kesempatan kerja dan kesempatan berusaha baik di sektor formal maupun informal. Realitasnya menunjukkan keadaan yang berbeda yang ditandai dengan besarnya penduduk miskin.

Besarnya penduduk miskin merupakan masalah yang harus dicarikan pemecahannya dengan melibatkan berbagai pihak seperti akademisi, praktisi, politisi dan birokrasi serta penduduk miskin itu sendiri. Penanganan kemiskinan menjadi hal penting karena kemiskinan dapat menimbulkan berbagai dampak negatif terhadap lingkungan sosial kemasyarakatan dan keamanan. Untuk itu perlu dilakukan penelitian.

Studi ini dilakukan di Kabupaten Buru, dengan obyek penelitian adalah keluarga miskin yang tinggal di 5 Kecamatan dari 10 Kecamatan yang ada yaitu, kecamatan Air Buaya, kecamatan Ambalau, kecamatan Namlea, kecamatan Wacsama dan kecamatan Leksula. Dan dari 5 kecamatan diambil 10 desa, yaitu kecamatan Air Buaya yaitu desa Waepure dan Wawanabaru; kecamatan Ambalau yaitu desa Ulima dan Masawoi; kecamatan Namlea yaitu desa Namlea dan Sanleko; kecamatan Wacsama yaitu; desa Wamsisi dan Lena; dan Kecamatan Leksula yaitu desa Wackatin dan Tifu.

Penelitian ini dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan: Apakah Modal berpengaruh terhadap kehidupan Sosial Ekonomi penduduk Kabupaten Buru ? Apakah pendidikan berpengaruh terhadap kehidupan Sosial Ekonomi penduduk Kabupaten Buru ? Apakah budaya berpengaruh terhadap kehidupan Sosial Ekonomi penduduk Kabupaten Buru ? Apakah kesehatan berpengaruh terhadap kehidupan Sosial Ekonomi penduduk Kabupaten Buru ? Apakah kehidupan Sosial Ekonomi penduduk Kabupaten Buru berpengaruh terhadap aksesibilitas pasar ? Apakah kehidupan Sosial Ekonomi penduduk Kabupaten Buru berpengaruh terhadap aksesibilitas koperasi ? Apakah kehidupan Sosial Ekonomi berpengaruh terhadap kemiskinan masyarakat Kabupaten Buru ? Apakah Aksesibilitas pasar berpengaruh terhadap kemiskinan masyarakat Kabupaten

Buru ? Apakah Aksesibilitas koperasi berpengaruh terhadap kemiskinan masyarakat Kabupaten Buru ? Apakah kehidupan Sosial Ekonomi berpengaruh terhadap kemiskinan masyarakat Kabupaten Buru melalui aksesibilitas pasar ? Apakah kehidupan Sosial Ekonomi berpengaruh terhadap kemiskinan masyarakat Kabupaten Buru melalui aksesibilitas koperasi ?

Responden yang berhasil diwawancarai sebanyak 150 kepala keluarga. Pengolahan dan analisis data menggunakan program AMOS 4.02 dengan taraf signifikansi yang dipergunakan adalah $\alpha = 0,05$.

Hasil studi ini adalah bahwa : 1) Modal berpengaruh positif terhadap keterbatasan mengakses fasilitas; 2) Pendidikan berpengaruh positif terhadap keterbatasan mengakses fasilitas; 3) Budaya berpengaruh positif terhadap keterbatasan mengakses fasilitas; 4) Tingkat kesehatan berpengaruh positif terhadap keterbatasan mengakses fasilitas; 5) Modal berpengaruh positif terhadap kemiskinan; 6) Pendidikan berpengaruh positif terhadap kemiskinan; 7) Budaya tidak berpengaruh terhadap kemiskinan; 8) Tingkat kesehatan berpengaruh positif terhadap kemiskinan; 9) Keterbatasan mengakses fasilitas berpengaruh positif terhadap kemiskinan; dan 10) Terdapat pengaruh tidak langsung dari modal, pendidikan, budaya dan tingkat kesehatan terhadap kemiskinan melalui keterbatasan mengakses fasilitas.

Persamaan struktural hubungan kausalitasnya adalah sebagai berikut :

1. Pengaruh modal (X_1), pendidikan (X_2), budaya (X_3) dan tingkat kesehatan (X_4) terhadap keterbatasan mengakses fasilitas (Z)

$$Z = 0,205 X_1 + 0,253 X_2 + 0,371 X_3 + 0,312 X_4$$

2. Pengaruh modal (X_1), pendidikan (X_2), budaya (X_3), tingkat kesehatan (X_4) dan keterbatasan mengakses fasilitas (Z) terhadap kemiskinan (Y)

$$Y = 0,645 X_1 + 0,271 X_2 + 0,090 X_3 + 0,169 X_4 + 0,216 Z$$

Temuan ilmiah dari studi ini adalah bahwa studi ini mendukung teori Michael Todaro dan sebagian teori Anne Booth. Saran yang diajukan untuk mengurangi kemiskinan di kabupaten Buru adalah; (1) Bantuan modal untuk usaha sangat besar pengaruhnya terhadap pengentasan kemiskinan, tetapi juga harus diberi pengarah dan pengawasan terhadap penggunaannya, sehingga akan lebih terarah bantuan tersebut; (2) Peran Dinas Pendidikan perlu ditingkatkan, utamanya dalam memberikan penyuluhan-penyuluhan tentang pentingnya pendidikan 9 tahun kepada anak-anak. Dan selain itu memberikan ketrampilan tambahan kepada kepala keluarga atau ibu rumah tangga yang dapat digunakan untuk meningkatkan pendapatannya; (3) Peran Dinas Kesehatan perlu ditingkatkan, utamanya dalam hal pemberantasan penyakit dan penerangan motivasi untuk hidup sehat; penambahan tenaga medis dan sarjana kesehatan masyarakat lebih diutamakan dalam penambahan pegawai baru; (4) Memberikan pengarah-pengarah dengan cara mengarahkan pada etos kerja dan berbau dengan etnis lain; (5) Disarankan kepada peneliti lain untuk melakukan penelitian kemiskinan pada masyarakat pedalaman, karena di daerah Maluku sebagian besar masyarakatnya masih terisolir.

SUMMARY

The Effects of Social Economic Factors on Society's Poverty Through Public Accessibility in Buru Regency Maluku Province

Djunaidi Rupelu

A critical issue that happens in developing countries is that many people still live under the poverty. They are called poor people. The occurrence of poverty is influenced by several factors such as limited capital, low education background, inhibiting culture and limited access to public facilities.

Maluku Province, especially Buru Regency has potential natural resources both on the land and in the sea. Ideally, the potential can be utilized to create and increase income through job opportunities and chances to run businesses both in formal and informal sectors. The reality shows that the great number of poor people influences different condition.

The great number of poor people is an issue that requires solutions which involve many parties such as academics, practitioners, politicians, bureaucrats and the poor people themselves. Poverty handling is a very important thing since poverty will result in negatif effects on social community and safety of our environment. Therefore, this issue needs to be studied.

This study was conducted in Buru Regency with poor people who live in 5 from 10 counties as its subject. They are Air Buaya, Ambalau, Namlea, Waesama and Leksula counties. From those 5 counties, 10 villages are taken to be the sample. They are Waepure and Wawanabaru villages of Air Buaya county, Ulima and Masawoi villages of Ambalau county, Namlea and Sanleko villages of Namlea county, Wamsisi and Lena villages of Waesama county and Waekatin and Tifu of Leksula county.

This study is aimed to answer the questions : Does capital influences the social economic aspect of Buru Regency's population ? Does education influences the social economic aspect of Buru Regency's population ? Does health influences the social economic aspect of Buru Regency's population ? Does the social economic condition of Buru Regency's population influence market accesability? Does market accesability influence the poverty of Buru Regency's population ? Does poverty influences the social and economic aspects of Buru Regency's population ? Is the social economic condition influences the poverty of Buru Regency's population ? Is social economy influences the poverty of Buru Regency's population ?

The respondents interviewed are 150 heads of household. The data analysis is done by using AMOS 4.02 with significance level $\alpha = 0.05$.

From this study, it is found that : 1) Social economic factors that consist of capital ownership, education, health and culture have significant effects on the ability to access facilities, 2) Social economic factors that consist of capital

ownership, education, health and culture have positive effects on poverty; 3) The limited access of bank, cooperation and market facilities have positive effects on the level of poverty; 4) There are indirect effects of capital, education, culture and health level condition through the limited access to bank, cooperation, and market facilities.

The model fit of causality that is built from this study can be seen as follows :

The scientific finding in this study shows that this study supports the theories of Michael Todaro and Anne Booth. The suggestions proposed in to reduce the poverty in Buru regency is : (1) Capital aid to run business has significant effect on poverty elimination, but the population should be given explanation and monitoring on the use of the capital, therefore the use of the capital will meet the goal of the aid; (2) The role of the Department of Education needs to be increased, primarily in providing explanation on the important of 9 year education for children. In addition, giving additional skills to the family or housewives can be used to increase their income; 3) The role of the Department of Education needs to be increased, mainly to eliminate disease and the explanation about the motivation of healthy life, the addition of medical personnel and university graduates majoring in community health is more important to add more personnel; (4) Giving explanation by directing the population into good working ethics and integrated to other ethnicities; (5) It is suggested to other researchers to conduct research on poverty with rural population as its sample because in most of population who live in Maluku are still isolated.



ABSTRACT

The Effects of Social Economic Factors on Society's Poverty Through Public Accessibility in Buru Regency Maluku Province

Djunaidi Rupelu

This study is aimed to answer the questions : Does capital influences the social economic aspect of Buru Regency's population ? Does education influences the social economic aspect of Buru Regency's population ? Does health influences the social economic aspect of Buru Regency's population ? Does the social economic condition of Buru Regency's population influence market accesability? Does market accesability influence the poverty of Buru Regency's population ? Does poverty influences the social and economic aspects of Buru Regency's population ? Is the social economic condition influences the poverty of Buru Regency's population ? Is social economy influences the poverty of Buru Regency's population ?

The respondents interviewed are 150 heads of household. The data analysis is done by using AMOS 4.02 with significance level $\alpha = 0.05$.

From this study, it is found that : 1) Social economic factors that consist of capital ownership, education, health and culture have significant effects on the ability to access facilities, 2) Social economic factors that consist of capital ownership, education, health and culture have positive effects on poverty; 3) The limited access of bank, cooperation and market facilities have positive effects on the level of poverty; 4) There are indirect effects of capital, education, culture and health level condition through the limited access to bank, cooperation, and market facilities.

Keywords : capital, education, health, culture, limitation access facilities, poverty regency of Buru.



DAFTAR ISI

	Halaman
Sampul Depan	i
Sampul Dalam	ii
Prasyarat Gelar	iii
Persetujuan	iv
Penetapan Panitia	v
Ucapan Terima Kasih	vi
Ringkasan	xi
Summary	xiii
Abstract	xv
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR	xx
BAB I PENDAHULUAN	I
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	18
1.3 Tujuan Penelitian	19
1.4 Manfaat Penelitian	20
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	21
2.1 Landasan Teori	21
2.2 Teori Pembangunan	22
2.3 Teori Tenaga Kerja	28
2.4 Teori Kemiskinan	30
2.4.1 Perspektif Kemiskinan	32
2.4.2 Definisi Kemiskinan	36
2.4.3 Ukuran Kemiskinan	41
2.4.4 Kemiskinan Alamiah	47
2.4.5 Kemiskinan Struktural	50
2.4.6 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan	60
2.4.7 Sebab-sebab Kemiskinan	62
2.4.7.1 Teori Anne Booth (1996)	67
2.4.7.2 Teori Jhingan M.L	68
2.4.7.3 Teori Samuelson	69
2.5 Kebijakan Pengentasan Kemiskinan	70
2.6 Hasil Penelitian Terdahulu	74
2.6.1 Studi Singarimbun 1986	74
2.6.2 Studi Sun Umi Lestari 1986	75
2.6.3 Studi Murdianto Purbangkoro 1994	75
2.6.4 Studi Suyono Dikun 1994	76
2.6.5 Studi Dylan Palandeng 1994	77
2.6.6 Studi Sahidi 1996	78

2.6.7	Studi Mubyanto 1994	80
2.6.8	Studi Santiaasih dan Endah Pratiwi 1997	81
2.6.9	Studi San Afri Awang 1997	82
2.6.10	Studi Rusnadi Ridwan 1998	83
2.6.11	Studi Murni Daulay 2002	83
BAB 3	KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS	88
3.1	Kerangka Proses Berpikir	88
3.2	Kerangka Konseptual	92
3.3	Hipotesis	95
BAB 4	METODE PENELITIAN	96
4.1	Rancangan Penelitian	96
4.2	Lokasi Penelitian	97
4.3	Populasi	98
4.4	Sampel	98
4.5	Jenis dan Sumber Data	102
4.6	Definisi Operasional	103
4.7	Metode Pengumpulan Data	104
4.8	Metode Analisis	106
4.8.1	Uji Validitas dan Reabilitas	106
4.8.2	Analisis Jalur (<i>Path Analysis</i>)	107
BAB 5	HASIL PENELITIAN	111
5.1	Deskripsi Daerah Penelitian	111
5.1.1	Sejarah, Luas dan Potensi Kabupaten Juru	111
5.1.2	Pemerintahan	116
5.1.3	Kehutanan	119
5.1.4	Kependudukan dan Keluarga Sejahtera	122
5.1.5	Pendidikan	126
5.1.6	Potensi Ekonomi	128
5.1.6.1	Pertanian	128
5.1.6.2	Perkebunan	130
5.1.6.3	Peternakan	132
5.1.6.4	Perikanan	133
5.1.6.5	Kehutanan	134
5.1.6.6	Pertambangan	135
5.1.6.7	Industri	135
5.1.6.8	Perdagangan	136
5.2	Deskripsi Variabel	137
5.2.1	Modal	138
5.2.2	Pendidikan	138
5.2.3	Budaya Miskin	139
5.2.4	Kesehatan	140
5.2.5	Aksesibilitas Publik	140
5.2.2	Pendapatan Keluarga	141

5.3 Uji Validitas dan Reabilitas	142
5.4 Analisis Data	143
5.4.1 Model Pengukuran (Measurement Model).....	145
5.4.2 Analisis Faktor Konfirmasi Variabel Penelitian.....	146
5.4.3 Analisis Model Lengkap (Model Struktural).....	150
BAB 6 PEMBAHASAN	156
6.1 Pembahasan	156
6.2 Temuan Bmiah	166
6.3 Keterbatasan Studi	167
BAB 7 PENUTUP	168
7.1 Kesimpulan	168
7.2 Saran	170
DAFTAR PUSTAKA	172
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 1.1.	Garis Kemiskinan, Jumlah dan Presentases dari Populasi yang Hidup di Bawah Garis Kemiskinan di Indonesia	12
Tabel 1.2	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin serta Garis Kemiskinan Menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Maluku Tahun 2003	13
Tabel 1.3	Perkembangan Jumlah Penduduk, Penduduk Miskin dan Persentase di Kabupaten Buru Tahun 1993-2002	16
Tabel 2.1	Garis Kemiskinan (Ekuivalen Beras dalam Kilogram).....	45
Tabel 4.1	Daftar Nama Kecamatan dan Desa Terpilih sebagai Sampel Untuk Kecamatan dan Desa Tempat Rumah tangga Kategori Miskin di Kabupaten Buru.....	100
Tabel 4.2	Daftar Desa Sampel Jumlah Rumah Tangga Miskin dan Rumah Tangga Sampel	102
Tabel 5.1	Nama Kecamatan, Jumlah Desa/ Dusun di Kabupaten Buru Tahun 2003	118
Tabel 5.2	Kondisi Sarana Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Buru Tahun 2003	121
Tabel 5.3	Tenaga Pelayanan Kesehatan Di Kabupaten Buru Tahun 2003.....	121
Tabel 5.4	Data Jumlah Jiwa Menurut Kelompok Umur Per Kecamatan di Kabupaten Buru Tahun 2003	124
Tabel 5.5	Data Jumlah Kepala Keluarga Menurut Tahapan Keluarga Sejahtera per Kecamatan di Kabupaten Buru Tahun 2003	126
Tabel 5.6	Jumlah Sekolah, Murid, Guru dan Lulusan Menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Buru Tahun 2003	127
Tabel 5.7	Jenis Komoditi, Luas Area dan Produksi Pertanian di Kabupaten Buru Tahun 2003	130
Tabel 5.8	Jenis Komoditi, Luas Areal dan Produksi Perkebunan di Kabupaten Buru Tahun 2003	131
Tabel 5.9	Kepemilikan Modal Responden	138
Tabel 5.10	Tingkat Pendidikan Responden	139
Tabel 5.11	Akses Responden Terhadap Fasilitas	141
Tabel 5.12	Tingkat Pendapatan Responden	142
Tabel 5.13	Uji Validitas dan Reabilitas	143
Tabel 5.14	Indikator Pengujian Goodness of-Fit	144
Tabel 5.15	Evaluasi Model Pengukuran untuk Faktor Sosek	147
Tabel 5.16	Evaluasi Model Pengukuran Sosek	147
Tabel 5.17	Evaluasi Model Pengukuran untuk Faktor Aksesibilitas	149
Tabel 5.18	Evaluasi Model Pengukuran untuk Faktor Aksesibilitas	149
Tabel 5.19	Evaluasi Model Lengkap Kemiskinan	152
Tabel 5.20	Estimasi Parameter Model Pengukuran	152

DAFTAR GAMBAR

		Halaman
Gambar 2.1	Skematis Multidimensional Keterbelakangan	65
Gambar 2.2	Skematis Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan	67
Gambar 3.1	Skematis Kerangka Proses Berpikir	91
Gambar 3.2	Skematis Kerangka Konseptual	94
Gambar 4.1	Skematis Model Path Analysis Penelitian	109
Gambar 5.1	Analisis Faktor Konfirmasi Variabel.....	146
Gambar 5.2	Analisis Faktor Konfirmasi Variabel Aksesibilitas... ..	148
Gambar 5.3	Analisis Struktur Model Lengkap.....	151

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kemiskinan sebagai suatu penyakit sosial ekonomi tidak hanya dialami oleh negara-negara yang sedang berkembang, tetapi juga dialami negara-negara maju, seperti Inggris dan Amerika Serikat. Negara Inggris mengalami kemiskinan di penghujung tahun 1700-an pada era kebangkitan revolusi industri yang muncul di Eropa. Pada masa itu kaum miskin di Inggris berasal dari tenaga-tenaga kerja pabrik yang sebelumnya sebagai petani yang mendapatkan upah rendah, sehingga kemampuan daya belinya juga rendah. Mereka umumnya tinggal di permukiman kumuh yang rawan terhadap penyakit sosial lainnya, seperti prostitusi, kriminalitas, pengangguran.

Amerika Serikat sebagai negara maju juga dihadapi masalah kemiskinan, terutama pada masa depresi dan resesi ekonomi tahun 1930-an. Pada tahun 1960-an Amerika Serikat tercatat sebagai salah satu negara terkaya di dunia di mana sebagian besar penduduknya hidup dalam kecukupan. Bahkan Amerika Serikat telah banyak memberi bantuan kepada negara-negara lain. Namun, di balik kemajuan itu tercatat sebanyak 32 juta orang atau sepertenam dari jumlah penduduknya tergolong miskin, Kuncoro, (1997:101). Dengan demikian menurut Islam, (2001:4) dalam Muhadjir (2005:17) bahwa kemiskinan saat ini tidak lagi dianggap sebagai masalah nasional dari suatu negara, terutama negara miskin, tetapi menjadi masalah global.

Indonesia sebagai salah satu negara sedang berkembang tidak terlepas dari masalah kemiskinan yang harus dicari solusi penanggulangannya. Penanggulangan kemiskinan bukanlah merupakan hal baru bagi Indonesia, karena sejak kemerdekaan Republik Indonesia telah ada upaya-upaya baik yang sifatnya langsung maupun tidak langsung untuk menanggulangi kemiskinan. Sejumlah rencana pembangunan dicanangkan, seperti Rancangan Urgensi Perekonomian 1951, Rencana Lima Tahun (1955-1960), dan Rencana Delapan Tahun (1961-1969). Rencana tersebut meliputi kebijakan pemenuhan kebutuhan pokok yang diharapkan menyentuh penduduk miskin, seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, dan kesejahteraan. Tetapi karena kehidupan politik yang belum stabil, dan terlalu terkonsentrasinya pemerintah pada masalah-masalah politik dan keamanan, maka rencana-rencana tersebut kurang terimplementasi sehingga masalah kemiskinan kurang tertangani, Muhadjir (2005:19).

Penanggulangan terhadap kemiskinan mendapat perhatian pemerintah Orde Baru yang ditandai dengan perubahan sistem politik-ekonomi yang sangat mendasar. Sistem politik-ekonomi sosialis bergeser ke ekonomi pasar atau kapitalistik, dari politik luar negeri anti Barat bergeser ke pro Barat, dari politik konfrontasi ke politik pembangunan, dan sikap terhadap masalah kependudukan bergeser dari *pro-natalis* menjadi *anti-natalis*, Sjahrir, (1986:68) dalam Muhadjir, (2005:19). Dengan perubahan sistem politik-ekonomi, pemerintah Orde Baru melakukan pembangunan untuk mengurangi kemiskinan melalui serangkaian program pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar, seperti pangan, kesehatan dan pendidikan, perluasan kesempatan kerja, pembangunan pertanian, pemberian dana bergulir, pembangunan prasarana dan pendampingan, pembangunan kawasan atau desa tertinggal, pemberian kompensasi kepada penduduk miskin terhadap kenaikan bahan bakar minyak.

Pembangunan yang dilaksanakan selama enam Pelita telah meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, terutama selama periode 1990 - 1996, dengan tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto rata-rata 7,28 % per tahun. Menurut Biro Pusat Statistik (1996:565) dengan dasar harga berlaku pada periode tersebut pendapatan per kapita rata-rata Indonesia sebesar Rp 1.605.178,- atau sebesar US \$ 729. Dengan angka tersebut Indonesia pada saat itu telah masuk ke dalam kelompok negara-negara berkembang yang berpendapatan menengah.

Keberhasilan Indonesia meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat, namun masih dihadapkan kepada masalah kemiskinan karena masih cukup banyak rakyat Indonesia yang belum dapat hidup secara layak sesuai dengan standar yang berlaku. Menurut Kartasasmita (1996:236) pada tahun 1976 jumlah penduduk miskin di Indonesia sebanyak 54,4 juta jiwa (40 %), tahun 1993 sebanyak 25,9 juta (13,7 %) dan pada tahun 1996 hanya tinggal sebanyak 22,5 juta (11,3 %).

Keberhasilan dalam menurunkan penduduk miskin selain mendapat pujian, terdapat pula kritik sebagaimana disampaikan Dewey (1993:5) bahwa kebijakan pembangunan Indonesia di era Orde Baru terlalu berorientasi kepada pertumbuhan ekonomi dan membiarkan terjadinya pelebaran jurang kesenjangan ekonomi. Menurut Sudjana dan Mishara (2004:15) bahwa kemajuan ekonomi yang dicapai selama Orde Baru, dan penurunan jumlah penduduk miskin bukanlah prestasi yang spektakuler, karena di dalamnya terkandung sejumlah kelemahan struktural yang sangat mendasar. Kelemahan ini yang kemudian menjadi sebab dan terpuruknya ekonomi Indonesia pada tahun 1997.

Terjadinya krisis ekonomi mengakibatkan peningkatan jumlah penduduk miskin mencapai 79,4 juta jiwa atau sebesar (39,10 %) dari seluruh penduduk Indonesia. Sedangkan keluarga miskin mencapai 2.794 107 kepala keluarga. dengan pendapatan perkapita dan pertumbuhan ekonomi cenderung mengalami penurunan masing-masing menjadi US \$ 436 dan minus 13,06 %. Dan berdasarkan tempat tinggal sebanyak 56,80 juta jiwa dari 79,40 juta jiwa penduduk miskin bermukim di pedesaan dan bekerja sebagai petani. Probokusumo, (2004:36).

Besarnya penduduk miskin di pedesaan menggambarkan ekonomi yang belum berkembang sehingga pendapatan masyarakat menjadi rendah dan kekurangan aset, serta rentannya kondisi fisik. Adanya keinginan yang kuat dari penduduk miskin untuk keluar dari kemiskinannya merupakan suatu hal yang sulit terwujud karena, menurut Kalla (2001:1) bahwa peraturan dan perundang-undangan yang dibuat belum berpihak kepada masyarakat kecil yang ditandai dengan terbatasnya infrastruktur ekonomi dan sosial: tidak sempurnanya perlindungan sosial serta kurangnya kesempatan bagi masyarakat miskin untuk dapat berpartisipasi dalam proses pembuatan keputusan yang sifatnya politis dan sosial, akibatnya pengangguran terbuka meningkat dari 4,2 juta orang atau sebesar (4,69 %) pada Agustus 1997 menjadi 6,03 juta orang atau sebesar (6,39%) pada Agustus 1999, melemahnya kegiatan ekonomi mengakibatkan menurunnya daya beli dan berdampak ganda terhadap perubahan pola kehidupan keluarga seperti, pergeseran pekerjaan dari sektor formal ke sektor informal, penurunan proporsi pengeluaran untuk kebutuhan pangan, kesehatan dan pendidikan, serta peningkatan keresahan sosial baik di tingkat keluarga maupun masyarakat.

Keresahan sosial merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari, karena Indonesia adalah negara dengan tingkat kebhinnekaan yang tinggi, di mana perbedaan antar daerah baik yang berhubungan dengan potensi sumberdaya alam di daratan maupun lautan merupakan suatu konsekwensi dari perbedaan karakteristik alam, ekonomi, sosial dan budaya. Sebaran sumberdaya alam, khususnya minyak dan gas, serta pertumbuhan pusat perdagangan dan industri yang terkonsentrasi di beberapa daerah menyebabkan timbulnya kantong-kantong pertumbuhan, sehingga ketimpangan output antar daerah menjadi tinggi.

Menurut Tadjoeeddin (2001:2) Jika minyak dan gas dan atau daerah kantong-kantong pertumbuhan dikeluarkan dari perhitungan, tingkat kesenjangan produksi per orang antar daerah menjadi relatif kecil, atau setidaknya tidak cukup besar dibandingkan beberapa negara lain. Meskipun demikian, terintegrasinya berbagai wilayah dalam negara kesatuan republik Indonesia memunculkan harapan akan adanya kesetaraan antar berbagai baik daerah maupun desa sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah.

Menurut UU 32 tahun 2004, Desa adalah bagian integral dari suatu negara, dengan demikian kemiskinan pedesaan juga merupakan kemiskinan negara. Kemiskinan pedesaan merupakan salah satu penyebab terjadinya urbanisasi yang pada gilirannya mengakibatkan terjadinya *regional disparity* dan berbagai dampak sosial maupun ekonomi. Oleh karena itu, pedesaan haruslah ditangani secara lebih serius agar kesejahteraan masyarakatnya dapat ditingkatkan. Suatu bukti yang tidak dapat dipungkiri tingkat sosial ekonomi masyarakat pedesaan di Indonesia relatif masih rendah, karena rendahnya kemampuan desa dalam menggali sumber dan menyusun anggaran untuk kebutuhan masyarakat desa, Maryunani (2002:64).

Kurangnya perhatian pemerintah, terutama pemerintah daerah dalam era otonomisasi terhadap penanggulangan kemiskinan yang umumnya berada di pedesaan, merupakan suatu konsekuensi dan ketidak merataan persebaran prasarana dan sarana yang disediakan untuk menunjang kegiatan sosial ekonomi, fasilitas pendidikan, dan kesehatan yang dibangun pada wilayah-wilayah tertentu. Menurut Bappenas (2000:12) ketidak merataan penyediaan prasarana dan sarana ekonomi dan sosial terkait dengan penyebaran penduduk. Jawa Bali dengan luas wilayah hanya 6,98 persen dari seluruh wilayah Indonesia harus menampung 61,6 persen dari total jumlah penduduk. Sebaliknya jumlah penduduk Kalimantan, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku dan Irian Jaya hanya menampung 11,1 persen dari total jumlah penduduk. Ketidak merataan dalam menyiapkan fasilitas dasar seperti disebutkan di atas, menjadi alasan bagi Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan sebahagian besar dana yang diperoleh dari Pemerintah Pusat baik dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Dekonsentrasi untuk membangun fasilitas pendidikan, kesehatan, perhubungan, dan pekerjaan umum.

Besarnya perhatian pemerintah, terutama pemerintah daerah terhadap penyediaan prasarana dan sarana ekonomi, sosial, dan kurangnya perhatian terhadap penanganan kemiskinan bukanlah merupakan suatu persoalan, karena menurut Kalla, (2001: 1) secara nasional munculnya penduduk miskin terutama karena adanya ketimpangan dalam mengakses pada kesehatan publik; air minum yang bersih ataupun fasilitas pendidikan, yang pada gilirannya mengakibatkan tidak amannya kualitas makanan, nutrisi di samping rendahnya pembangunan sumberdaya manusia. Karena itu menurut Kalla di daerah pedesaan masih terdapat lebih dari 90 persen penduduk miskin hanya berpendidikan sekolah dasar (SD).

Besarnya penduduk miskin disertai dengan rendahnya pendidikan merupakan suatu fenomena yang menggambarkan keadaan kemiskinan senantiasa berada pada situasi serba kekurangan. Menurut Ismawan (1991:4) bahwa kekurangan yang menekan kehidupan penduduk miskin saling berpengaruh dan tidak dapat mereka hindari dengan kekuatan sendiri. Untuk itu pemerintah telah melakukan upaya, seperti mengintrodusir berbagai macam paket teknologi pertanian ke pedesaan, membentuk kelembagaan formal pada tingkat desa dengan tujuan dapat membangkitkan aktivitas ekonomi masyarakat sehingga mereka terlepas dari belenggu kemiskinan dan keterbelakangan.

Menurut Kasto, (2004:366) berbagai upaya pemerintah belum mampu mewujudkan kesejahteraan yang memadai dalam segala lapisan secara adil dan merata. Kasto mencontohkan bahwa lapangan pekerjaan yang disediakan oleh pemerintah sangat terbatas sehingga jumlah pengangguran dalam masyarakat terus mengalami peningkatan. Peningkatan ini dapat menimbulkan berbagai ekses-ekses negatif dalam masyarakat seperti pencurian, perampokan. Kondisi tersebut kemungkinan disebabkan oleh kebijaksanaan pemerintah yang kurang tepat. Kebijakan pembangunan selama ini cenderung bersifat sektoral dan kurang memperhatikan dimensi tata ruang wilayah. Di samping itu pemerintah juga menganggap masalah kemiskinan di pedesaan disebabkan oleh faktor yang sama dan karakteristik masyarakat miskin juga dianggap sama. Pada hal dari segi tata ruang bukanlah demikian, karena setiap wilayah mempunyai karakteristik sumberdaya alami dan insani yang berbeda serta membutuhkan kebijakan yang berbeda pula.

Sisi lain dari pandangan yang mengkritisi ketidak berhasilan program pembangunan dalam mengatasi kesempatan kerja, pengangguran dan kemiskinan di Indonesia seperti disebutkan di atas, Sayogyo (1993:5) berpendapat bahwa petani yang merupakan bahagian terbesar dari seluruh penduduk Indonesia dengan pekerjaan utama bercocok tanam umumnya mampu menerima teknologi baru yang lebih unggul sehingga menimbulkan diferensiasi lapangan kerja di luar pertanian. Menurut Sayogyo bahwa penerimaan teknologi baru berdampak terhadap kehidupan sosial ekonomi petani, terutama di pulau Jawa karena munculnya lokasi industri baru yang didukung dengan harga beras yang murah dan stabil, serta saling keterkaitan antar sektor telah berdampak pemerataan pertumbuhan ekonomi sampai di pedesaan. Dan dengan menggunakan garis kemiskinan berdasarkan tingkat pengeluaran rumah tangga jumlah penduduk miskin terus berkurang.

Garis kemiskinan merupakan ukuran rata-rata kemampuan masyarakat untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum. Menurut Nusantoro (1995: 33) garis kemiskinan yang digunakan saat ini cenderung bersifat ekonomi atau pendapatan yang setara beras dengan tingkat konsumsi kalori yang diartikan pencukupan bahan makanan. Pendapatan setara beras dianggapnya tidak relevan dengan perubahan waktu, tidak hanya karena kebutuhan dasar seseorang berubah tetapi karena harga beras meningkat lebih lambat dibandingkan dengan kebutuhan hidup lainnya sehingga pendapatan rialnya menurun.

Menurut Sumodiningrat (1996: 19) secara teoritis garis kemiskinan dapat dihitung dengan menggunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan produksi,

(*production approach*), pendapatan, (*income approach*) dan pengeluaran, (*expenditure approach*). Kelemahan dan garis kemiskinan berdasarkan tingkat produksi yaitu hanya dapat menggambarkan kegiatan produksi tanpa memperhatikan pemenuhan kebutuhan hidup. Demikian juga, jika menggunakan pendekatan pendapatan maka kendala yang dihadapi adalah kesulitan dalam pengumpulan data pendapatan rumah tangga secara akurat. Atas dasar pertimbangan itu, Biro Pusat Statistik (BPS) dalam Sumodiningrat (1996:20) menggunakan konsep pengeluaran sebagai garis kemiskinan yang dinyatakan dengan besaran rupiah yang dikeluarkan atau dibelanjakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi setara dengan 2.100 kalori per kapita per hari ditambah dengan kebutuhan pokok minimum lainnya seperti sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, angkutan dan bahan bakar.

Dengan menggunakan konsep pengeluaran, Badan Pusat Statistik pada tahun 1998 menetapkan garis kemiskinan penduduk perkotaan sebesar Rp 96.959 per kapita per bulan dan penduduk miskin perdesaan sebesar Rp 72.780 per kapita per bulan. Dengan perhitungan uang tersebut dapat dibelanjakan untuk memenuhi konsumsi setara dengan 2.100 kalori per kapita per hari, ditambah dengan pemenuhan kebutuhan pokok minimum lainnya, seperti sandang, kesehatan, pendidikan, transportasi. Angka garis kemiskinan ini jauh sangat tinggi bila dibanding dengan angka tahun 1996 sebelum krisis ekonomi yang hanya sekitar Rp 38.246 per kapita per bulan untuk penduduk perkotaan dan Rp 27.413 bagi penduduk perdesaan.

Dengan menggunakan ukuran pengeluaran diketahui masih terdapat penduduk miskin yang cukup besar di Indonesia. Besarnya penduduk miskin merupakan salah satu masalah yang harus diatasi dengan pembangunan yang dimulai sejak tahun 1969. Pembangunan jangka panjang tahap pertama (PJP-I) telah menurunkan penduduk miskin dari 70 juta jiwa atau 60 % dari seluruh rakyat Indonesia pada tahun 1970 menjadi 27,2 jiwa atau 15,1 % pada tahun 1990 dan pada tahun 1993 penduduk miskin di Indonesia berkurang menjadi 25,9 juta jiwa atau 13,7 % (Kartasasmita, 1993:47).

Terjadinya penurunan kemiskinan di Indonesia, menurut Tambunan, (2004:130) disebabkan karena terjadinya pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan persyaratan pertama untuk mengurangi kemiskinan, karena pertumbuhan ekonomi berarti pertumbuhan output di sektor-sektor ekonomi yang selanjutnya berarti peningkatan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan riil yang pada gilirannya berdampak positif terhadap pengurangan jumlah orang miskin.

Kesimpulan Tambunan tentang hubungan negatif antara pertumbuhan ekonomi dengan kemiskinan belum sejalan dengan kesimpulan bank Indonesia yang memprediksikan perekonomian makro tumbuh sebesar 4,4 – 4,9 % pada tahun 2004. Pertumbuhan tersebut lebih banyak bertumpu pada konsumsi swasta yang mencapai 5,4 – 5,9 %. Peningkatan ini didukung oleh peningkatan pendapatan dan semakin mudah akses pembiayaan baik dari perbankan maupun Lembaga pembiayaan lain. Investasi juga menunjukkan kecenderungan meningkat yang diperkirakan mencapai pertumbuhan sebesar 8,3 - 8,8 %. Demikian juga

dengan ekspor mencapai pertumbuhan sebesar 5,2 – 5,7 %. Walaupun terjadi peningkatan yang cukup berarti pada beberapa indikator ekonomi sebagaimana disebutkan di atas, namun Menurut Bank Indonesia (2004:5) bahwa pertumbuhan tersebut belum cukup meningkatkan kapasitas perekonomian secara keseluruhan, terutama sektor usaha kecil yang menampung banyak tenaga kerja guna mengatasi pengangguran dan kemiskinan

Walaupun terdapat perbedaan pandangan sebagaimana disebutkan di atas, namun Badan Pusat Statistik menggambarkan hubungan antara pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan telah memberikan kontribusi yang besar terhadap pengurangan kemiskinan (yang diukur dari jumlah orang yang hidup di bawah garis kemiskinan sebagai suatu persentase dari jumlah penduduk) yang terjadi setiap tahun sebagaimana terdapat pada Tabel 1.1 yang menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan menurun secara signifikan dari 40 % menjadi 11 % selama tahun 1996-1999 dan penurunan terbesar terjadi selama tahun 1970-an hingga awal tahun 1980-an sebesar 13 persen. Sedangkan selama periode 1981-1993 laju penurunan hanya 16 persen. Menurut Tambunan (2004:135) pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu upaya untuk mengentaskan kemiskinan.

Tabel 1.1
GARIS KEMISKINAN, JUMLAH DAN PERSENTASE DARI POPULASI
YANG HIDUP DI BAWAH GARIS KEMISKINAN
DI INDONESIA: 1976-2004

Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bulan)		Orang Miskin (%)			Jumlah Orang Miskin (juta Orang)		
	Kota	Desa	Kota	Desa	Nasional	Kota	Desa	Nasional
1976	4.522	2.849	38,8	40,4	40,1	10,0	44,2	54,2
1978	4.969	2.981	30,8	33,4	33,3	8,3	38,9	47,2
1980	6.831	4.449	29,0	28,4	28,4	9,5	32,8	42,3
1981	9.777	5.887	28,1	26,5	26,5	9,3	31,3	40,6
1984	13.731	7.746	23,1	21,2	21,2	9,3	25,7	35,0
1987	17.381	10.294	20,1	16,1	16,1	9,7	20,3	30,0
1990	20.614	13.295	16,8	14,3	14,3	9,4	17,8	27,2
1993	27.905	18.244	13,4	13,8	13,8	8,7	17,2	25,9
1996	42.032	31.366	9,7	12,3	12,3	9,6	24,9	34,5
1998	96.959	72.780	21,9	25,7	25,7	17,6	31,9	49,5
1999	92.409	74.272	19,4	26,0	26,0	15,6	32,3	48,0
2000	91.632	73.648	14,6	22,4	22,4	12,1	25,2	37,3
2001	100.011	80.382	9,8	24,8	24,8	8,5	28,6	37,1
2002	Na	Na	14,5	21,1	21,1	13,3	25,1	38,4
2003	Na	Na	13,57	20,23	20,23	12,2	25,1	37,3
2004*	Na	Na	12,6	19,5	12,6	11,5	24,6	36,1

Sumber: BPS, 2004.

Terjadinya penurunan penduduk miskin di Indonesia baik secara relatif maupun absolut tidak dapat dijadikan landasan yang kuat untuk mengkaji kemiskinan penduduk di berbagai daerah baik Provinsi maupun Kabupaten Kota di Indonesia. Hal itu dikarenakan proporsi penduduk miskin terhadap populasi penduduk memiliki perbedaan yang sangat bervariasi antara satu provinsi dengan provinsi lainnya. Pada tahun 1999 Provinsi dengan persentase penduduk miskin terbanyak adalah, Nusa Tenggara Timur (19,30%), Kalimantan Barat (18,90%), Papua/Irian Jaya (18,18%), Nusa Tenggara Barat (15,70%) dan Maluku (15,01%), BPS (2003: 5)

Provinsi Maluku pada tahun 2003 mempunyai penduduk miskin sebanyak 400.000 orang atau sebesar 32,91 persen dari total jumlah penduduk sebagaimana terdapat dalam Tabel 1.2 sebagai berikut

Tabel 1.2.
JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MISKIN SERTA GARIS
KEMISKINAN MENURUT KABUPATEN/KOTA
DI PROVINSI MALUKU TAHUN 2003

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Miskin (000)	Persentase Penduduk Miskin (%)	Garis Kemiskinan (Rp. Bulan)
(1)	(2)	(3)	(4)
Maluku Tenggara Barat	62,1	44,17	126.544
Maluku Tenggara	71,3	38,18	125.501
Maluku Tengah	210,7	38,32	129.995
Pulau Buru	38,3	32,57	124.243
Kota Ambon	17,6	7,89	137.326

Sumber: BPS: 2003

Tabel 1.2 menjelaskan tentang penvebaran penduduk miskin di Provinsi Maluku pada 5 Kabupaten, 47 Kecamatan, 844 Desa dan 33 Kelurahan. Tabel ini juga menjelaskan bahwa Maluku Tenggara Barat mempunyai persentase penduduk miskin terbesar sedangkan persentase penduduk miskin terkecil adalah Kotamadya Ambon. Secara teoritis kondisi kemiskinan yang melilit masyarakat Maluku diduga berasal dari (a) teknologi yang rendah dan kelembagaan yang masih belum berfungsi, dan (b) sumberdaya manusia yang rendah ditunjukkan oleh tingkat pendidikan yang rendah, keterampilan yang rendah, kesehatan yang rendah, aksesibilitas terhadap kelembagaan yang rendah dan kurangnya mata pencaharian alternatif, di samping faktor geografis dan sistem nilai budaya yang melekat dalam kehidupan masyarakat

Sejauh pengamatan peneliti belum ada studi yang dapat menjelaskan keabsahan dari pandangan tersebut. Peneliti baru menemukan hasil studi mengenai masalah kemiskinan dan faktor penyebabnya untuk kasus pulau Jawa seperti hasil studi Sinaga dan White (1984:144) dan White dan Sinaga (1986:143), Syukur (1988:54), Mintoro (1983:47), Wahyuni (1993:12) dan Daulay (2002). Hasil studi tersebut tentu tidak dapat digeneralisasi untuk daerah lain khususnya untuk Provinsi Maluku, karena perbedaan kondisi wilayah, ekonomi dan sosial budaya masyarakat.

Kemiskinan di Maluku umumnya dan Buru khususnya bukan merupakan fenomena ekonomi semata, akan tetapi juga merupakan fenomena sosial budaya yang cukup kompleks. Faktor sosial budaya ternyata sulit dipisahkan dengan masalah kemiskinan karena masih ada sistem nilai budaya yang menghambat aktivitas ekonomi masyarakat apalagi di pedesaan yang masih kuat tatanan sosial budayanya. Hambatan utama bagi penduduk miskin yang berada di pedesaan dan terisolir untuk keluar dari kemiskinan adalah tidak tersedianya prasarana dan sarana jalan dan angkutan yang memadai untuk menggerakkan perekonomian rakyat. Jika berbagai kekurangan tidak segera ditangani akibatnya masyarakat akan tetap berada dalam kemiskinan karena mereka telah dibentuk oleh sistem nilai budaya yang ada untuk menjadi miskin.

Menurut Huliselan (1996:78) di Maluku terdapat dua sub sistem budaya yang dianut oleh masyarakat. Subsistem budaya tersebut adalah subsistem budaya yang dianut oleh masyarakat yang tinggal di daerah pegunungan dan sub sistem nilai budaya daerah pesisir yang dianut oleh masyarakat yang tinggal di

sepanjang pantai. Sub sistem nilai budaya tersebut secara antropologis akan mempengaruhi sikap dan tingkah laku masyarakat Maluku. Dengan demikian keadaan alam sekitar akan ikut menentukan sikap, perilaku dan persepsi masyarakat Maluku terhadap suatu objek tertentu termasuk juga di dalamnya mengenai masalah kemiskinan

Kabupaten Buru memiliki potensi sumber daya alam di darat yang kaya akan hasil hutan berupa kayu, rotan, dan damar, hasil tambang serta hasil pertanian lainnya seperti, tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan. Selain potensi sumber daya alam Kabupaten Buru memiliki keanekaragaman etnis dengan tradisi kebersamaan yang kokoh, di samping terdapat perbedaan-perbedaan sosial kultural karena adanya pembatas-pembatas topografi perbukitan dan pegunungan, serta kondisi kepulauan.

Salah satu keunggulan yang menjadi sifat khusus Kabupaten Buru terletak pada kesuburan tanah dan letaknya yang sangat strategis dalam lalu lintas perdagangan internasional yang dimulai pada tahun 1785 yang ditandai dengan dibangunnya benteng Bruyns oleh Serikat dagang Belanda, *Verenigde Oost Indische Compagnie* (VOC), di desa Kayeli Kabupaten Buru

Berdasarkan gambaran potensi sumber daya alam yang ada, idealnya kekayaan tersebut dapat dimanfaatkan untuk menciptakan lapangan kerja dan kesempatan berusaha yang seluas-luasnya kepada penduduk Kabupaten Buru baik pada sektor formal maupun informal. Konsekuensi daripada keterlihatan penduduk Kabupaten Buru dalam berbagai lapangan pekerjaan dan lapangan usaha adalah menerima balas jasa baik dalam bentuk uang/pendapatan, barang

maupun jasa. Peningkatan pendapatan rumah tangga menjadi landasan untuk meningkatkan konsumsi baik makanan, pakaian, perumahan, pendidikan, dan kesehatan. Peningkatan pendapatan berdampak terhadap peningkatan taraf hidup dan rasa percaya diri yang tinggi yang selanjutnya berdampak terhadap peningkatan produktivitas, meningkatnya investasi perkapita mengurangi pengangguran dan menurunkan kemiskinan.

Realitas menunjukkan keadaan yang berbeda di mana secara absolut penduduk miskin di Kabupaten Buru masih cukup besar dan terus meningkat dari waktu ke waktu sebagaimana terdapat pada Tabel. 1.3. Tabel tersebut memperlihatkan adanya peningkatan penduduk miskin baik secara absolut maupun relatif yang sangat besar dari tahun ke tahun. Terjadinya peningkatan penduduk miskin selain disebabkan karena pendapatan yang rendah, pendidikan dan keterampilan yang belum memadai, keterisolasian daerah juga disebabkan karena adanya krisis ekonomi sejak pertengahan tahun 1997 dan kerusuhan yang berkepanjangan di daerah Maluku sejak tahun 1999, terutama di Ambon.

Tabel 1.3
PERKEMBANGAN JUMLAH PENDUDUK, PENDUDUK MISKIN DAN
PERSENTASE DI KABUPATEN BURU TAHUN 1993-2002

Tahun	Jumlah Penduduk (orang)	Jumlah Penduduk Miskin (orang)	Persentase Penduduk Miskin
1993	62.647	7.200	11,49
1996	89.575	11.197	12,50
2000	119.250	15.324	12,85
2002	120.900	24.324	19,47
2003	124.243	38.200	32,57

Sumber : BKKBN Kab. Buru (2002) dan BPS: 2003

Walaupun berbagai upaya untuk menurunkan penduduk miskin terus dilakukan tetapi angka tersebut masih sangat besar sehingga menjadi tantangan berbagai pihak seperti; pemerintah, dunia usaha, lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan, Perguruan Tinggi maupun penduduk miskin itu sendiri untuk terus berusaha meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan melalui partisipasinya secara aktif dalam berbagai lapangan usaha.

Dengan demikian dilihat dari sebab akibat maka, penduduk miskin adalah mereka yang serba kurang mampu dan terbelit dalam lingkaran ketidakberdayaan, di mana rendahnya pendapatan mengakibatkan rendahnya pendidikan dan kesehatan sehingga mempengaruhi produktivitas. Selain itu kemiskinan yang terjadi karena pengaruh struktural ditandai dengan adanya ketimpangan dalam strategi pembangunan yang bias kota, menurut Lipton (1976) dalam Nasikum, (1992) bahwa hasil yang dicapai dari pembangunan adalah meningkatnya kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat pada umumnya, namun demikian, ada sebagian masyarakat yang dirasakan masih tertinggal kesejahteraannya dibandingkan dengan kelompok masyarakat lain.

Ketertinggalan sebagian masyarakat Kabupaten Bunu dalam mengakses fasilitas publik yang menjadi salah satu penyebab kemiskinan merupakan hal penting untuk dikaji. Pengkajian ini tidak terbatas pada upaya mengungkapkan berbagai faktor internal dari penduduk miskin, tetapi lebih dari itu dimaksudkan untuk mengungkapkan berbagai kebijakan publik dari pemerintah Kabupaten di era otonom baik secara langsung maupun tidak langsung berhubungan pengentasan kemiskinan.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka dirumuskan judul studi ini yaitu **Faktor Sosial Ekonomi Yang Mempengaruhi Kemiskinan Melalui Aksesibilitas Publik di Kabupaten Buru Provinsi Maluku.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan judul studi tersebut, disusunlah rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah Modal berpengaruh terhadap kehidupan Sosial Ekonomi penduduk Kabupaten Buru ?
2. Apakah pendidikan berpengaruh terhadap kehidupan Sosial Ekonomi penduduk Kabupaten Buru ?
3. Apakah budaya berpengaruh terhadap kehidupan Sosial Ekonomi penduduk Kabupaten Buru ?
4. Apakah kesehatan berpengaruh terhadap kehidupan Sosial Ekonomi penduduk Kabupaten Buru ?
5. Apakah kehidupan Sosial Ekonomi penduduk Kabupaten Buru berpengaruh terhadap aksesibilitas pasar ?
6. Apakah kehidupan Sosial Ekonomi penduduk Kabupaten Buru berpengaruh terhadap aksesibilitas koperasi ?
7. Apakah kehidupan Sosial Ekonomi penduduk Kabupaten Buru berpengaruh terhadap aksesibilitas bank ?
8. Apakah kehidupan Sosial Ekonomi berpengaruh terhadap kemiskinan masyarakat Kabupaten Buru ?

9. Apakah Aksesibilitas berpengaruh terhadap kemiskinan masyarakat Kabupaten Buru ?
10. Apakah kehidupan Sosial Ekonomi berpengaruh terhadap aksesibilitas masyarakat Kabupaten Buru ?
11. Apakah kehidupan Sosial Ekonomi berpengaruh terhadap kemiskinan masyarakat Kabupaten Buru melalui aksesibilitas ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang, dan rumusan masalah disusun tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Membuktikan dan menganalisis pengaruh Modal terhadap kehidupan Sosial Ekonomi penduduk Kabupaten Buru.
2. Membuktikan dan menganalisis pengaruh pendidikan terhadap kehidupan Sosial Ekonomi penduduk Kabupaten Buru.
3. Membuktikan dan menganalisis pengaruh budaya terhadap kehidupan Sosial Ekonomi penduduk Kabupaten Buru.
4. Membuktikan dan menganalisis pengaruh kesehatan terhadap kehidupan Sosial Ekonomi penduduk Kabupaten
5. Membuktikan dan menganalisis pengaruh kehidupan Sosial Ekonomi penduduk Kabupaten Buru terhadap aksesibilitas pasar
6. Membuktikan dan menganalisis pengaruh kehidupan Sosial Ekonomi penduduk Kabupaten Buru terhadap aksesibilitas koperasi.
7. Membuktikan dan menganalisis pengaruh kehidupan Sosial Ekonomi penduduk Kabupaten Buru terhadap aksesibilitas bank

8. **Membuktikan dan menganalisis pengaruh kehidupan Sosial Ekonomi terhadap kemiskinan masyarakat Kabupaten Buru**
9. **Membuktikan dan menganalisis pengaruh Aksesibilitas terhadap kemiskinan masyarakat Kabupaten Buru.**
10. **Membuktikan dan menganalisis pengaruh kehidupan Sosial Ekonomi terhadap aksesibilitas pada masyarakat Kabupaten Buru melalui pasar.**
11. **Membuktikan dan menganalisis pengaruh kehidupan Sosial Ekonomi terhadap kemiskinan masyarakat Kabupaten Buru melalui aksesibilitas.**

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah, perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka manfaat yang akan diperoleh dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagi ilmuan, hasil penelitian ini dapat menjadi landasan untuk melakukan penelitian di bidang ekonomi kependudukan, khususnya kemiskinan di daerah lain. Secara empiris penelitian ini dapat menambah variabel bagi pengembangan konsep ekonomi kependudukan khususnya kemiskinan penduduk.
2. Bagi Pemerintah kabupaten Buru, penelitian ini memberi sumbangan terhadap rumusan konsep kemiskinan serta implementasi kebijakan pengentasan kemiskinan.
3. Bagi penduduk miskin, penelitian ini dapat memberikan jalan keluar untuk meningkatkan pendapatan, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk miskin khususnya dan masyarakat Kabupaten Buru umumnya.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam Bab ini akan disajikan tinjauan pustaka yang merupakan landasan dalam penelitian ini. Ada 2 (dua) kelompok tinjauan pustaka yaitu: (1) Landasan teori, (2) Penelitian sebelumnya.

2.1 Landasan teori

Teori disusun sebagai kerangka pemikiran untuk menjelaskan hubungan faktor-faktor yang terkait dengan satu masalah. Di dalam teori, hubungan dan gejala yang dikemukakan dalam ilmu empiris diterangkan dengan dasar suatu kerangka pemikiran tentang sebab akibat sebagai langkah untuk mengontrol kegiatan agar hasil yang diharapkan dapat tercapai. Teori mempunyai kelebihan dibandingkan empiris.

Suatu teori merupakan seperangkat generalisasi yang saling berhubungan sedemikian rupa sehingga membentuk suatu sistem penjelasan yang logis di mana generalisasi yang satu tidak bertentangan dengan yang lain (Suriasumantri, 1994:95)

Teori tidak hanya menjelaskan tentang realita yang dialami, akan tetapi juga membantu sebagai sumber yang penting untuk lahirnya hipotesis. Teori mempunyai kelebihan nyata dalam merangsang penelitian dan dalam memberikan hipotesis yang berharga. Mengingat pentingnya teori, maka dalam penelitian dan penyusunan hipotesis perlu dikemukakan beberapa teori yang relevan dengan judul penelitian antara lain teori pembangunan ekonomi, penduduk dan tenaga kerja, dan kemiskinan.

2.2 Teori Pembangunan

Ilmu ekonomi dari sudut pandang ekonomi Pembangunan pada dasarnya adalah studi tentang kegiatan ekonomi dan taraf kesejahteraan masyarakat dari satu tahap pembangunan ke tahap pembangunan berikutnya disertai dengan perbaikan sistem kelembagaan (ekonomi, politik, hukum, sosial, dan budaya), Arsyad, (1999:6). Implementasinya belum dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga tergolong miskin.

Djojohadikusumo (1994:58) menyatakan bahwa walaupun kebijaksanaan-kebijaksanaan pembangunan ekonomi selalu ditujukan untuk mempertinggi kesejahteraan dalam arti yang seluas-luasnya, kegiatan pembangunan ekonomi selalu dipandang sebagai bagian dari keseluruhan usaha pembangunan yang dijalankan oleh suatu masyarakat. Pembangunan ekonomi meliputi usaha suatu masyarakat untuk mengembangkan kegiatan ekonomi dan mempertinggi tingkat pendapatan masyarakatnya, sedangkan keseluruhan usaha-usaha pembangunan meliputi juga usaha-usaha pembangunan sosial, politik dan kebudayaan. Adanya pembatasan di atas maka pengertian pembangunan ekonomi pada umumnya didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang.

Kecenderungan para ahli pembangunan ekonomi mendefinisikan pembangunan ekonomi sebagai proses kenaikan Pendapatan Nasional yang dinyatakan dalam persentase dan kenaikan pendapatan per kapita yang diperoleh dari persentase pertambahan penduduk. Pendapatan Nasional atau pendapatan per kapita yang diperbandingkan dengan laju pertambahan penduduk sebagai

indikator kemakmuran masyarakat akibat dilaksanakannya pembangunan ekonomi. Meier (dalam Zadjuli, 1985) mendefinisikan pembangunan ekonomi adalah suatu proses, di mana Pendapatan Nasional riil suatu perekonomian bertambah selama suatu periode waktu yang panjang. Dan jika tingkat pembangunan itu lebih besar dari tingkat pertumbuhan penduduk, maka pendapatan riil per kapita akan bertambah.

Menurut Djohadikusumo (1994:66) pembangunan ekonomi adalah suatu proses memperbesar pendapatan per kapita dan menaikkan produktivitas per kapita. Ukuran untuk kemajuan tidak saja pertambahan pendapatan per kapita melainkan pula produktivitas per kapita. Ukuran ini lazim dipergunakan sebagai tingkat hidup masyarakat. Pembangunan ekonomi pada tahun delapan puluhan telah banyak mengalami perubahan dan jauh lebih baik dibanding dengan pengertian pembangunan ekonomi tahun sebelumnya. Karena pembangunan ekonomi pada dasa warsa ini tidak hanya memperhatikan proses kenaikan pendapatan per kapita riil saja tetapi penurunan tingkat kemiskinan, pengangguran, ketidakmerataan distribusi pendapatan dan tingkat ketergantungan kepada luar negeri dalam barang-barang vital.

Definisi pembangunan di Indonesia mencakup bidang yang lebih luas, dimulai dari sektor tradisional, dalam hal ini pertanian tradisional, dilanjutkan dengan industri dan sektor jasa-jasa yang menuju pada sektor modern. Menurut Djohadikusumo (1994:11) pembangunan adalah merupakan suatu proses perubahan struktural, untuk memperbaiki kepingangan dalam perimbangan antara faktor produksi yang tersedia dalam masyarakat, kepingangan dalam tingkat

pertumbuhan antara berbagai sektor kegiatan ekonomi, kepincangan dalam pembagian kekayaan dan penempatan di antara golongan-golongan masyarakat ataupun antar daerah serta antar lingkungan kota dan pedesaan.

Pembangunan baik fisik maupun mental adalah merupakan proses gabungan sosial, ekonomi dan institusional mencakup usaha-usaha untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik. Apapun yang akan dilaksanakan melalui pembangunan, menurut Todaro (1985) tujuannya untuk mencapai tiga sasaran yaitu,

1. Meningkatkan persediaan dan memperluas pembagian/ pemerataan bahan-bahan pokok yang dibutuhkan untuk hidup, seperti makanan, perumahan, kesehatan dan perlindungan
2. Meningkatkan taraf hidup, termasuk menambah dan mempertinggi penghasilan, penyediaan lapangan kerja yang memadai, pendidikan yang lebih baik dan perhatian yang lebih besar terhadap nilai-nilai budaya dan manusiawi, semuanya itu bukan hanya memenuhi kebutuhan materi semata-mata, tetapi juga untuk mengangkat kesadaran akan harga diri, baik individual maupun nasional
3. Memperluas jangkauan pilihan ekonomi dan sosial bagi semua individual dan nasional dengan cara membebaskan mereka dari sikap-sikap budak dan ketergantungan, tidak hanya dalam hubungannya dengan orang lain dan negara-negara lain, tetapi juga dari sumber-sumber kebodohan dan penderitaan manusia.

Dari berbagai pengertian pembangunan yang disampaikan para ahli terlihat adanya suatu jalinan kesamaan pemikiran yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui keterlibatannya secara langsung dalam proses pembangunan. Pemikiran yang mendasari konsep pembangunan adalah suatu proses secara sadar dan berencana untuk mempersiapkan sumber daya manusia dengan pengetahuan, keterampilan dan etos kerja. Dengan kesiapan inilah maka penduduk yang berfungsi sebagai tenaga kerja dapat berpartisipasi dalam lapangan kerja baik formal maupun informal.

Dengan demikian antara pembangunan dengan kemiskinan mempunyai hubungan yang sangat erat. Kemiskinan dapat diatasi dengan pembangunan atau untuk memotong lingkaran kemiskinan yang ada harus dilaksanakan pembangunan, karena pembangunan bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang yang pada akhirnya mencapai tujuan kemakmuran untuk seluruh rakyat.

Dengan dasar pemikiran itulah maka pembangunan ekonomi sesungguhnya menganalisis tentang kemiskinan. Karena persoalan-persoalan yang dikaji mengenai pembangunan ialah, apa yang dilakukan terhadap kemiskinan? Apa yang telah dilakukan terhadap Pengangguran? Apa yang telah dilakukan terhadap kesenjangan? Jika ketiga pertanyaan ini memberikan jawaban yang positif, dengan kata lain kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan itu ada tanda-tanda menurun, maka tidak diragukan lagi bahwa pembangunan sudah berjalan di negara yang bersangkutan. Jika satu atau dua dari problem sentral ini semakin tidak baik, apalagi kalau ketiga-tiganya, maka agak aneh untuk mengatakan pembangunan itu berhasil, kendatipun pendapatan per kapita meningkat dua kali.

2.3 Teori Tenaga Kerja

Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat (Simanjuntak, 1985:10). Menurut Kusumowidho tenaga kerja adalah jumlah seluruh penduduk dalam suatu negara yang dapat memproduksi barang dan jasa, jika ada permintaan terhadap tenaga mereka, dan jika mereka mau berpartisipasi dalam aktivitas tersebut. Menurut Ananta (1997:24) tenaga kerja mencakup penduduk yang sudah atau sedang bekerja, yang sedang mencari pekerjaan dan melakukan kegiatan lain seperti bersekolah dan mengurus rumah tangga. Dengan pengertian tersebut jelas terlihat bahwa tenaga kerja mempunyai peranan yang sangat penting dan menentukan berhasil tidaknya pembangunan. Peran tersebut ditunjukkan sebagai salah satu faktor produksi yang ikut serta dalam kegiatan produksi pada masing-masing sektor ekonomi.

Data tenaga kerja yang dipakai di Indonesia akan mudah difahami dengan memahami beberapa konsep dan definisi yang berkaitan dengan ketenagakerjaan.

1. Penduduk usia kerja adalah mereka yang berdasarkan golongan umurnya sudah bisa diharapkan untuk mampu bekerja. Di Indonesia digunakan umur 15 tahun sebagai batas seseorang dianggap mulai bisa bekerja. Jadi penduduk usia kerja adalah penduduk yang sudah berusia 15 tahun atau lebih.
2. Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja dan yang mencari pekerjaan. Golongan penduduk ini disebut juga penduduk yang aktif secara ekonomi (*economically active population*).

3. Penduduk bukan angkatan kerja adalah usia kerja (15 tahun ke atas) yang tidak bekerja maupun mencari pekerjaan. Golongan penduduk ini secara ekonomi memang tidak aktif dan disebut *non economically active population*. Kegiatan mereka adalah biasanya adalah sekolah, mengurus rumah tangga dan lainnya seperti mereka yang pensiun, cacat jasmani dan sebagainya.
4. Pekerja adalah seseorang yang melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan paling sedikit satu jam sehari dalam seminggu yang lalu. Bekerja satu jam tersebut harus dilakukan berturut-turut dan tidak boleh terputus.
5. Kesempatan kerja menunjukkan banyaknya lapangan kerja yang terisi dan dicerminkan oleh jumlah penduduk 15 tahun ke atas yang bekerja.
6. Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) adalah perbandingan antara jumlah angkatan kerja dengan jumlah seluruh penduduk usia kerja. TPAK adalah perbandingan antara jumlah angkatan kerja dengan jumlah seluruh penduduk usia kerja. TPAK biasanya diperkirakan masing-masing untuk jenis kelamin (laki-laki dan perempuan) dan golongan umur.

Dari definisi tenaga kerja yang memfokuskan pada kesiapan dan kemampuan seseorang untuk bekerja, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sangat tergantung pada kesempatan kerja. Kesempatan kerja adalah banyaknya orang yang tertampung untuk bekerja pada suatu perusahaan atau suatu instansi. Kesempatan kerja ini akan dapat menampung semua tenaga kerja yang tersedia, mencukupi atau seimbang dengan banyaknya tenaga kerja yang tersedia, dengan ketentuan lapangan kerja yang tersedia tersebut mencukupi atau seimbang dengan banyaknya tenaga kerja yang tersedia.

Pengertian lapangan pekerjaan adalah bidang kegiatan dari suatu usaha atau perusahaan atau instansi yang menurut **Biro Pusat Statistik, (1993:3)**, digolongkan sebagai berikut

1. Pertanian, perburuhan, kehutanan, peternakan, perikanan
2. Pertambangan dan penggalian
3. Industri pengolahan
4. Listrik, gas dan air minum
5. Bangunan
6. Perdagangan besar, eceran, rumah makan dan hotel
7. Angkutan, komunikasi dan pergudangan
8. Keuangan, asuransi, usaha persewaan bangunan dan tanah serta jasa perusahaan
9. Jasa kemasyarakatan, sosial dan pribadi
10. Lainnya.

Dalam penciptaan kesempatan kerja pada umumnya dipengaruhi oleh dua faktor pokok, yaitu proses produksi dan pasar (Soeroto, 1986:31). Dalam proses produksi diperlukan masukan/input yang berupa bahan baku, modal, sumber daya manusia, alam dan teknologi yang dikombinasikan untuk menghasilkan output yang berupa barang dan jasa atau investasi yang diperlukan oleh proses produksi yang menghasilkan barang dan jasa. Seterusnya diperlukan adanya pasar untuk mendistribusikan *output* kepada yang menggunakannya (konsumen) agar perusahaan memperoleh pendapatan, di sisi lain, diperlukan pula pasar untuk menyediakan *input* bagi proses produksi.

Kebijakan pembangunan di Indonesia haruslah berorientasi kepada penciptaan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha. Hal ini telah dirumuskan dalam empat macam kebijakan (Soeroto, 1986:98 – 111), yaitu :

1. Kebijakan kesempatan kerja umum, yang bertujuan memberi dorongan pada perluasan kesempatan kerja atau untuk menimbulkan iklim yang menguntungkan bagi pengembangan dunia usaha untuk penciptaan serta perluasan kesempatan kerja. Dorongan ini dilakukan dengan menggunakan alat-alat kebijakan ekonomi dan keuangan, seperti perkreditan, perpajakan, bea masuk, suku bunga, nilai tukar mata uang, tingkat harga, upah, pasar tenaga kerja, teknologi, pendidikan dan latihan.
2. Kebijakan kesempatan kerja sektoral, yang dilakukan dengan pembangunan sektoral, baik dilakukan dalam rangka pembangunan nasional, daerah maupun desa. Hal ini terutama diarahkan kepada penciptaan kesempatan kerja melalui pemilihan produk dan teknologi yang bersifat padat karya.
3. Kebijakan kesempatan kerja khusus, dimaksudkan sebagai program dan langkah-langkah dalam kebijakan yang direncanakan khusus untuk memperluas kesempatan kerja dan penggunaan tenaga kerja serta untuk mengurangi pengangguran yang timbul sewaktu-waktu sebagai akibat musim, bencana alam atau serangan hama yang meluas.
4. Kebijakan pembangunan daerah pada dasarnya mempunyai fungsi dalam perluasan kesempatan kerja apabila dilihat dari pembangunan intern tiap-tiap daerah dan hubungan antar daerah. Pada hakekatnya tiap-tiap proyek pembangunan dilakukan dalam suatu daerah dan kebijakan kesempatan kerja selalu mempunyai implikasi daerah dan implementasinya pun harus menjadi komponen pembangunan daerah.

Dari teori pembangunan, tenaga kerja dan kesempatan kerja yang disebutkan di atas, terlihat bahwa dalam konteks Indonesia umumnya dan Kabupaten Buru khususnya ada kesenjangan yang cukup besar antara harapan dari penduduk dan angkatan kerja untuk mendapatkan pekerjaan dan kesempatan berusaha yang didukung dengan iklim usaha yang kondusif dengan lapangan kerja dan lapangan usaha yang tersedia demikian terbatas sebagai akibat adanya ketimpangan pembangunan yang mengakibatkan terjadinya kemiskinan, terutama di pedesaan. Umumnya penduduk miskin sangat terbatas dalam mengakses fasilitas publik seperti: kesehatan, air minum, pendidikan, nutrisi, di samping rendahnya pembangunan sumberdaya manusia karena di daerah pedesaan masih terdapat lebih dari 90 persen penduduk miskin hanya berpendidikan sekolah dasar (SD).

2.4 Teori Kemiskinan

Teologi adalah ilmu yang mengkaji mengenai zat tertinggi atau ketuhanan. Kajian kemiskinan dari sudut teologi adalah adanya suatu paham apakah kemiskinan yang menimpa seseorang merupakan suatu takdir atukah timbul karena si manusia itu sendiri tidak berusaha untuk tidak miskin. Kajian teologi juga mempertanyakan apakah pengentasan kemiskinan tersebut menjadi kewajiban negara atau kewajiban masing masing individu untuk berusaha sendiri. Para penulis berpendapat bahwa pengentasan kemiskinan menjadi kewajiban negara, baik dilihat dari sisi moral, maupun amanat yang sudah tertera dalam Undang Undang Dasar 1945.

Ontologi merupakan komponen ilmu filsafat yang mengkaji tentang keberadaan suatu obyek. Dalam kaitannya dengan kemiskinan, ontologi berusaha untuk mengkaji definisi dari suatu obyek yang sedang diteliti, yaitu kemiskinan.

Kajian kausalitas adalah kajian mengenai sebab-sebab terjadinya suatu kejadian. Dalam penulisan ini dikaji sebab-sebab terjadinya kemiskinan. Dan data-data empiris dapat diambil kesimpulan bahwa sebab-sebab kemiskinan dapat dibagi menjadi tiga golongan. Pertama, kemiskinan yang ditimbulkan oleh faktor alamiah, yaitu kondisi lingkungan yang miskin, ilmu pengetahuan yang tidak memadai, adanya bencana alam dan lain lain. Kedua, kemiskinan yang disebabkan karena faktor non alamiah, yaitu adanya kesalahan kebijakan ekonomi, korupsi, kondisi politik yang tidak stabil, kesalahan pengelolaan sumber daya alam dan lain lain. Kausalitas kemiskinan dalam kajian ini adalah, bahwa penyebab kemiskinan yang terjadi di Indonesia adalah faktor non alamiah, terutama karena adanya kesalahan dalam kebijakan ekonomi.

Aksiologi adalah cabang ilmu filsafat yang mempertanyakan nilai suatu obyek yang akan dikaji dan manfaat dari obyek yang dikaji. Tujuan dari kajian kemiskinan di Indonesia adalah untuk mengetahui gambaran atau peta kemiskinan di Indonesia, baik dilihat dari geographis, tingkat pendidikan dan peubah-peubah yang mempengaruhi kemiskinan. Dengan diketahuinya peta kemiskinan tersebut maka akan memudahkan bagi pengambil keputusan untuk membuat kebijakan untuk mengentaskan kemiskinan.

Epistemologi adalah cabang ilmu filsafat yang mempelajari asal mula ilmu pengetahuan, metode validitasnya dan prosedur penelitian. Dalam kajian

kemiskinan, penelitian dilakukan dengan mempelajari data-data empiris, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri. Juga dilakukan kajian banding dengan negara-negara lain, terutama mengenai kebijakan-kebijakan ekonomi pengentasan kemiskinan. Hasil yang diharapkan berupa model kemiskinan, dengan diketahui peubah-peubah yang mempengaruhi kemiskinan. Akhirnya pemerintah dapat mengambil kebijaksanaan untuk menekan angka kemiskinan.

Dari kajian di atas jelas terlihat bahwa kemiskinan adalah konsep yang abstrak yang dapat dijelaskan secara berbeda tergantung dari pengalaman, perspektif, sudut pandang atau ideologi yang dianut (Muhadjir, 2005:1). Pendekatan dalam memahami kemiskinan telah banyak mengalami kemajuan. Bila semula pengertian kemiskinan hanya ditekankan pada kurangnya pemilikan materi atau ketidakcukupan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan dasar, maka kini kemiskinan telah mengalami perluasan arti dengan menyentuh posisi individu dalam proses-proses perubahan sosial ekonomi serta akses dalam politik. Dengan kata lain, kalau pada pendekatan lama, kemiskinan hanya didekati dari segi deprivasi dalam pendapatan/ konsumsi/ belanja, maka pendekatan baru menekankan pada deprivasi terhadap kemampuan sumber daya manusia seperti pengetahuan, standar kelayakan hidup, dan lebih menekankan lagi pada partisipasi dan pemberdayaan.

2.4.1 Perspektif Kemiskinan

Persoalan kemiskinan bukan saja menarik bagi politisi tetapi juga menjadi bahan kajian yang luas di kalangan akademisi. Dari perdebatan mengenai isu kemiskinan telah melahirkan teori-teori pembangunan yang sekarang ini kita

kenal. Wacana mengenai isu kesenjangan ekonomi antar negara sebagai akibat inefisiensi penggunaan sumberdaya telah melahirkan teori perdagangan internasional. Wacana mengenai kesenjangan ekonomi antar daerah atau wilayah telah melahirkan teori pusat pertumbuhan (*growth poles theory*) dan teori investasi (*Harrod-Domar theory*). Bahkan teori-teori pembangunan baik teori modernisasi maupun teori struktural, terbangun dari perdebatan mengenai isu kemiskinan.

Secara garis besar persepsi mengenai kemiskinan baik di kalangan akademisi, birokrat, dan politisi dapat dikelompokkan dalam tiga mazhab (Hutomo, 1996) yaitu:

Mazhab pertama yang sering disebut mazhab *magical*, berpandangan bahwa kemiskinan adalah suatu takdir yang harus diterima seperti adanya. Bentuk refleksi dari mazhab *magical* ini adalah, bahwa orang miskin karena ditakdirkan oleh pencipta. Adanya orang miskin dan orang kaya adalah sesuatu yang wajar. Argumentasi mazhab ini, tidak mungkin semua orang menjadi kaya dan sebaliknya juga tidak mungkin semua orang menjadi miskin semua. Adanya orang miskin dan orang kaya adalah karya Ilahi yang menciptakan dunia ini serba berpasangan. Bentuk aksi dari mazhab ini adalah penyesuaian (*conformis*) atau menerima apa adanya terhadap takdir dan terhadap struktur sosial, politik, dan struktur ekonomi yang sudah dianggap *given*.

Mazhab kedua disebut sebagai mazhab *naive*. Mazhab ini berpandangan bahwa kemiskinan terjadi karena faktor-faktor internal yang dimiliki atau melekat pada orang miskin itu sendiri. Sebutan lain dari pandangan ini antara lain:

kemiskinan kultural dan atau kemiskinan mentalitet (Admiral, 1997:35). Pendidikan rendah, keterampilan kurang, fatalistis, modal kecil, kondisi alam yang tidak baik, kesehatan buruk, dan partisipasi politik rendah, adalah faktor penyebab terjadinya kemiskinan. Oleh sebab itu, bentuk aksi untuk memecahkan kemiskinan adalah melalui *human resources development*, *sosial capital development*, *physical infrastructure development*, dan pemberian fasilitas permodalan. Pandangan mazhab ini hampir mendominasi perencana-perencana pembangunan di negara dunia ketiga. Munculnya tesis lingkaran setan kemiskinan, yang selalu digunakan perencana dalam memahami kemiskinan, lahir dari mazhab *naive* ini. Menurut mazhab ini, struktur ekonomi, struktur politik, dan struktur sosial yang ada sudah *given*, oleh sebab itu bentuk aksi atau solusi yang ditawarkan oleh mazhab ini adalah reformasi (*reformis*).

Mazhab ketiga disebut sebagai mazhab *critical*. Mazhab ini berpandangan bahwa orang miskin terjadi karena dimiskinkan oleh sistem atau struktur. Struktur yang dimaksud bukan saja struktur ekonomi, tetapi juga struktur politik, dan struktur sosial budaya. Adanya struktur politik, ekonomi, dan sosial budaya, yang memungkinkan terjadinya akumulasi kekayaan dan kekuasaan di suatu kelompok masyarakat di satu pihak, dan kurang memberi kesempatan pada kelompok masyarakat yang lain untuk berperan serta dalam pembangunan politik dan ekonomi di pihak lain, adalah penyebab terjadinya kemiskinan.

Pengelompokan lain atas pandangan terhadap fenomena kemiskinan telah dipaparkan oleh Qaradhawy (2002:10), yang membedakan pandangan manusia terhadap kemiskinan ke dalam lima kelompok, yaitu (a) kelompok yang

mensucikan kemiskinan, berpandangan bahwa kemiskinan sebagai karunia Tuhan dan bukan merupakan suatu keburukan yang perlu diatasi dan bukan pula suatu problem yang harus dipecahkan; (b) kelompok Fatalis (*Jabariyah*), berpandangan bahwa kemiskinan adalah takdir Tuhan dan merupakan suatu bencana atau ujian, (c) kelompok yang mengajak berbuat kebajikan, berpandangan sama dengan kelompok Jabariyah tetapi disertai dengan padangan bahwa kemiskinan sebagai problem yang perlu diatasi dan mengajak orang-orang kaya untuk ikut membantu mengatasinya, (d) Kelompok Kapitalis (*Ra'sumaliyyah*), berpandangan bahwa kemiskinan merupakan salah satu bahaya kehidupan dan penanggulungannya merupakan tanggung jawab orang miskin sendiri, (e) Kelompok Sosialis-Marxis, berpendapat bahwa melenyapkan kemiskinan dan berusaha menyadarkan orang miskin adalah suatu hal yang tidak mungkin tercapai kecuali apabila golongan Borjuis beserta sumber-sumber penghasilan dan kekayaan mereka dimusnahkan terlebih dahulu. Sebagai tindak lanjutnya, harus dibentuk kelas-kelas lain guna menghadapi golongan Borjuis, sambil menaburkan benih-benih kedengkian dan kemarahan dan akhirnya tercapailah kemenangan golongan *proletar*. Dalam aksinya golongan ini tidak cukup sekadar menghancurkan golongan Borjuis, tetapi juga berusaha melenyapkan prinsip-prinsip hak milik individu.

Perspektif mengenai kemiskinan ini penting untuk dipahami sebelum kita menganalisis strategi penanggulangan kemiskinan, sebab perspektif ini akan sangat mempengaruhi pilihan strategi dalam memecahkan masalah kemiskinan. Artinya, efektivitas strategi penanggulangan kemiskinan akhirnya akan ditentukan oleh kesahihan asumsi yang digunakan. Apabila asumsi mazhab *magical* memang

benar, maka pendekatan *conformis* tepat dalam rangka penanggulangan kemiskinan. Apabila asumsi yang digunakan oleh mazhab *naive* memang sah, maka pendekatan *reformis* adalah pendekatan yang tepat dalam menanggulangi masalah kemiskinan. Sebaliknya bila asumsi dari mazhab *critical* memang sah, maka pendekatan *transformis* adalah pendekatan yang efektif dalam memecahkan masalah kemiskinan.

2.4.2 Definisi Kemiskinan

Untuk merumuskan suatu definisi tentang kemiskinan dari sejumlah pandangan dan pendekatan yang dinamis memang tidak mudah, karena formulasi dari para ahli dan penelitian dipengaruhi oleh fokus kajian masing-masing. Specker (1993) menyatakan bahwa kemiskinan mencakup (1) kekurangan fasilitas fisik bagi kehidupan yang normal, (2) gangguan dan tingginya risiko kesehatan, (3) risiko keamanan dan kerawanan kehidupan sosial ekonomi dan lingkungannya, (4) kekurangan pendapatan yang mengakibatkan tidak bisa hidup layak, dan (5) kekurangan dalam kehidupan sosial yang dapat ditunjukkan oleh ketersisihan sosial, ketersisihan dalam proses politik, dan kualitas pendidikan yang rendah.

Konferensi Dunia untuk Pembangunan Sosial telah mendefinisikan kemiskinan sebagai berikut: Kemiskinan memiliki wujud yang majemuk, termasuk rendahnya tingkat pendapatan dan sumber daya produktif yang menjamin kehidupan berkesinambungan; kelaparan dan kekurangan gizi, rendahnya tingkat kesehatan, keterbatasan dan kurangnya akses kepada pendidikan dan layanan-layanan pokok lainnya; kondisi tak wajar dan kematian

akibat penyakit yang terus meningkat; kehidupan bergelandang dan tempat tinggal yang tidak memadai; lingkungan yang tidak aman; serta diskriminasi dan keterasingan sosial. Kemiskinan juga dicirikan oleh rendahnya tingkat partisipasi dalam proses pengambilan keputusan dalam kehidupan sipil, sosial dan budaya.

Maxwell (1999) menggunakan istilah kemiskinan untuk menggambarkan : keterbatasan pendapatan dan konsumsi, keterbelakangan derajat dan martabat manusia, ketersingkiran sosial, keadaan yang menderita karena sakit, kurangnya kemampuan dan ketidakberfungsian fisik untuk bekerja, kerentanan (dalam menghadapi perubahan politik dan ekonomi), tiadanya keberlanjutan sumber kehidupan, tidak terpenuhinya kebutuhan dasar, dan adanya perampasan relatif (*relative deprivation*).

May (2001) menggambarkan kemiskinan sebagai keadaan; ketidakterjaminan pendapatan, kurangnya kualitas kebutuhan dasar, rendahnya kualitas perumahan dan asset-asset produktif, ketidakmampuan memelihara kesehatan yang baik, ketergantungan dan ketiadaan bantuan, adanya perilaku anti sosial (*anti-social behavior*), kurangnya dukungan jaringan untuk mendapatkan kehidupan yang baik, kurangnya infrastruktur dan keterpencilan, serta ketidakmampuan dan keterpisahan.

Dari beberapa definisi tentang kemiskinan di atas, secara umum semuanya menunjukkan bahwa kemiskinan merupakan kondisi dimana seseorang atau suatu keluarga berada dalam keadaan: Kekurangan dan atau ketidaklayakan atau kekurangan akses dalam memperoleh pelayanan minimal dalam berbagai bidang kehidupan, serta sulit atau kurang memperoleh akses dalam proses-proses pengambilan kebijakan.

Office of the High Commissioner for Human Rights, United Nations menyatakan bahwa kemiskinan terjadi karena adanya pengingkaran hak-hak manusia, karena itu kemiskinan tidak mungkin diatasi tanpa realisasi hak-hak manusia (OHCHR, 2001 : hal. 1). Bappenas dalam dokumen Strategi nasional Penanggulangan Kemiskinan juga mendefinisikan masalah kemiskinan dari perspektif ini. "Masalah kemiskinan bukan hanya diukur dari pendapatan, tetapi juga masalah kerentanan dan kerawanan orang atau sekelompok orang baik laki-laki maupun perempuan untuk menjadi miskin. Masalah kemiskinan juga menyangkut tidak terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat miskin untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan bermartabat. Pemecahan masalah kemiskinan perlu didasarkan pada pemahaman suara masyarakat miskin, dan adanya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak mereka, yaitu hak sosial, budaya, ekonomi dan politik. Oleh karena itu, strategi dan kebijakan yang dirumuskan dalam SNPK didasarkan atas pendekatan berbasis hak" (Bappenas, 2005 : hal. XV).

Menurut Sallatang (1986), bahwa kemiskinan adalah ketidakecukupan penerimaan pendapatan dan kepemilikan kekayaan materi, tanpa mengabaikan standar atau ukuran-ukuran fisiologi, psikologi dan sosial. Sementara itu Esmara (1986:34), mengartikan kemiskinan ekonomi sebagai keterbatasan sumber-sumber ekonomi untuk mempertahankan kehidupan yang layak. Dengan demikian fenomena kemiskinan umumnya dikaitkan dengan kekurangan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak. Menurut Basri (1995) bahwa kemiskinan, pada dasarnya mengacu pada keadaan serba kekurangan dalam

pemenuhan sejumlah kebutuhan, seperti sandang, pangan, papan, pekerjaan, pendidikan, pengetahuan, dan lain sebagainya. Kesimpulan dari pendapat-pendapat di atas bahwa, kemiskinan merupakan kondisi serba kekurangan dalam pemenuhan kebutuhan pokok (utama), yang disebabkan oleh akibat sampingan dari suatu kebijaksanaan yang tidak dapat dihindari, merupakan akar kemiskinan dan akan mengakibatkan ketidakberdayaan penduduk lapisan masyarakat bawah, sehingga membawa pada gejala kemiskinan yang bersifat multidimensional. karena dalam kenyataannya berurusan juga dengan persoalan-persoalan non-ekonomi (sosial, budaya dan politik), dan juga adanya kebudayaan kemiskinan yang dimiliki oleh masyarakat miskin. Poli (1993) menyatakan, kemiskinan pertama-tama menampakkan dirinya melalui gejala-gejala yang kelihatan dan terukur seperti rendahnya pendapatan per kapita, tabungan, modal, produktivitas, tingkat kematian balita dan pendidikan.

Kajian definisi kemiskinan dapat pula dilihat dari beberapa sudut pandang. Menurut Badan Pusat Statistik (2000:145) kemiskinan didefinisikan sebagai pola konsumsi yang setara dengan beras 320 kg/kapita/tahun di pedesaan dan 480 kg/kapita/tahun di daerah perkotaan. Menurut hasil survey Susenas (1999), kemiskinan disetarakan dengan pengeluaran untuk bahan makanan dan non makanan sebesar Rp 89.845,-/kapita/bulan dan Rp 69.420,-/kapita/bulan.

Walaupun terdapat perbedaan, namun kajian tentang kemiskinan selalu terkait dan tidak dapat dipisahkan dengan pedesaan dan keterbelakangan. Kemiskinan terlihat dan rendahnya tingkat pendapatan, kurangnya konsumsi kalori yang diperlukan oleh tubuh manusia dan melebarinya kesenjangan antara si kaya dengan si miskin. Kemiskinan yang menimpa sekelompok masyarakat

berhubungan dengan status sosial ekonominya dan potensi wilayah. Faktor sosial ekonomi yaitu faktor yang berasal dari dalam diri masyarakat itu sendiri dan cenderung melekat pada dirinya seperti tingkat pendidikan dan keterampilan yang rendah, tingkat kesehatan yang rendah dan produktivitas yang rendah. Di sisi lain faktor yang berasal dari luar berhubungan dengan potensi alamiah, teknologi dan rendahnya aksesibilitas terhadap kelembagaan yang ada. Kedua faktor tersebut menentukan aksesibilitas masyarakat miskin dalam memanfaatkan peluang-peluang ekonomi dalam menunjang kehidupannya. Kemiskinan sesungguhnya merupakan suatu fenomena yang kuat mengait antara satu faktor dengan faktor yang lainnya. Oleh karena itu untuk mengkaji masalah kemiskinan harus diperhatikan jalinan antara faktor-faktor penyebab kemiskinan dan faktor-faktor yang berada di balik kemiskinan tersebut. Menurut Chambers (1987) dalam Listyaningsih (2004:10) dua dari lima faktor jebakan kekurangan adalah terisolasi dan ketidakberdayaan.

Todaro (1985:93) memperlihatkan jalinan antara kemiskinan dan keterbelakangan dengan beberapa aspek ekonomi dan aspek non ekonomi. Tiga komponen utama sebagai penyebab keterbelakangan dan kemiskinan masyarakat, faktor tersebut adalah (a) rendahnya taraf hidup; (b) rendahnya rasa percaya diri dan; (c) terbatasnya kebebasan, ketiga aspek tersebut memiliki hubungan secara timbal balik. Rendahnya taraf hidup disebabkan oleh rendahnya tingkat pendapatan, rendahnya pendapatan disebabkan oleh rendahnya produktivitas tenaga kerja, rendahnya produktivitas tenaga kerja disebabkan oleh tingginya pertumbuhan tenaga kerja, tingginya angka pengangguran, dan rendahnya investasi per kapita.

Tingginya angka pengangguran disebabkan oleh tingginya tingkat pertumbuhan tenaga kerja dan rendahnya investasi perkapita, dan tingginya tingkat pertumbuhan tenaga kerja disebabkan oleh penurunan tingkat kematian dan rendahnya investasi perkapita disebabkan oleh tingginya ketergantungan terhadap teknologi asing yang hemat tenaga kerja. Selanjutnya rendahnya tingkat pendapatan berpengaruh terhadap tingkat kesehatan, kesempatan pendidikan, pertumbuhan tenaga kerja dan investasi per kapita.

Richardo dan Malthus dalam Jhingaa (2002:88) menyatakan bahwa daya tampung bumi yang terbatas ini akhirnya tidak akan mampu menyangga tingkat pertumbuhan yang tinggi secara terus menerus tanpa menimbulkan malapetaka ekonomi dan sosial. Negara maju seperti Amerika Serikat, Negara-negara Eropa, Jepang dan Singapura yang menitikberatkan pada kualitas hidup bagi penduduknya pada kenyataannya terbentur pada upaya pelestarian lingkungan. Di negara miskin dan sedang berkembang dilema yang dirasakan adalah upaya melakukan pertumbuhan dan distribusi pendapatan yang tidak merata yang akhirnya menimbulkan kemiskinan.

2.4.3 Ukuran Kemiskinan

Pada studi ini yang dimaksud dengan kemiskinan adalah kemiskinan absolut, seseorang dikatakan miskin apabila tingkat pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan, sehingga pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Badan Pusat Statistik (BPS) membedakan ada dua kelompok yaitu penduduk miskin dan sangat miskin.

Menurut Dyson (1995:15), orang miskin adalah orang yang berpenghasilan kalau diwujudkan dalam bentuk beras sebesar 320 kg per orang pertahun. Jumlah tersebut dianggap dapat memenuhi kebutuhan limit untuk makan dan minum. Sedangkan orang yang sangat miskin adalah orang yang berpenghasilan hanya sekitar 240 kg - 320 kg beras per orang per hari. Berdasarkan kebutuhan beras per orang per tahun, ada tiga golongan orang miskin yaitu: Paling Miskin (PM), golongan Miskin Sekali (MS) dan golongan Miskin (M)

Gambaran di atas memperlihatkan adanya perbedaan garis kemiskinan antara daerah kota dengan daerah pedesaan. Nilai konsumsi minimum per kapita sebulan untuk daerah kota dua kali lebih besar dibandingkan dengan masyarakat yang hidup di daerah pedesaan untuk tahun 1996. Perbedaan ini disebabkan ragam kebutuhan penduduk pedesaan lebih sedikit dibandingkan dengan masyarakat kota. Selain itu masyarakat kota dalam memilih makanan cenderung yang berkualitas meskipun harganya lebih mahal dan sudah mulai beralih kegiatan kebutuhan bukan makanan, sedangkan masyarakat pedesaan masih berorientasi pada kebutuhan makanan untuk konsumsi sehari-hari.

Menurut Hasihuan (1997:9) ukuran kemiskinan yang disampaikan Sayogyo maupun Biro Pusat Statistik, lebih mempertimbangkan aspek ekonomi dan sosial. Namun demikian masalah ini dapat dikembangkan, kalau kemiskinan dilihat sebagai fenomena yang sifatnya struktural. Pendekatan ini melihat orang miskin secara tidak sama berdasarkan pola konsumsi untuk orang miskin di desa dengan di kota, dengan demikian ukuran kemiskinan dapat disesuaikan dengan

lingkungan. Menurut orang-orang miskin di desa, orang-orang miskin di kota tidak miskin. Mereka dimasukkan kegiatan dalam kategori miskin, sekedar untuk mengambil bagian masyarakat desa.

Menurut BPS (1997:36) kemiskinan adalah besarnya nilai rupiah yang dibelanjakan setiap orang sebulan untuk memenuhi kebutuhan minimum makanan dan bukan makanan. Patokan yang digunakan adalah 2100 kalori perhari, seperti yang dianjurkan Widyakarya Pangan dan Gizi (1998:12). Sedangkan pengeluaran minimum bukan makanan meliputi, pengeluaran untuk perumahan, sandang serta aneka barang dan jasa. Komponen pengeluaran bukan makanan dibedakan antara perkotaan dan pedesaan. Kriteria ini sudah digunakan sejak tahun 1976 dan terus diperbaharui seiring dengan semakin meningkatnya kebutuhan dan perubahan harga barang-barang konsumsi.

Kenaikan batas kemiskinan terjadi sejalan dengan kenaikan harga barang-barang yang dikonsumsi masyarakat. Dengan menggunakan standar yang sama yaitu 2100 kalori per kapita setiap hari untuk kebutuhan makan ditambah dengan kebutuhan bukan makanan, maka di tahun 1976 batas kemiskinan di daerah perkotaan adalah sebesar Rp 4.522,- per kapita sebulan, dan sebesar Rp 2.849,- untuk daerah pedesaan. Batasan ini pada tahun 1984 telah meningkat menjadi Rp 13.731,- untuk daerah perkotaan, dan Rp 7.746,- daerah pedesaan. Sedangkan pada tahun 1987 batas kemiskinan meningkat menjadi Rp 17.381,- per kapita sebulan untuk daerah perkotaan dan Rp 10.294,- untuk daerah pedesaan, atau meningkat sebesar 27 % untuk daerah perkotaan dan di daerah pedesaan naik sebesar 32 persen dibandingkan periode sebelumnya.

Tahun 1990 garis kemiskinan untuk daerah perkotaan telah mencapai nilai sebesar Rp 20.614,- per kapita sebulan dan untuk daerah pedesaan sebesar Rp 13.295,- per kapita sebulan. Tiga tahun kemudian, tepatnya tahun 1993 angka ini meningkat menjadi Rp 27.905,- per kapita sebulan untuk daerah perkotaan dan pedesaan sebesar Rp 18.244,- yang berarti terjadi peningkatan masing-masing 35,37 % dan 37,22 % dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan batas kemiskinan terus terjadi sampai dengan tahun 1996 telah mencapai angka sebesar Rp 38.246,- per kapita sebulan untuk perkotaan dan sebesar Rp 27.413,- per kapita sebulan untuk daerah pedesaan. Bila dibandingkan dengan tahun 1993 angka ini meningkat sebesar 11,4 % untuk daerah kota dan 14,5 untuk daerah pedesaan.

Sayogyo dalam Nugroho (1995:41) lebih cenderung menggunakan ukuran garis kemiskinan dengan pendekatan kemiskinan absolut. Cara yang dikembangkan adalah memperhitungkan standar kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok itu berupa kebutuhan makan termasuk minum, pakaian dan perumahan, dinilai dalam rupiah berdasar harga yang berlaku pada saat itu. Sedangkan menurut Bank Dunia bahwa ukuran kemiskinan, dinyatakan dengan konsep penduduk yang berpenghasilan rata-rata per hari US \$ 1,08. sehingga penghasilan per tahun adalah US \$ 388,80. Ini menggambarkan bahwa untuk Indonesia ukuran kemiskinan adalah yang berpenghasilan 27 kg ekuivalen beras per kapita per bulan untuk masyarakat pedesaan dan 40 kg beras per kapitas per bulan untuk daerah perkotaan (Murdijanto, 1994 :117)

Di Indonesia perkiraan tentang garis kemiskinan ini ditentukan melalui perhitungan kebutuhan minimum atau kebutuhan dasar. BPS menghitung atas dasar jumlah pengeluaran (proksi pendapatan) per kapita menetapkan angka kebutuhan minimum bagi makanan 2.100 kalori per hari ditambah dengan pengeluaran minimal untuk kebutuhan pokok lainnya seperti perumahan, pakaian, pendidikan, pemeliharaan kesehatan dan barang tahan lama. Kebutuhan minimum bukan makanan ini berbeda antara penduduk kota dan penduduk di daerah pedesaan.

Informasi kemiskinan ini perlu untuk masukan dalam penyusunan rencana bagi kelanjutan usaha pembangunan untuk memecahkan atau mengurangi jumlah dan presentase penduduk miskin. Selanjutnya dapat dicatat di sini bahwa selain patokan yang diajukan BPS tersebut di atas para ahli lainnya juga ada yang menunjukkan dasar perhitungan yang berbeda. Sebagai contoh, Sayogyo melakukan perhitungan kebutuhan pengeluaran minimum per kapita penduduk per tahun ekuivalen dengan sejumlah beras dalam ukuran kilogram. Sayogyo juga membedakan angka pengeluaran minimum penduduk kota dengan penduduk daerah pedesaan. Pengeluaran minimum penduduk kota diperkirakan oleh Sayogyo sekitar 50% lebih tinggi. Angka perhitungan Sayogyo adalah seperti terlihat pada tabel berikut

Tabel 2.1
GARIS KEMISKINAN (EKUIVALEN BERAS DALAM KILOGRAM)

Uraian	Kota (Kg Beras/tahun/kapita)	Desa (Kg beras/tahun/kapita)
Miskin	480	320
Miskin sekali	360	240
Paling miskin	270	180

Sumber : Triyanto (1990). Indikator Ekonomi, Dasar Perhitungan Perekonomian Indonesia. Hal 126

Perlu dicatat di sini bahwa angka perhitungan Sayogyo ini (ekuivalen beras) dapat berubah menurut waktu, terutama bila telah melewati tenggang waktu yang relatif lama, satu dan lainnya disebabkan oleh perubahan nilai tukar antara beras dan barang-barang kebutuhan lainnya, karena beras harganya dikontrol oleh pemerintah dengan ketat ditambah delapan kebutuhan pokok lainnya, sedangkan di lain pihak harga kebutuhan di luar sembilan bahan kebutuhan pokok hampir tidak dikontrol, yang mengakibatkan harga beras meningkat lebih lambat dibandingkan kebutuhan hidup lainnya. Sehingga pendapatan riil petani padi menurun yang pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa pendapatan setara beras menjadi tidak relevan lagi.

Selain ukuran kemiskinan ini masih ada lagi ukuran/konsep batas garis kemiskinan yang lain yaitu dari Sam F. Pali yang menyatakan bahwa garis kemiskinan di Indonesia bagi masyarakat pedesaan sama dengan 27 kg ekuivalen beras per kapita dan untuk masyarakat perkotaan sama dengan 40 kg beras per kapita per bulan (Zadjuli, 1997:27).

Menurut Emit Salim, (1994:13) orang miskin memiliki lima ciri, yaitu; pertama mereka umumnya tidak mempunyai faktor produksi sendiri, seperti tanah yang cukup, modal maupun keterampilan, oleh karena kemampuan memperoleh pendapatan menjadi sangat terbatas. Kedua, tidak memiliki kemungkinan memperoleh asset produksi dengan kekuatan sendiri, kemungkinan untuk dapat memperoleh kredit dari bank sangat kecil karena tidak memiliki benda yang dapat sebagai agunan. Ketiga, tingkat pendidikan yang rendah, waktunya habis dipakai untuk bekerja mencari penghasilan, pada usia sekolah mereka itu harus membantu

orang tua di sawah atau menjadi buruh tani. Keempat, kebanyakan tinggal dipedesaan yang serba terbatas fasilitasnya atau desa tempat tinggalnya terisolir. Kelima, mereka yang tinggal di kota, tidak mempunyai tempat tinggal yang layak dan juga tidak memiliki keterampilan, sehingga bekerja apa adanya.

Selanjutnya Emil Salim menyatakan (1994:42) kemiskinan sudah melekat dan hampir menyatu dengan masyarakat Peduduk atau masyarakat dikatakan miskin karena tidak memiliki aset produksi dan kemampuan untuk meningkatkan produktivitas. Aset produksi tidak mereka miliki karena mereka miskin, akibat mereka terjat dalam lingkaran kemiskinan tanpa ujung pangkalnya. Selain faktor aset, faktor demografis juga merupakan salah satu penyebab kemiskinan. Menurut Hagul, (1986) bahwa kemiskinan di pedesaan merupakan resultan dari beberapa faktor antara lain : pertumbuhan penduduk, rendahnya kualitas sumber daya manusia dan rendahnya produktivitas. Sedangkan menurut Pakpahan (1993:29) bahwa kemiskinan disebabkan oleh beberapa faktor antara lain; (1) sumber daya alam yang rendah, (2) teknologi dan unsur pendukung yang rendah, (3) sumber daya manusia yang rendah dan (4) sarana dan prasarana termasuk kelembagaan yang belum baik, (5) budaya miskin, mereka merasa sudah turun-temurun miskin.

2.4.4 Kemiskinan Alamiah

Secara umum kemiskinan alamiah adalah kemiskinan yang disebabkan oleh kualitas sumber daya alam dan sumberdaya manusia sehingga peluang untuk berproduksi relatif kecil ataupun jika kegiatan produksi dapat dilakukan pada umumnya dengan tingkat efisiensi yang relatif rendah. Di dalam lingkup pertanian

sumber daya alam paling utama yang mempengaruhi fenomena kemiskinan adalah kualitas lahan dan iklim. Pada umumnya kemiskinan alamiah terjadi pada wilayah dengan tanah Podsolik merah kuning (*ultisol*) dan tanah gambut (*histosol*). Walaupun curah hujan di wilayah ini relatif tinggi akan tetapi kemampuan masyarakat mengelola air relatif rendah sehingga kurang dapat dimanfaatkan.

Menurut hasil penelitian Institut Pertanian Bogor (Nasution, 1991) menyebutkan bahwa ciri-ciri utama kemiskinan alamiah adalah :

- 1) Teknologi pada umumnya tradisional dan merupakan upaya untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan. Sebagai ilustrasi, varietas-varietas tanaman yang digunakan pada umumnya mampu berproduksi dalam keadaan tanah kurang subur ataupun keadaan iklim yang kurang cocok akan tetapi jika dipupuk dengan dosis tertentu umumnya tanah dan tanaman akan tanggap. Kemampuan petani melindungi hasil pertanian lemah. Penggunaan insektisida relatif sedikit dan tidak berpola;
- 2) Jenis tanaman umumnya sedikit dan tidak diversifikasikan. Tanaman pangan umumnya merupakan tanaman utama;
- 3) Petani pada umumnya bersifat *inward looking* dan dengan cara yang seringkali ekstrem berusaha menghindari resiko. Walaupun tujuan produksi tidak semata-mata untuk subsisten, akan tetapi *marketable surplus* dan pasoknya tidak berpola. Biaya pengumpulan produksi tinggi, kekuatan monopoli pedagang perantara dan kelembagaan pemasaran kurang berkembang.

- 4) Solidaritas masyarakat pada umumnya kuat, kelembagaan yang mempertahankan stabilitas berkembang dan berpengaruh, sedang kelembagaan yang mendorong perubahan pada umumnya lemah dan seringkali dianggap sebagai unsur asing yang patut dicurigai;
- 5) Hak pemilikan dan penguasaan lahan sangat bersifat sosial. Batas-batas otonitas pemilikan dan penguasaan lahan sangat kabur dan tidak formal. Perdagangan lahan pada umumnya terbatas dan walaupun terjadi harga tanah ditentukan secara kelembagaan;
- 6) Sarana transportasi dan komunikasi pada umumnya sangat terbatas dan walaupun tersedia intensitas penggunaannya kecil;
- 7) Tingkat ekonomi umumnya rendah dan tidak beragam, persentase pendapatan yang digunakan untuk membeli bahan makanan pada umumnya lebih dari 70 % serta konsumsi sangat rendah;
- 8) Distribusi pendapatan antar keluarga relatif merata. Gini ratio pada umumnya berkisar antara 2,0 - 3,0;
- 9) Kepadatan agraris pada umumnya rendah berhubung daya dukung lahan yang lemah;
- 10) Pada umumnya wilayah ini mengalami *backward process* yaitu perpindahan sumber daya berkualitas tinggi ke luar daerah.

Ciri-ciri utama yang telah diuraikan tidak mesti seluruhnya dimiliki oleh suatu wilayah, akan tetapi pada umumnya sebagian besar dari ciri-ciri tersebut sangat menonjol.

2.4.5 Kemiskinan Struktural

Secara umum kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh tatanan kelembagaan. Dalam hal ini yang dimaksudkan dengan kelembagaan adalah pengertian yang paling luas yaitu tidak hanya menyangkut tatanan organisasi tetapi juga mencakup aturan permainan yang diterapkan. Seperti yang didefinisikan oleh Schmid (1993) sebagai berikut : *"Institutions are set of ordered relationship among people which define their rights, exposure, to the rights of others, privileges, and responsibilities"*. Dengan demikian kelembagaan merupakan sistem organisasi dan kontrol masyarakat terhadap sumberdaya melalui aturan main yang harus ditaati oleh anggota masyarakat. Aturan main yang tidak fair serta saling merugikan atau merugikan pihak tertentu tersebut bisa mengakibatkan kemiskinan. Kemiskinan jenis ini biasa disebut kemiskinan struktural.

Kemiskinan struktural sebagai masalah mempunyai beberapa hirarki. Pada hirarki yang paling tinggi kemiskinan struktural disebabkan oleh adanya ketimpangan di dalam struktur perekonomian nasional. Seperti diketahui semenjak tahun tujuh puluhan perekonomian, Indonesia telah mengalami transformasi struktural. Hal ini dicirikan oleh penurunan pangsa relatif sektor pertanian pada PDB. Pada akhir tahun 1960-an pangsa relatif sektor pertanian mencapai kira-kira 43 persen dari PDB nasional. Dewasa ini pangsa relatif sektor tersebut menurun menjadi 19 persen. Sebaliknya penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian tahun 1960-an lebih dari 73 persen sedang akhir tahun 1990-an menjadi 53 persen. Data tersebut menunjukkan penurunan pangsa relatif sektor

pertanian pada PDB lebih cepat dibandingkan dalam penyerapan tenaga kerja. Hal ini berarti distribusi pendapatan tenaga kerja relatif terhadap pendapatan sektor non pertanian semakin memburuk.

Berdasarkan data PDRB provinsi menunjukkan bahwa proses transformasi struktural di Jawa dan pulau Sumatera pada umumnya lebih seimbang dibandingkan terjadinya transformasi di pulau-pulau lain.

Data transformasi struktural yang telah dikemukakan diatas menunjukkan adanya penyumbatan pengaliran tenaga kerja yang selayaknya keluar dari sektor pertanian ke sektor sekunder (*industry manufacturing*) dan sektor tersier (jasa) formal. Penyumbatan tersebut antara lain disebabkan oleh :

- 1) Walaupun sektor industri tumbuh relatif cepat (kira-kira 9-11 persen per tahun pada kurun waktu 1980-1990) akan tetapi karena pangsa relatif relatif sektor ini pada PDB kecil, maka pertumbuhan tersebut absolut kecil;
- 2) Investasi di sektor industri relatif padat modal;
- 3) Industri pertanian relatif berkembang lambat;
- 4) Kaitan sektor pertanian dengan sektor sekunder lemah;
- 5) Industri terpusat di Jawa terutama di JABOTABEK, Surabaya dan Semarang.

Di lain pihak penyumbatan pengaliran tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor jasa formal antara lain disebabkan oleh :

- 1) Kurangnya kaitan antara sektor pertanian dengan sektor jasa formal.
- 2) Sektor jasa formal terutama untuk memenuhi permintaan golongan menengah ke atas yang jumlahnya meningkat sejak tahun tujuh puluhan

Dengan demikian bagi sebagian besar tenaga kerja yang segyanya keluar dari sektor pertanian tersedia hanya dua alternatif utama yaitu tetap bekerja di sektor pertanian atau memasuki sektor jasa informal.

Tidak mengalmnya tenaga kerja ke luar sektor pertanian menimbulkan berbagai dampak negatif, yaitu antara lain :

- 1) Sebagian atau mungkin sebagian besar sistem produksi pertanian terutama di pulau Jawa telah mengalami *diminishing return* untuk penggunaan tenaga kerja. Akibatnya produktivitas marginal tenaga kerja tersebut sangat rendah, bahkan di beberapa tempat telah mendekati nol.
- 2) Terjadinya fragmentasi pemilikan-penguasaan lahan Sebagai contoh hasil penelitian IPB (1997:29) menyebutkan bahwa jika pemilikan lahan suatu keluarga 0,3 Ha atau kurang lebih rasional bagi keluarga tersebut menjadi buruh tani dibandingkan mengusahakan lahan pertaniannya.
- 3) Rendahnya produktivitas dan pendapatan rata-rata di sektor pertanian menyebabkan permintaan domestik agregat dari sektor pertanian kepada produk-produk sektor industri relatif kecil. Hal ini menyebabkan insentif untuk mengembangkan industri yang bertujuan untuk memenuhi permintaan domestik menjadi kurang

Kurangnya insentif mengembangkan industri domestik memperkuat penyumbatan pengaliran tenaga kerja ke luar sektor pertanian. Keseluruhan dampak negatif yang telah diuraikan diatas potensial menumbuhkan kemiskinan struktural terutama di pulau Jawa.

Alternatif lain yang tersedia bagi tenaga kerja yang keluar dari sektor pertanian adalah memasuki sektor jasa informal. Sektor ini dikenal sebagai katub pengaman pencegahan pengangguran karena mempunyai elastisitas permintaan tenaga kerja yang relatif besar. Besarnya elastisitas permintaan tenaga kerja sektor jasa informal antara lain disebabkan oleh :

- 1) Modal yang dibutuhkan relatif kecil;
- 2) Struktur organisasi sangat fleksibel dan informal;
- 3) Seringkali tidak membutuhkan keterampilan khusus;
- 4) Persaingan relatif tidak tajam karena tidak adanya pembakuan produk;
- 5) Tidak membutuhkan disiplin yang ketat, dan
- 6) Solidaritas kelembagaan pada umumnya kuat sehingga penyingkiran (*alienation*) tenaga kerja relatif kecil.

Walaupun sektor jasa informal mempunyai sifat-sifat yang menguntungkan, akan tetapi produktivitas tenaga kerja di sektor ini relatif rendah. Disamping itu kendati perputaran uang di sektor ini relatif cepat akan tetapi margin transaksi umumnya kecil, sehingga sering disebut bahwa sektor ini efektif mendistribusikan kemiskinan. Berbagai upaya untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja di sektor informal ini seringkali mengurangi kemampuan sektor ini menyerap tenaga kerja. Pengurangan tersebut terutama terjadi pada wilayah-wilayah perkotaan yang sedang tumbuh dengan cepat.

Kemiskinan absolut dari relatif adalah konsep kemiskinan yang mengacu pada kepemilikan materi dikaitkan dengan standar kelayakan hidup seseorang/keluarga. Kedua istilah itu menunjuk pada perbedaan sosial (*social distinction*)

yang ada dalam masyarakat berangkat dari distribusi pendapatan. Perbedaannya adalah bahwa pada kemiskinan absolut ukurannya sudah terlebih dahulu ditentukan dengan angka-angka nyata dan atau indikator atau kriteria yang digunakan, sementara pada kemiskinan relatif, kategorisasi kemiskinan ditentukan berdasarkan perbandingan relatif tingkat kesejahteraan antar penduduk.

Kemiskinan absolut. Secara sederhana kemiskinan absolut adalah derajat kepemilikan materi atau standar kelayakan hidup orang atau keluarga yang berada di garis atau di bawah garis subsistem. Indikatornya sangat terukur, di mana ada standar kehidupan yang dikategorikan secara berjenjang, yakni di bawah garis kemiskinan, pada garis kemiskinan, dan di atas garis kemiskinan. Dengan kata lain, kemiskinan absolut adalah suatu kondisi di mana tingkat pendapatan seseorang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, seperti pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan (Sayogyo, 1988). Rendahnya tingkat pendapatan ini terutama disebabkan oleh keterbatasan sarana dan prasarana fisik dan kelangkaan modal atau miskin karena sebab alami (Sayogya, 1988)

Kemiskinan absolut diukur dengan menggunakan garis kemiskinan yang konstan sepanjang waktu yang biasanya berupa jumlah atau nilai pendapatan dalam unit uang. Namun ukuran bisa pula berbentuk jumlah konsumsi kalori atau lainnya, yang memungkinkan adanya perbedaan jumlah atau nilai perbedaan pendapatan dalam unit uang. Parameter ini merupakan ukuran yang tetap. Kriteria pengukuran seperti itu diperoleh dari pendekatan yang digunakan, yaitu pendekatan biologis dan pendekatan kebutuhan dasar

Pendekatan biologis yang diajukan Rowntree (Rowntree dan Lavers, 1951) mendefinisikan suatu keluarga dalam "kemiskinan primer" apabila pendapatan total mereka tidak dapat menutupi kebutuhan-kebutuhan minimum, yaitu untuk memelihara 'efisiensi fisik' guna kelangsungan hidup (*survival*) mereka. Pendekatan biologis ini merupakan ciri studi-studi rintisan tentang kemiskinan dengan tekanan pada masalah kelaparan. Maka dari itu analisis kemiskinan ditekankan pada perhitungan pendapatan minimum. Garis kemiskinan ditetapkan menurut komposisi keluarga dan penentuan tingkat kemiskinan didasarkan pada kebutuhan nutrisi (*diet*) minimum yang meliputi kalori, protein dan lemak (sen, 1981).

Identifikasi dilakukan melalui spesifikasi kebutuhan dasar atau kebutuhan minimum, dan ketidakmampuan memenuhi kebutuhan itu dianggap sebagai tes kemiskinan. Ada sejumlah keberatan terhadap pendekatan biologis. **Pertama**, karena ada variasi penting yang berhubungan dengan sifat-sifat fisik, kondisi iklim, dan kebiasaan kerja. Keberatan pertama ini menunjuk pula pada kesulitan menentukan kebutuhan nutrisi minimum (selanjutnya disebut kebutuhan minimum) karena kebutuhan tersebut bersifat arbitrer menurut variasi kelompok masyarakat dan wilayah. **Kedua**, ada juga kesulitan menterjemahkan kebutuhan nutrisi (*gizi*) minimum ke dalam kebutuhan bahan pangan minimum karena hal ini tergantung pada pemilihan komoditi. **Ketiga**, kebutuhan-kebutuhan bukan bahan pangan tidak mudah untuk ditentukan.

Selain pendekatan biologis, dikenal pula pendekatan kebutuhan dasar (*basic needs*). Pendekatan kebutuhan dasar sebenarnya merupakan perluasan

pendekatan biologis. Dalam pendekatan ini, konsep kemiskinan tidak saja mencakup (kebutuhan diet minimum), tetapi ditambah pula dengan kebutuhan non-pangan. Konsep kebutuhan dasar ini mencakup kebutuhan konsumsi minimum suatu keluarga, yaitu pangan, perumahan (papan), dan pakaian yang memadai. Di samping itu, konsep tersebut mencakup pula layanan-layanan (*services*) esensial yang disediakan untuk masyarakat luas, seperti air bersih, sanitasi, transportasi umum, fasilitas kesehatan dan pendidikan

Konsep kebutuhan dasar cenderung memposisikan rakyat sebagai obyek yang dependen terhadap negara. Otonomi rakyat atas hak-hak dasar yang secara intrinsik mereka miliki diabaikan oleh pendekatan ini. Sekarang muncul pendekatan yang lebih baru, yaitu pendekatan hak-hak manusia (*human rights*). Dalam pendekatan ini, rakyat memiliki hak-hak dasar kemanusiaan yang tidak boleh dilanggar. Rakyat memiliki otonomi atas hak yang melekat kepadanya dan memperjuangkan terpenuhinya hak-hak tersebut. Di sisi lain, negara berkewajiban untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak tersebut.

Kemiskinan relatif. Berbeda dengan kemiskinan absolut, kemiskinan relatif pada dasarnya menunjuk pada perbedaan relatif tingkat kesejahteraan antar kelompok masyarakat. Mereka yang berada di lapis terbawah dalam persentil derajat kemiskinan suatu masyarakat digolongkan sebagai penduduk miskin. Dengan kategorisasi seperti ini, dapat saja mereka yang digolongkan sebagai miskin sebenarnya sudah dapat mencukupi hak-hak dasarnya, namun tingkat keterpenuhannya berada di lapisan terbawah.

Kemiskinan relatif memahami kemiskinan dari dimensi ketimpangan antar kelompok penduduk. Pendekatan ketimpangan tidak berfokus pada pengukuran garis kemiskinan, tetapi pada besarnya perbedaan antara 20 atau 10 persen masyarakat paling bawah dengan 80 atau 90 persen masyarakat lainnya. Kajian yang berorientasi pada pendekatan ketimpangan tertuju pada upaya memperkecil perbedaan antara mereka yang berada di bawah (miskin) dan mereka yang makmur (*better-off*) dalam setiap dimensi stratifikasi dan deferensiasi sosial. Ketimpangan merupakan suatu permasalahan yang berbeda dengan kemiskinan. Para ahli sosiologi pada hakikatnya lebih tertarik pada isu ketimpangan. Misalnya mereka lebih tertarik pada kelompok masyarakat pada spektrum pendapatan 5 persen atau 10 persen paling bawah dalam hirarki pendapatan. Dalam pendekatan ini persentase orang yang relatif miskin cenderung konstan walaupun kondisi ekonomi berubah.

Derajat Kemiskinan: Potensial, Sementara dan Kronis

Kondisi kemiskinan dapat berlangsung dalam beberapa derajat dari tingkat yang paling ringan ke tingkat yang lebih parah. Situasi paling ringan disebut sebagai kemiskinan potensial (*potential poor*), atau hampir miskin (*near poor*). Sementara itu orang yang tengah mengalami kemiskinan bisa dua macam : *pertama*, mereka mengalami kemiskinan untuk sementara waktu karena kondisi eksternal yang membawanya ke situasi seperti itu, disebut kemiskinan sementara; atau *kedua*, mereka mengalami untuk waktu yang lama dan sulit diubah ke tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi, disebut kemiskinan kronis.

Kemiskinan potensial (potential poor). Orang mungkin belum berada pada situasi miskin, paling tidak karena pendapatannya berada di atas garis kemiskinan, sehingga sedikit guncangan eksternal dapat membuat mereka kehilangan pekerjaan atau berkurang perolehan pendapatannya sehingga jatuh dalam situasi kemiskinan yang lebih buruk. Orang yang berada pada situasi pendapatan seperti ini disebut sebagai hampir miskin jika memiliki latar belakang pendidikan yang rendah, ketrampilan kerja yang terbatas, atau kemampuan inovasi atau produksi yang juga terbatas. Potensi menjadi miskin bisa juga berasal dari faktor-faktor eksternal, seperti tempat tinggal yang rentan terhadap bencana alam (banjir badai, tsunami, badai tsunami dan sebagainya). Tatanan sosial yang rusak sehingga rentan mengalami konflik horisontal juga dapat menjadi potensi untuk terjadinya kemiskinan yang lebih buruk.

Perubahan dan kebijakan politik dan ekonomi yang bisa mengguncang kemampuan dan sekaligus berpengaruh pada menurunnya atau bahkan hilangnya pekerjaan (PHK, bangkrut, menurunnya produksi dan pendapatan, dsb), kebijakan perusahaan dalam hubungan-hubungan kerja kontraktual yang tidak setara, bencana alam yang datangnya tak diduga-duga dan secara langsung menghilangkan pekerjaannya, konflik sosial politik, dan kondisi kesehatan manusia yang semakin menurun, di tengah tidak adanya jaminan sosial yang memadai bagi keberlangsungan kehidupan seseorang/ keluarga, menjadi faktor-faktor krusial yang membuat seseorang atau keluarga rentan terhadap kemiskinan. Faktor-faktor itu tentu saja ada yang sejak awal bisa diduga (penurunan kinerja perusahaan tempat seseorang menggantungkan hidupnya), namun ada juga yang

datang tiba-tiba tanpa memberi kesempatan kepada yang bersangkutan untuk membuat persiapan (bencana alam, perang).

Krisis ekonomi yang berkepanjangan berakibat buruk pada ketersediaan lapangan kerja, dan hal demikian pada gilirannya menciptakan kerentanan penduduk untuk menjadi miskin. Demikian juga tidak adanya jaminan sosial yang memadai atau adanya sistem kontrak kerja yang ditentukan sepihak oleh pemilik lapangan kerja/ pemilik modal di mana pekerja tak memiliki posisi tawar yang setara dihadapan majikannya (atau dengan kata lain tetap berlangsung pola hubungan buruh majikan yang tidak setara sehingga setiap saat buruh terancam di-PHK), juga dapat menjadikan banyak orang rentan jatuh miskin.

Kemiskinan sementara (*transient poverty*), adalah kemiskinan yang terjadi hanya untuk waktu yang relatif sementara. Kemiskinan ini dialami oleh orang (keluarga) yang sebelumnya tidak miskin, tetapi karena kondisi eksternal tertentu (perang, konflik horisontal dalam masyarakat, bencana alam, kecelakaan dan sebagainya), orang atau keluarga tersebut jatuh ke dalam kemiskinan. Mereka yang mengalami kemiskinan sementara ini mungkin mempunyai latar belakang pendidikan dan ketrampilan yang cukup memadai, atau memiliki etos kerja dan daya inovasi yang tinggi. Orang atau keluarga seperti itu dengan mudah dapat terbebas dari situasi miskin jika kondisi eksternal berubah ke arah yang lebih positif.

Kemiskinan kronis (*chronic poverty*) Kemiskinan dapat berlangsung secara terus-menerus, atau lebih bersifat permanen. Di sini orang lahir dari keluarga miskin, hidup di masyarakat miskin, mungkin dengan kultur kemiskinan (*fatalisme*), atau tinggal di tempat yang tidak menguntungkan (tanah tandus,

miskin sumber daya alam, terisolasi secara spasial), sehingga sedikit kesempatan tersedia baginya untuk meningkatkan kualitas hidup. Kemiskinan kronis dapat diperparah oleh kebijakan negara yang tidak berpihak kepada masyarakat miskin atau daerah tertinggal, atau oleh sistem pasar yang tidak memberi ruang bagi mereka untuk masuk sebagai tenaga kerja atau untuk menjual produk-produk mereka karena tidak bisa bersaing dengan produk-produk lain di pasar bebas

2.4.6 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan

Bila membicarakan masalah kemiskinan, maka yang menjadi pusat perhatian adalah rendahnya tingkat pendapatan, kurangnya konsumsi kalori yang diperlukan oleh tubuh manusia dan melebarnya kesenjangan antara si kaya dengan si miskin. Kemiskinan yang menimpa sekelompok masyarakat berhubungan dengan status sosial ekonomi dan potensi wilayahnya dikategorikan di dalam faktor sosial ekonomi antara lain beberapa faktor yang berasal dari dalam diri masyarakat sendiri dan cenderung melekat pada dirinya seperti tingkat pendidikan dan keterampilan yang rendah, tingkat kesehatan yang rendah dan produktivitas yang rendah. Yang dimaksud dengan potensi wilayah adalah faktor-faktor yang berasal dari luar seperti potensi alamiah, teknologi dan lain-lain. Kedua faktor tersebut menentukan aksesibilitas masyarakat miskin dalam memanfaatkan peluang-peluang ekonomi dalam menunjang kehidupannya. Kemiskinan sesungguhnya merupakan suatu fenomena yang kait-mengkait antara beberapa faktor yang mempengaruhi kemiskinan tersebut. Oleh karena itu untuk mengkaji masalah kemiskinan harus diperhatikan jalinan antara beberapa faktor penyebab kemiskinan dan beberapa faktor yang berada di balik kemiskinan tersebut (Todaro, 1998:51).

Tinggi rendahnya tingkat kemiskinan di suatu negara tergantung pada 2 (dua) faktor utama yaitu 1) Tingkat pendapatan nasional rata-rata dan 2) Lebar sempitnya kesenjangan dalam distribusi pendapatan. Setinggi apapun tingkat pendapatan nasional per kapita yang dicapai oleh suatu negara, selama distribusi pendapatan yang tidak merata maka tingkat kemiskinan di negara tersebut pasti akan tetap parah.

Menurut Ginanjar (1996 : 240) ada 4 faktor penyebab kemiskinan, faktor-faktor tersebut antara lain .

- a. Rendahnya taraf pendidikan.
- b. Rendahnya taraf kesehatan.
- c. Terbatasnya lapangan kerja.
- d. Kondisi keterisolasian.

Menurut Sahm (1994:40) bahwa kemiskinan tersebut melekat pada diri penduduk miskin, mereka miskin karena tidak memiliki asset produksi dan kemampuan untuk meningkatkan produktivitas. Mereka tidak memiliki asset produksi karena mereka miskin, akibatnya mereka terjat dalam lingkaran kemiskinan tanpa ujung dan pangkal.

Pendapat Hadiwegono dan Pakpahan (1993:25) bahwa kemiskinan disebabkan oleh beberapa faktor antara lain :

- a. Sumber daya alam yang rendah.
- b. Teknologi dan unsur penduduknya yang rendah.
- c. Sumber daya manusia yang rendah.
- d. Sarana dan prasarana termasuk kelembagaan yang belum baik.

Rendahnya beberapa faktor di atas menyebabkan rendahnya aktivitas ekonomi yang dapat dilakukan oleh masyarakat. Dengan rendahnya aktivitas ekonomi yang dapat dilakukan berakibat pada rendahnya produktivitas dan pendapatan yang diterima yang pada gilirannya pendapatan tersebut tidak mampu memenuhi kebutuhan fisik minimum yang menyebabkan terjadinya proses kemiskinan.

2.4.7 Sebab-Sebab Kemiskinan

Menurut Todaro (1998:7) bahwa keterbelakangan penduduk negara berkembang terutama disebabkan karena tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi dan penyerapan tenaga kerja rendah yang rendah. Kedua hal tersebut menyebabkan produktivitas tenaga kerja yang rendah. Oleh karena produktivitasnya rendah maka pendapatan yang rendah, hal ini mengakibatkan rendahnya tingkat hidup.

Tingkat hidup yang rendah itu ditandai dengan (1) kemiskinan, (2) kesehatan yang tidak memadai, (3) pendidikan dan layanan masyarakat yang rendah. Hal tersebut berakibat pada (1) penghargaan diri yang rendah dan (2) kebebasan yang terbatas. Antara keduanya terjadi interaksi, sehingga berakibat pada sikap malas dan keadaan yang menghambat perkembangan.

Menurut Todaro (dalam Partadiredja, 1996:15) dalam forum-forum perundingan internasional seperti dialog Utara-Selatan, kelompok negara miskin atau kelompok negara Dunia Ketiga berbeda kemiskinannya atau keterbelakangannya karena beberapa faktor yaitu . (1) Perbedaan geografis, penduduk dan pendapatan (2) Perbedaan sejarah; sebagian dijajah oleh negara

yang berlainan (3) Perbedaan sumber alam dan manusia (4) Perbedaan peranan sektor swasta dan negara (5) Perbedaan struktur perindustriannya (6) Perbedaan derajat ketergantungannya pada kekuatan ekonomi dan politik negara lain, dan 7) Perbedaan pembagian kekuasaan, struktur politik dan kelembagaan dalam negeri.

Sementara pendapat yang lain melihat munculnya kemiskinan dalam suatu masyarakat berkaitan dengan lemahnya budaya, yaitu nilai yang hidup dalam suatu masyarakat. Koentjaraningrat (1997) mengatakan, ada 5 konsep nilai budaya yang cocok untuk pembangunan di Indonesia, agar bangsa Indonesia bangkit dari kemiskinannya yang meliputi : (1) Nilai hidup dipandang tinggi dan selalu bersikap aktif bukan sebaliknya pasrah dengan nasib dan bersikap pasif (2) Nilai hasil karya atau kerja tinggi, bukan hanya dilihat dari segi jumlah yang sesuai target akan tetapi juga dari segi mutu yang tinggi (3) Nilai menguasai alam dengan syarat terlebih dahulu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi (4) Nilai masa depan yakni masa depan harus lebih baik dari masa sekarang. Dalam pembangunan, suatu orientasi ke masa yang akan datang itu perlu, karena suatu sikap mental itu merupakan pangkal dari keinginan untuk menabung. Suatu nilai budaya yang berorientasi ke masa depan juga mendorong orang untuk merencanakan hidupnya sebaik mungkin untuk masa kehidupan yang akan datang (5) Nilai kerjasama yakni setiap individu dapat bekerja sama dengan orang lain, setiap individu diberi kesempatan untuk mengembangkan dirinya serta setiap individu punya rasa tanggung jawab masing-masing sesuai perannya dalam suatu kerjasama.

Selanjutnya Todaro (1998) menunjukkan adanya jalinan antara kemiskinan dan keterbelakangan dengan beberapa aspek ekonomi dan aspek non ekonomi. Ada tiga komponen utama sebagai penyebab kemiskinan masyarakat yaitu (1) rendahnya taraf hidup, (2) rendahnya percaya diri dan (3) terbatasnya kebebasan. Ketiganya memiliki hubungan timbal balik.

Mengikuti kajian teori yang disampaikan sebelumnya di mana kemiskinan memiliki banyak faset, oleh karena itu, penelitian ini tidak mungkin dapat menggambarkan kehidupan rumah tangga miskin melalui suatu indikator tunggal, karena pilar utama kajian kemiskinan paling tidak didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan: (1) budaya, (2) ekonomi, dan (3) Struktural.

Menurut tesis budaya kemiskinan, penduduk miskin hidup miskin oleh karena, dari perspektif mereka, adalah lebih mudah untuk hidup tanpa pendapatan daripada harus bekerja keras untuk memperolehnya, Sackery, (1973:25). Kata kunci dalam penjelasan fenomena kemiskinan berada dalam konsep sub kebudayaan kemiskinan yang dianut oleh penduduk miskin.

Dari perspektif ekonomi, para ahli ekonomi mengembangkan konsep tentang kemiskinan dan diskriminasi yang mengantarkan bagaimana fenomena kemiskinan dapat dijelaskan melalui kategori-kategori atau proposisi-proposisi ekonomi. Ahli ekonomi umumnya memulai analisis dengan mengemukakan teori ekonomi tentang "*marginal product*" yang di dalam esensinya menjelaskan bagaimana aliran pendapatan kepada seseorang ditentukan oleh tingkat produktivitasnya di dalam pasar tenaga kerja. Oleh karena tingkat produktivitas tenaga kerja pada gilirannya ditentukan oleh mutu "*human capital*" yang dimiliki oleh seorang pekerja, terutama melalui pendidikan dan pelatihan.

Dari perspektif struktural sesungguhnya tidak menolak argumen kedua perspektif teori yang sebelumnya namun lebih menekankan pada kemiskinan sebagai hasil dari operasi atau fungsi yang normal dari lembaga-lembaga yang ada dalam sistem masyarakat. Fenomena kemiskinan harus ditemukan dalam analisis tentang kelas sosial, peranan negara dan bagaimana pasar tenaga kerja bekerja.

Pola pikir Todaro tentang keterbelakangan masyarakat yang dapat menggambarkan terjadinya kemiskinan digambarkan pada Gambar 2.1, tingkat hidup yang rendah yang mencerminkan kemiskinan, disebabkan karena pendapatan yang rendah. Pendapatan yang rendah disebabkan oleh produktivitas yang rendah, tingkat gizi dan kesehatan yang rendah serta kesempatan pendidikan yang terbatas. Pendapatan yang rendah berakibat pula pada penghargaan diri yang rendah (martabat, rasa hormat dan pengakuannya). Hal ini juga mengakibatkan kebebasan yang terbatas, kebebasan untuk menggunakan teknologi, bantuan dari anggota masyarakat lainnya dan pendidikan

2.4.7.1 Teori Anne Booth (1996)

Anne Booth and Firdausy (1996 : 7) dalam papernya yang berjudul "Effect of Price and Market Reform on the Poverty Situation of Rural Communities and Firm Families" menyatakan bahwa penyebab dari kemiskinan adalah keterbatasan penduduk di dalam mengakses pasar produk, fasilitas publik dan fasilitas kredit. Selanjutnya Booth menyatakan keterbatasan ini dipengaruhi oleh (1) faktor ekonomi, (2) faktor sosial budaya, (3) faktor geografi dan lingkungan dan (4) faktor personal dan fisik

Hubungan tersebut dapat dilihat pada Gambar 2.2. Gambar tersebut menunjukkan bahwa kerangka pemikiran tersebut bahwa kemiskinan bukan dipengaruhi oleh faktor ekonomi semata tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial budaya, faktor geografi dan lingkungan, juga faktor personal dan fisik.



Sumber Booth, Anne and Firdausy (1996) Effect of Price and Market Reform on the Poverty Situation of Rural Communities and Firm Families. New York Economic and Sosial Commision for Asia and Pacific

Gambar 2.2 : Beberapa Faktor Utama Yang Mempengaruhi Kemiskinan Pedesaan

Faktor ekonomi yang berupa kurangnya modal dan rendahnya teknologi yang dimiliki ditambah dengan keterbatasan masyarakat dalam mengakses fasilitas publik, pasar produk dan fasilitas kredit yang disediakan pemerintah akan menyebabkan kemiskinan. Faktor sosial budaya yang berupa rendahnya keterampilan, pendidikan, tidak adanya kesempatan kerja dan budaya miskin merupakan penyebab kemiskinan. Faktor alam dan lingkungan yang terdiri dari keterbatasan sumberdaya alam, penyakit dan tanah yang kering yang diikuti oleh keterbatasan kemampuan mengakses fasilitas yang tersedia mendorong pula terjadinya kemiskinan. Akhirnya Anne Booth menyatakan faktor fisik perorangan seperti umur, jenis kelamin dan tingkat kesehatan sangat berpengaruh pada terjadinya kemiskinan.

Studi ini menggunakan teori dari Anne Booth dengan asumsi bahwa faktor-faktor yang menjadi penyebab kemiskinan di Kabupaten Buru diyakini dipengaruhi oleh faktor-faktor yang menjadi penyebab kemiskinan dalam teori Anne Booth. Selain itu, studi ini juga akan memperkuat keyakinan akan faktor-faktor apa saja dari teori Anne Booth yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap terjadinya kemiskinan.

2.4.7.2 Teori Jhingan M. I.

Menurut Jhingan (2002) pertumbuhan penduduk yang pesat pada suatu negara menyebabkan terjadinya kemiskinan, oleh karenanya pertumbuhan penduduk benar-benar dianggap sebagai hambatan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan penduduk yang cepat memperberat tekanan pada lahan serta menyebabkan pengangguran. Hal ini akhirnya memicu pada kemiskinan. Oleh

karena itu penambahan penduduk harus dikurangi sehingga kemiskinan dapat dikurangi pula, karena beban keluarga juga berkembang.

Beban tanggungan keluarga akibat dari jumlah anak yang banyak menimbulkan masalah pada penyediaan bahan pangan, perumahan, peralatan rumah tangga, peralatan modal, pendidikan dan kesehatan. Akibat selanjutnya akan menyebabkan pendapatan perkapita yang rendah sehingga standar hidup juga rendah. Pada keluarga besar, tanggungan keluarga bukan hanya dari jumlah anak yang banyak saja, tetapi juga dari orang tua dan saudara dekatnya

Teori Jhingan ini didukung oleh Collin Clark (Jhingan, 2002:406) yang menyatakan bahwa penduduk yang besar membawa kesulitan ekonomi bagi masyarakat yang hidup dengan metode tradisional. Jumlah penduduk yang besar yang tercermin pada besar penduduk pada setiap keluarga akan menyebabkan pendapatan perkapita yang rendah, apabila tidak diikuti oleh akumulasi modal yang dimiliki oleh setiap anggota masyarakat.

Oleh karenanya Jhingan memaparkan dan memberikan rekomendasi kepada negara terbelakang bahwa untuk mengentas kemiskinan, hal yang perlu segera diatasi adalah memperlambat laju pertumbuhan penduduk dan bantuan modal serta bimbingan untuk menguasai teknologi

2.4.7.3 Teori Samuelson

Menurut Samuelson (1997 : 436) bahwa penyebab dari terjadinya penduduk miskin di negara yang berpenghasilan rendah adalah karena dua hal pokok yaitu (1) Rendahnya tingkat kesehatan dan gizi, (2) lambatnya perbaikan mutu pendidikan sehingga menyebabkan rendahnya tingkat pendidikan penduduk.

Kedua hal tersebut terjadi karena rendahnya tingkat pendapatan penduduk, yang hal tersebut menyebabkan kualitas penduduknya rendah.

Oleh karena itu upaya pertama yang dilakukan oleh pemerintah adalah (1) melakukan pemberantasan penyakit, (2) perbaikan kesehatan dan gizi, (3) perbaikan mutu pendidikan, (4) pemberantasan buta huruf dan (5) peningkatan keterampilan penduduknya. Keempat hal itu adalah suatu upaya untuk memperbaiki kualitas sumber daya manusia (SDM).

Apabila hal-hal tersebut dapat dilakukan dengan segera maka penduduk dapat menggunakan modal dengan lebih efektif, menyerap teknologi baru dan belajar dari kesalahannya. Apabila ini ditunjang dengan penyediaan fasilitas umum yang memadai maka akan segera dapat mengentas kemiskinan. Oleh karena itu tingkat pendidikan (termasuk keterampilan), tingkat kesehatan yang rendah dan terbatasnya fasilitas umum merupakan penyebab dari adanya kemiskinan.

2.5 Kebijakan Pengentasan Kemiskinan

Kelemahan mendasar dalam kebijakan ekonomi Indonesia selama ini adalah diterapkannya pola pemikiran deduktif yaitu penyamarataan semua bidang atau daerah berdasarkan teori umum. Di Indonesia sektor pertanian mempunyai kontribusi yang besar dalam perekonomian (*comparative advantage*) sebagai negara agraris.

Keunggulan komparatif tersebut merupakan fundamental perekonomian yang perlu di dayagunakan melalui pembangunan ekonomi sehingga menjadi keunggulan bersaing (*competitive advantage*). Meskipun Indonesia berhasil

menjadi salah satu produsen terbesar pada beberapa komoditas pertanian dunia, tetapi Indonesia belum memiliki kemampuan bersaing di pasar internasional. Selain itu nilai tambah yang dinikmati rakyat Indonesia dan kemanfaatan keunggulan komparatif tersebut masih relatif kecil, sehingga tingkat pendapatan rakyat masih tetap rendah.

Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa kemiskinan di Indonesia umumnya berada di pedesaan dan hidup dari sektor pertanian. Oleh sebab itu kebijakan yang dilakukan di Indonesia untuk mengentaskan kemiskinan terfokus ke pedesaan dan khususnya di sektor pertanian.

Pada Repelita enam, di samping program pembangunan yang sudah ada juga dilancarkan program-program lain yang tertuju pada rakyat lapisan bawah seperti Inpres Desa Tertinggal (IDT) yang dimaksudkan untuk meningkatkan penanganan kemiskinan secara berkelanjutan di desa-desa miskin.

IDT merupakan program pemerataan dengan menyediakan dana agar dapat memobilisasi kemampuan masyarakat sehingga menghasilkan *output* yang lebih besar dari *input* yang disediakan pemerintah dalam rangka untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan secara mandiri. Sejak Repelita enam orientasi pembangunan pertanian beralih dari fokus peningkatan produksi semata kearah perbaikan kesejahteraan petani. Berdasarkan hasil penelitian Simatupang dkk (2001:1-2) menunjukkan bahwa pembangunan pertanian merupakan sektor yang paling efektif dalam menurunkan jumlah penduduk miskin di Indonesia serta pembangunan sektor pertanian lebih efektif dalam upaya pengentasan kemiskinan dari pada pembangunan sektor industri. Secara lebih terinci dapat diuraikan beberapa kebijakan kemiskinan di Indonesia yang antara lain :

1. BIMAS (Bimbingan Masyarakat) yang merupakan program guna meningkatkan produksi beras.
2. Pengurangan impor beras seiring dengan peningkatan pasokan total pangan dan kualitas pangan.
3. Meningkatkan surplus pertanian yang akan dapat ditransfer untuk investasi dalam kegiatan-kegiatan ekonomi sekunder dan tersier lainnya.
4. Meningkatkan taraf hidup masyarakat.
5. Meningkatkan secara substansial pendapatan petani dan meningkatkan standar kehidupan mereka secara lebih baik melalui pembangunan kegiatan-kegiatan yang bersifat ekonomi pasar di mana persediaan-persediaan kebutuhan dasar terpenuhi dalam jumlah cukup besar.

Berdasarkan tujuan ini kelihatan bahwa program ini bertujuan untuk peningkatan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan bukan program yang secara langsung untuk pemberantasan kemiskinan. Upaya-upaya yang dilakukan pada program ini antara lain: a). penyediaan padi varietas unggul, b). subsidi pupuk dan pestisida, c) kredit pertanian (kredit Bimas) dan d). penyediaan sarana penyuluhan di lapangan.

6. INPRES (Instruksi Presiden), berdasarkan sifatnya kebijakan atau program INPRES dapat dibedakan dalam dua kelompok :
 - a. Dana Umum (*Block Grant*) meliputi INPRES Desa, INPRES Dati I dan INPRES Dati II.
 - b. Dana Khusus (*Specific Grant*) meliputi INPRES Kesehatan, INPRES Pasar, INPRES Jalan, dan INPRES Reboisasi.

Belakangan muncul IDT pada tahun 1993, dari berbagai macam program pembangunan yang dibiayai dengan dana INPRES, nampaknya hanya instrumen yang langsung mengarah kepada persoalan pemberantasan kemiskinan adalah INPRES Desa dan bantuan desa.

Untuk INPRES Desa alokasi dana diarahkan untuk mendorong, menggerakkan serta meningkatkan swadaya masyarakat desa dan pembangunan desa, pemerintah desa, dan perkembangan usaha ekonomi pedesaan kearah peningkatan pendapatan.

Sekalipun program ini dirancang untuk mengurangi tingkat kemiskinan tetapi sesungguhnya tidak dilakukan secara langsung untuk orang-orang miskin itu sendiri. Yang dilakukan adalah penyediaan fasilitas seperti pendidikan, kesehatan, pasar dan lain-lain.

7. Pengembangan Kawasan Terpadu (PKT)

Pembangunan kawasan mempunyai arti yang penting bagi pemerataan pertanian dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Program PKT telah dimulai sejak Repelita V itu pada tahun anggaran 1980 – 1990 persoalan yang muncul dari program ini adalah kecenderungan untuk berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dan mencompatkan penanggulangan kemiskinan pada posisi sekunder. Pada tingkat Mezo, PTK ini masih sangat diwarnai oleh pendekatan sektoral dan bukannya pendekatan kawasan. Pada tingkat mikro PKT ini cenderung melihat masing-masing proyek sebagai kota-kota yang terpisah satu dengan yang lainnya dan melihat kelompok sasaran sebagai objek melalui sikap patronisasi, sedangkan keberlanjutan proyek ini amatlah kecil.

8. Program Perkebunan Inti Rakyat (PIR), merupakan kebijakan pemberantasan kemiskinan yang melibatkan perusahaan perkebunan di Indonesia atas dasar pemikiran bahwa perkebunan memiliki nilai strategis bagi peningkatan taraf hidup masyarakat miskin di Indonesia. Di dalam unasan kebijakannya program PIR dimaksudkan untuk pengembangan usaha perkebunan, pengembangan komoditas dan pengembangan wilayah. Yang ketiga-tiganya dilakukan secara terpadu. Kebijakan PIR perkebunan tampaknya belum tertuju secara langsung bagi pengentasan orang miskin itu sendiri. Desain kebijakan kemiskinan yang sekedar dibuat untuk pertumbuhan ekonomi secara makro seringkali belum menyentuh kekuatan di dalam pembangunan ekonomi secara mikro.

2.6 Hasil Penelitian terdahulu

2.6.1 Studi Singarimbun 1986

Masri Singarimbun dalam studinya di desa Sriharjo, Yogyakarta pada tahun 1983, menyatakan bahwa kurang lebih 8,3 % penduduk desa Sriharjo hidup di bawah garis kemiskinan. Sebagian besar penduduk desa ini (68,70 %) adalah petani, 13 % adalah pedagang, 7 % bekerja di kota Yogyakarta dengan "nglajo" (pulang pergi) dan sisanya bekerja apa adanya (scrabutan).

Dalam penelitian Masri Singarimbun bersama tim penelitiunya tinggal di desa ini selama kurang lebih 6 bulan. Tim peneliti melakukan pengamatan langsung pada seluruh penduduk desa ini. Hasil studinya menyatakan bahwa penyebab dari kemiskinan penduduk desa Sriharjo adalah pemilikan luas lahan yang dimiliki sangat sempit (0,37 ha per keluarga), kekurangan modal dan terbatasnya lapangan kerja. Cuna menunjang kehidupan keluarga, sebagian dari

penduduknya bekerja di kota Jogjakarta sebagai tukang hangunan, tukang kayu, tukang ledeng dan sebagian lagi berdagang. Perdagangan yang ditekuni adalah sebagai penjual bakso, penjual sayuran dan penjual makanan lainnya.

2.6.2 Studi Sun Umi Lestari, 1986

Sun Umi Lestari (1986) meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi fertilitas dan nilai anak di Jepara. Salah satu penyebab bersedia menerima program keluarga bagi masyarakat adalah kemiskinan.

Sun Umi Lestari melakukan studi di desa Grujukun, Kabupaten Jepara Jawa Tengah. Yang menjadi obyek penelitian adalah nelayan dari responden yang diwawancarai 172 nelayan dari berbagai tipe (nelayan, pemilik perahu dan pemilik modal). Hasil studinya menyatakan bahwa kurang lebih 11,80 % nelayan di desa tersebut berada di bawah garis kemiskinan.

Penyebab kemiskinan nelayan di desa ini disebabkan karena, modal yang dimiliki terbatas (41,50%), tidak memiliki keterampilan lain (36,30%), pendidikan yang rendah (21,69%) dan sisanya karena sebab lain. Salah satu cara untuk mengentaskan kemiskinan di desa tersebut adalah memberikan bantuan perahu bermesin dan jala pada kelompok nelayan dan menggalakkan program keluarga berencana, sehingga jumlah anak sedikit, akibatnya beban hidup keluarga berkurang.

2.6.3 Studi Murdijanto Pubangkoro, 1994

Pubangkoro meneliti tentang penyebab tingginya kematian bayi di Kabupaten Jember, salah satu penyebab tingginya kematian bayi adalah karena terjadinya kemiskinan. Dalam studinya di Kabupaten Jember Jawa Timur

menyatakan bahwa kurang lebih 6,20% penduduk suku Madura di kabupaten ini berada di bawah garis kemiskinan, sedangkan Suku Jawa sekitar 4,95 hidup di bawah garis kemiskinan. Perbedaan ini terjadi karena Suku Madura bermukim di daerah yang tidak subur, sedang Suku Jawa bermukim di daerah yang relatif subur.

Jumlah penduduk yang diteliti sebanyak 1760 keluarga di mana yang 59% adalah Suku Madura, sedang sisanya Suku Jawa (41%). Kemiskinan terjadi karena sebagian besar disebabkan karena luas lahan yang dimiliki sangat sempit dan tingkat pendidikan yang rendah. Rendahnya pendidikan mengakibatkan pola tanam dan teknik pertanian tradisional, keadaan ini diperparah dengan modal yang dimiliki kecil, sehingga produksinya pun kecil (rendah) akhirnya bermuara pada kemiskinan.

2.6.4 Studi Suyono Dikun, 1994

Studinya dilakukan di dua desa di Kabupaten Aceh Utara Provinsi Daerah Istimewa Aceh, yaitu Desa Paya Sutra dan desa Tualang. Terletak di 30 km dan 10 km dari Kota Administratif Lhokseumawe dengan kondisi prasarana jalan yang rusak berat dan tidak dapat dilalui kendaraan cukup mengisolir daerah tersebut. Penelitiannya menunjukkan bahwa dari 71 KK yang tinggal di kedua desa tersebut, 38 di antaranya (54%) tergolong miskin absolut. Jenis usaha sebagian besar masyarakatnya adalah tanaman pangan dan peternakan lembu.

Hasil penelitiannya juga menyimpulkan bahwa dana IDT diperlukan sebagai modal usaha tanaman pangan agar terlepas dari praktek ijon yang menyebabkan masyarakat terjerat pada lingkaran utang dan kemiskinan. Selain

itu, penyediaan infrastruktur kebutuhan sosial dasar, seperti listrik, dan air bersih juga sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Peningkatan mobilitas sosial ekonomi dengan pengadaan fasilitas transportasi dapat membantu pemberdayaan ekonomi masyarakat. Namun demikian motivasi sosial melalui pendekatan budaya juga sangat diperlukan untuk mendukung semua program pengentasan kemiskinan.

2.6.5 Studi Dylan Palandeng, 1994

Studinya dilakukan di Desa Marore Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Sanihe Talaud Provinsi Sulawesi Utara. Di desa tersebut, terdapat 623 jiwa dengan 140 KK. Dari jumlah tersebut tercatat 245 jiwa diantaranya tergolong miskin dengan pekerjaan utama sebagai petani, terutama tanaman umur panjang seperti kelapa dan coklat dan sebagai nelayan tradisional yang sudah ditekuninya secara turun temurun.

Hasil studi yang dilakukan secara intensif menemukan adanya kemauan dan kesungguhan dari penduduk miskin untuk memperbaiki kehidupan sosial ekonomi. Atas dasar itu maka potensi masyarakat miskin dikembangkan dengan membentuk kelompok usaha yang dilengkapi dengan tim pendamping. Selain mempersiapkan kelompok masyarakat miskin dengan pengetahuan dan keterampilan diperlukan juga upaya-upaya lain untuk merubah adat yang tidak mendukung perbaikan hidup, serta terpenting membuka isolasi fisik daerah dengan perbalkan sarana prasarana angkutan. Pemberian fasilitas listrik dan air bersih sangat membantu mempercepat peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan pembukaan usaha baru.

2.6.6 Studi Sahidi, 1996

Studinya dilakukan di Desa Talang Buluh, Kecamatan Pembantu Batanghari Leko, Kabupaten Muha Provinsi Sumatra Selatan. Di Desa ini hanya terdapat 64 kepala keluarga atau 294 jiwa. Keadaan penduduk miskin tidak mencolok antar keluarga. Namun karakteristik yang digunakan untuk menentukan seseorang atau suatu keluarga miskin dilihat dari variabel ekonomi dan sosial yang melekat pada mereka. Secara ekonomi yang disebut miskin apabila masyarakat yang ada tidak memiliki pekerjaan yang tetap dan walaupun memiliki pekerjaan tetap namun penghasilannya berada di bawah standar minimal yang berlaku. Penduduknya bermata pencaharian di bidang tradisional seperti pertanian dan nelayan. Keberadaan yang relatif terisolasi dari Sumatera Selatan cukup mempersulit akses mobilitas sosial dan ekonomi.

Dalam penelitian Batu Bara juga menemukan fenomena kemiskinan antara lain sikap dan tingkah laku yang menerima keadaan yang seakan-akan tidak dapat diubah, yang tercermin di dalam lemahnya kemauan untuk maju, rendahnya kualitas SDM, lemahnya nilai tukar hasil produksi, rendahnya produktivitas, terbatasnya modal yang dimiliki, rendahnya pendapatan dan terbatasnya kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan.

Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa kemiskinan di Talang Buluh merupakan kemiskinan kultural yang didukung oleh keterisolasian akses dan mobilitas sosial ekonomi. Oleh karena itu, Sahidi memandang perlu upaya terpadu antara pendekatan budaya dan pembangunan fisik untuk mengatasinya. Pendekatan budaya dilakukan pada pimpinan adat setempat, agar masyarakat setempat bersedia, mendukung, membantu dan menjaga pembangunan fisik yang dilakukan oleh pemerintah.

Sedangkan hasil Studi Gunawan dan Firwidodo (1993:48) menemukan penerapan teknologi pertanian telah berperan dalam mengurangi penduduk miskin di pedesaan dari sekitar 40 % (tahun 1976) menjadi 17 % (tahun 1987). Melalui program BIMAS, INMAS dan SUPRA INSUS secara efektif telah meningkatkan produktivitas padi dari 2,5 ton per hektar menjadi 4,5 ton per hektar, hal ini mengakibatkan pendapatan petani meningkat, yang pada akhirnya akan dapat menanggulangi masalah kemiskinan.

Amar (2000:226 – 227) menyimpulkan bahwa luas penguasaan lahan sangat menentukan untuk terlepasnya sebuah rumah tangga dari belenggu kemiskinan. Semakin luas lahan yang dimiliki oleh sebuah rumah tangga semakin kecil peluang rumah tangga tersebut berada dalam kemiskinan demikian pula sebaliknya semakin kecil lahan yang dikuasai akan semakin rentan rumah tangga tersebut untuk berada dalam kemiskinan. Begitu juga dengan teknologi, semakin konsisten sebuah rumah tangga menggunakan teknologi semakin terhindar mereka dari kemiskinan.

Hasil studi Pakpahan (1993) menyimpulkan bahwa karakter utama dan penyebab kemiskinan dikelompokkan menurut (a) sumber daya alam (b) teknologi dan unsur penduduk (c) sumber daya manusia (d) sarana dan pra sarana termasuk kelembagaan.

Sugiharso (1996) dalam studinya menyimpulkan bahwa hubungan upah dan jam kerja tidak signifikan untuk responden laki-laki sedangkan untuk responden perempuan signifikan dan bertanda positif. Murhadi S.K. (1992) dalam studinya di kabupaten Malang, Madiun dan Mojokerto Jawa Timur menyatakan bahwa

tingkat pendidikan, jumlah anggota rumah tangga dan peluang bekerja dan berusaha di sektor non pertanian merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi mobilitas penduduk pada rumah tangga lain di pedesaan.

Hasil studi Ahmad (1993) menyimpulkan bahwa (a) elastisitas kesempatan kerja terhadap pertumbuhan ekonomi tidak elastis (b) sektor pertanian menunjukkan elastisitas kesempatan kerja yang relatif tinggi (c) sektor pertambangan dan penggalian serta industri elastisitas kesempatannya paling rendah dan laju pertumbuhan ekonomi yang paling tinggi.

2.6.7 Studi Mubyarto, 1994

Lokasi penelitian Mubyarto di Desa Tanjung Lebar Kecamatan Mestong Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi. Fenomena kemiskinan masyarakatnya terutama tidak memiliki mata pencaharian. Hal tersebut salah satunya karena tidak memiliki keterampilan dan pendidikan yang rendah. Oleh karena itu Mubyarto memandang perlu pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan keterampilan, kualitas dan pendidikan.

Selanjutnya Mubyarto menyatakan bahwa keterampilan yang perlu diberikan kepada masyarakat adalah pengolahan makanan tradisional, keterampilan menjahit dan bordir serta pertukangan. Pendidikan yang dianjurkan adalah pendidikan kejuruan bukannya pendidikan umum. Pemberian bantuan peternakan akan sangat menolong masyarakat dalam peningkatan gizi masyarakat.

2.6.8 Studi Santiasih dan Endah Pratiwi, 1997

Desa Karangwen Kecamatan Rongkop, Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Jarak desa dari ibukota Kabupaten kurang lebih 40 km, dari ibukota kecamatan sekitar 12 Km. Kondisi jalan yang sudah beraspal, tetapi untuk mencapai dusun-dusun harus melewati jalan yang berbatu. Sebagian besar penduduk (95 %) bermata pencaharian sebagai petani, dan hampir seluruh kepala keluarga petani tersebut masuk dalam kategori miskin yakni sebesar 91,5 % dari kepala keluarga yang ada.

Kondisi tanah yang sebagian besar berupa gunung berbatu (70 %) menyebabkan hanya 30 % tanah yang dapat dipergunakan sebagai lahan pertanian. Dengan tingkat produktifitas padi yang sangat rendah karena hanya mencapai 0,5-1 ton/ha. Untuk itu dinas pertanian setempat perlu membimbing petani agar melaksanakan sistem tumpang sari, sehingga petani mampu memberdayakan lahannya sepanjang tahun.

Di dalam penelitiannya Santiasih dan Endah Pratiwi menyimpulkan bahwa, SDA lahan tidak subur, langka sumber daya air, tingkat pendidikan rendah, dan kekurangan SDM potensial karena migrasi adalah faktor penyebab kemiskinan. Solusi yang disampaikan adalah agar sebagian masyarakat : alih profesi dari petani menjadi peternak, tetapi harus disertai heterogenitas usaha yang saling mendukung, atau keduanya berjalan bersama yaitu petani dan juga peternak.

2.6.9 Studi San Afri Awang, 1997

Penelitian dilakukan di Desa Segulung dan Desa Hutan Bodag. Desa Segulung berada di Kecamatan Dagangan, Kabupaten Daerah Tingkat II Madiun, Provinsi Jawa Timur. Desa tersebut terletak 7 km dari ibu kota kecamatan dan 18 km dari kota Madiun. Kondisi pemukiman masih ada yang terbuat dari gedek yakni sebesar 20 %. Sekitar 23,4% penduduk desa Segulung tergolong penduduk yang tidak melek huruf.

Faktor penentuan kemiskinan didasarkan kriteria status sosial ekonomi dan asset sumberdaya lahan untuk pertanian, maka diperoleh data bahwa penduduk miskin di Desa Segulung sebanyak 262 KK (28,8%). Pemilikan tanah penduduk miskin rata-rata kurang dari 2000 m², itupun terdiri dari tanah kering yang berupa pekarangan.

Desa Bodag Kecamatan Karc, Kabupaten Daerah Tingkat II Madiun, Provinsi Jawa Timur. Desa yang terletak 18 km dari ibu kota kecamatan dan 23 km dari kota Madiun dapat ditempuh dengan jalan beraspal. Masyarakatnya sebagian besar masih bergantung dari hasil lahan kering, dan hasil hutan, karena sekitar 79 % kondisi tanah di desa tersebut berupa tanah kering dan lahan hutan. Sebagian besar penduduk bertani dan menjadi buruh tani sekitar 50 % petani yang tidak mempunyai lahan pertanian sendiri.

Kemiskinan yang terjadi di Desa Bodag disebabkan oleh rendahnya asset penduduk terhadap pemilikan lahan garapan, dan kekurangan peluang kerja dan berusaha juga menjadi penyebab kemiskinan di desa itu. Sebagian besar buruh tani dan petani penggarap dengan cara bagi hasil.

San Afri Awang menyimpulkan bahwa Desa Bodag dikategorikan desa tertinggal disebabkan : karena rendahnya aset/kepemilikan lahan garapan, tingkat pendidikan, kebutuhan personal dasar, dan mobilitas sosio ekonomi. Pemberian modal usaha, motivasi dan pendamping usaha, dan perbaikan sarana umum adalah solusi. Untuk mengatasinya dilakukan dengan pemindahan penduduk ke daerah lain lewat program transmigrasi.

2.6.10 Studi Rusnadi Ridwan, 1998

Desa Hilir Muara dan Desa Rampang merupakan desa dengan tipologi pantai yang terletak di Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kota Baru Provinsi Kalimantan Selatan. Sebagian besar penduduk bermata pencaharian sebagai nelayan. Menjadi nelayan atau Anak Buah Kapal mempunyai resiko yang besar untuk mengalami kecelakaan dan meninggal, sehingga banyak janda Anak Buah Kapal yang ditinggal merupakan golongan miskin.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kemiskinan yang terjadi di Desa Hilir Muara dan Desa Rampang disebabkan oleh keterbatasan modal untuk memperbesar usaha, kurangnya informasi dan komunikasi, wawasan pengetahuan sempit. Oleh karenanya upaya mengatasinya, perlu diberikan bantuan modal berupa ternak (anak sapi, kambing, itik), menambah keterampilan serta fasilitas perdagangan

2.6.11 Studi Murni Daulay, 2002

Studi Murni Daulay dilakukan di kabupaten Labuhan Batu, provinsi Sumatera Utara. Studi ini mencoba untuk meneliti pengaruh curahan jam kerja total dan eksploitasi terhadap kemiskinan petani padi.

Hasil regresi dari penelitian menunjukkan bahwa: (1) curahan jam kerja total secara parsial berpengaruh negatif terhadap pendapatan petani padi; (2) terdapat perbedaan antara eksploitasi harga dan eksploitasi tenaga kerja. Di mana eksploitasi harga berpengaruh negatif terhadap pendapatan sedangkan eksploitasi tenaga kerja berpengaruh positif terhadap pendapatan; (3) produktivitas tenaga kerja secara parsial berpengaruh positif terhadap pendapatan petani; (4) luas lahan secara parsial berpengaruh positif terhadap pendapatan petani; (5) teknologi secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan petani tetapi secara bersama-sama signifikan; dan (6) teknologi tidak berpengaruh secara signifikan.

Perspektif mengenai kemiskinan ini penting untuk dipahami sebelum menganalisis strategi pengentasan kemiskinan, sebab perspektif ini akan sangat mempengaruhi pilihan strategi dalam memecahkan masalah kemiskinan. Artinya, efektivitas strategi pengentasan kemiskinan akhirnya akan ditentukan oleh kesahihan asumsi yang digunakan. Apabila asumsi mazhab magical memang benar, maka pendekatan conformis tepat dalam rangka pengentasan kemiskinan. Apabila asumsi yang digunakan oleh mazhab naive memang sah, maka pendekatan reformis adalah pendekatan yang tepat dalam menanggulangi masalah kemiskinan. Sebaliknya bila asumsi dan mazhab critical memang sah, maka pendekatan transformis adalah pendekatan yang efektif dalam memecahkan masalah kemiskinan.

Kajian definisi dari kemiskinan dapat dilihat dari beberapa kajian. Menurut Badan Pusat Statistik (2000:145) kemiskinan didefinisikan sebagai pola konsumsi yang setara dengan beras 320 kg/kapita/tahun di pedesaan dan 480 kg/kapita/tahun di daerah perkotaan. Menurut hasil survey Susenas (1999), kemiskinan disetarakan dengan pengeluaran untuk bahan makanan dan non makanan sebesar Rp 89.845,- /kapita/bulan dan Rp 69 420,-/kapita/bulan.

Berbagai disiplin ilmu memandang masalah kemiskinan dengan sudut pandang, tinjauan dan implikasi yang berbeda tetapi secara esensial bisa sejajar. Menurut Nasution (1993: 4) ditinjau dari titik pandang ekonomi kemiskinan dianggap merupakan masalah dengan beberapa alasan, antara lain : (1) kemiskinan merupakan cermin dari rendahnya permintaan agregat (*aggregate demand*). Lebih lanjut permintaan agregat yang rendah mengurangi insentif untuk mengembangkan sistem produksi; (2) kemiskinan berkaitan dengan ratio kapital/tenaga kerja yang rendah sehingga mengakibatkan produktivitas tenaga kerja rendah; (3) kemiskinan seringkali mengakibatkan mis alokasi sumberdaya terutama tenaga kerja.

Ditinjau dari sudut sosial, kemiskinan merupakan ciri lemahnya potensi suatu masyarakat untuk berkembang. Disamping itu kemiskinan berhubungan dengan aspirasi yang terbatas atau sempit dan pendeknya jangkauan untuk mengakses berbagai sumber dari sekelompok masyarakat. Di lain pihak disiplin politik mengkaji kemiskinan dari ketergantungan dan eksploitasi suatu kelompok masyarakat oleh kelompok masyarakat lain. Adalah tidak adil dan berbahaya jika

nasib dan masa depan suatu golongan masyarakat akan menimbulkan kesenjangan dan pada akhirnya kesenjangan lebih berbahaya dari kemiskinan. Standar hidup biasanya dipakai sebagai acuan operasional untuk mengidentifikasi kemiskinan, sehingga orang atau rumah tangga dikatakan miskin karena mempunyai standart hidup yang rendah. Permasalahannya juga pada kriteria standar hidup yang rendah. Menurut Todaro (1989) ukuran standar hidup yang rendah tersebut dimanifestasikan secara kuantitatif dan kualitatif dalam bentuk pendapatan yang rendah; perumahan yang kurang layak; kesehatan yang buruk; sedikit atau tidak berpendidikan; angka kematian yang tinggi; harapan hidup yang rendah; dalam banyak hal mereka berada dalam keadaan yang sulit dan tidak mempunyai harapan sama sekah.

Berdasarkan pengalaman *Marshall Plan* yang mampu merehabilitasi perekonomian negara-negara Eropa dan Jepang yang hancur setelah PD II memberi petunjuk bahwa yang dibutuhkan adalah suntikan kapital (berupa pinjaman). Suntikan kapital akan mendorong pertumbuhan ekonomi (sebaiknya dengan kecepatan lebih dari 5 %). Selanjutnya pertumbuhan ekonomi tersebut melalui mekanisme pasar akan mendorong proses pencetakan ke bawah (*trickling down process*) yang menyebabkan manfaat dari pertumbuhan ekonomi ke lapisan yang lebih bawah.

Teori yang demikian telah digunakan oleh Perserikatan Bangsa-bangsa dan beberapa negara industri dalam membantu negara-negara yang sedang berkembang. Percobaan pertama dari penerapan teori tersebut adalah negara Israel dan India. Di Israel penerapan tersebut memberikan hasil yang memuaskan, sedang di India dan beberapa negara Asia lainnya justru menimbulkan dampak

yang sebaliknya. Di negara Asia yang sedang berkembang tersebut (termasuk Indonesia) suntikan kapital telah mengakibatkan pertumbuhan ekonomi yang relatif sangat cepat. Akan tetapi pertumbuhan yang relatif cepat tersebut seringkali disertai oleh memburuknya distribusi pendapatan. Sebagian masyarakat, oleh berbagai sebab tidak mampu menyadap manfaat ekonomi dari pertumbuhan tersebut. Akibatnya, sejak tahun tujuh puluhan masalah kemiskinan telah menjadi isu termasuk di Indonesia. Berbagai upaya telah dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia untuk menanggulangi kemiskinan tersebut. Akan tetapi sampai dengan tahun 2000 diperkirakan jumlah penduduk miskin masih berjumlah 32,8 juta atau (16%). Dillon (2002: 41)

Kenyataan di atas sesuai dengan yang disinyalir oleh Penny (Kabul, 1995) bahwa proses kemiskinan tersebut terjadi akibat pertumbuhan ekonomi. Kemiskinan mutlak dan mati kelaparan tidak pernah cukup diperhatikan dalam ekonomi positif, walaupun kenyataan itu bagi ilmu ekonomi merupakan kasus pembatas yang luar biasa. Banyak pemahaman dapat diperoleh dari studi mendalam mengenai kelaparan dalam sistem perekonomian yang dibentuk oleh kekuatan pasar.

Kemiskinan pada dasarnya dapat digolongkan kedalam dua kategori yaitu (1) kemiskinan alamiah, dan (2) kemiskinan struktural. Kemiskinan kategori kedua sering disebut sebagai kemiskinan buatan (*man made poverty*). Walaupun secara teoritis kedua kategori tersebut dapat dipisahkan, akan tetapi kedua kategori kemiskinan tersebut dapat terjadi secara bersama-sama pada suatu wilayah. Bahkan di beberapa wilayah kedua kategori kemiskinan tersebut dapat mempunyai hubungan sebab akibat.

BAR 3

KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

3.1 Kerangka Proses Berpikir

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan tinjauan pustaka, terlebih dahulu disusun kerangka proses berpikir pada gambar 3.1 yang dijelaskan sebagai berikut.

3.1.1 Landasan Kerangka Proses Berpikir

Penggunaan kerangka proses berpikir dimaksudkan untuk memberikan gambaran atau batasan-batasan tentang teori-teori yang akan dipakai sebagai landasan studi ini.

Studi ini difokuskan pada masalah kemiskinan, dan kemiskinan selalu diidentikkan dengan pedesaan serta dicirikan oleh keterbelakangan. Kemiskinan tersebut secara jelas terlihat dari rendahnya tingkat pendapatan, tidak meratanya distribusi pendapatan dan pemilikan faktor produksi antar kelompok masyarakat. Faktor produksi yang dimiliki penduduk miskin sangat terbatas sekali sebagai mana ditunjukkan oleh modal yang terbatas, luas lahan yang sempit, rendahnya tingkat teknologi, rendahnya tingkat kesehatan, rendahnya akses terhadap kelembagaan koperasi maupun pasar dan kurangnya mata pencaharian alternatif. Rendahnya faktor tersebut mengakibatkan sangat terbatasnya kegiatan ekonomi yang dapat dilakukan oleh rumah tangga miskin untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraannya.

Terbatasnya faktor produksi yang dimiliki masyarakat miskin menjadi salah satu penyebab kenapa penduduk miskin hanya melakukan kegiatan ekonomi yang memiliki produktivitas rendah. Dengan demikian masyarakat miskin kurang akses dalam memanfaatkan peluang ekonomi yang ada. Akibatnya masyarakat miskin hanya sekedar bertahan untuk hidup dan sangat kecil peluang untuk keluar dari kondisi kemiskinan tersebut.

Untuk menganalisis kerangka proses berpikir digunakan studi teoritis sebagai dasar guna menyusun suatu kerangka pemikiran yang dapat menjelaskan hubungan antara faktor-faktor yang terlibat dalam suatu masalah. Didalam suatu teori, hubungan dan gejala yang dikemukakan dalam studi empiris diterangkan dengan dasar suatu kerangka pemikiran tentang sebab-akibat sebagai langkah untuk mengontrol kegiatan agar hasil yang diharapkan dapat dicapai.

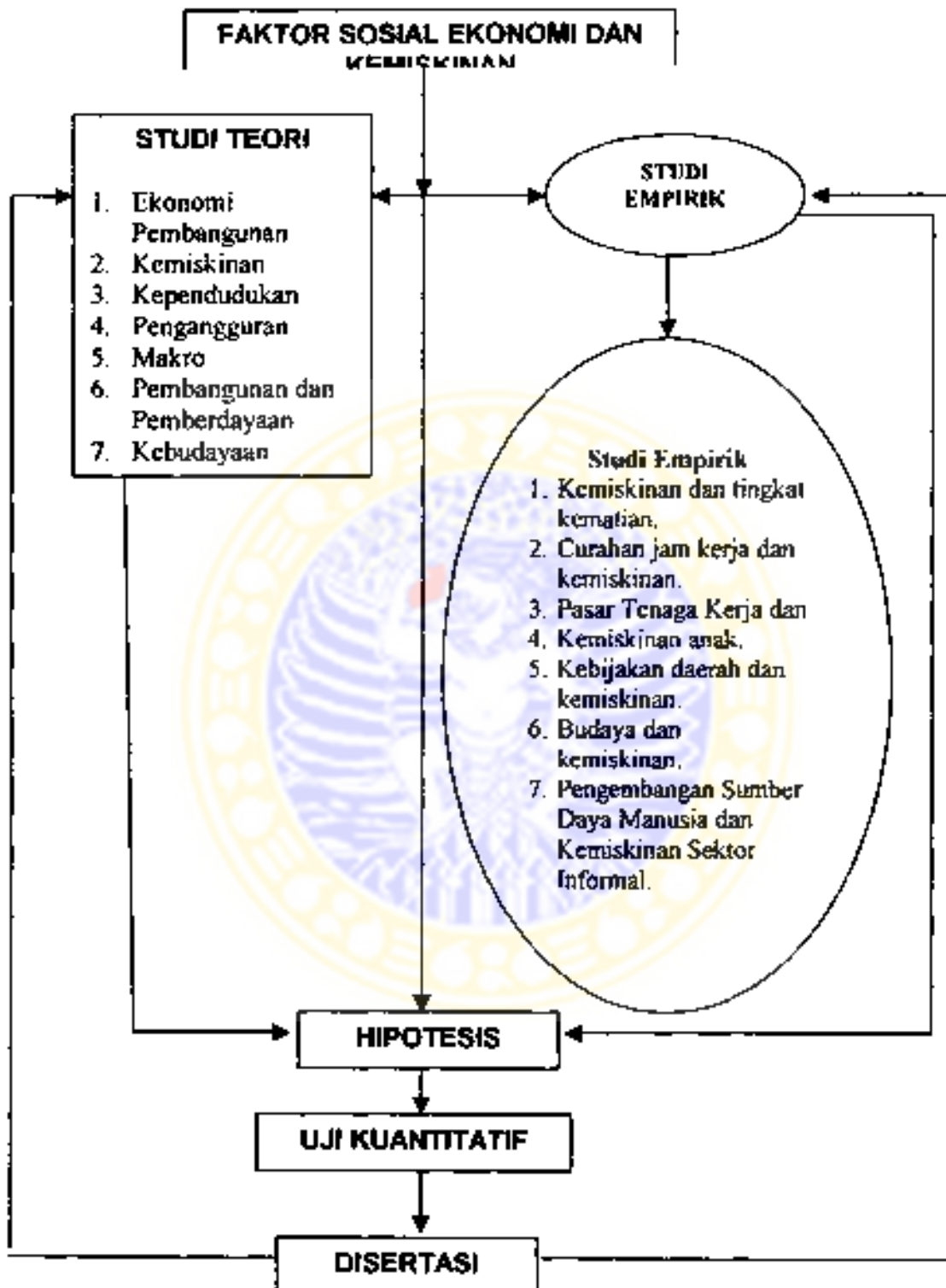
Studi teori mempunyai kelebihan dibandingkan dengan studi empiris. Studi empiris adalah canggung dan tidak mudah dipergunakan karena berhubungan dengan gejala yang terpisah dan menimbulkan kesukaran untuk mengerti dan memahami setiap gejala sehingga sangat terbatas dalam hal peramalan yang merupakan tujuan akhir dari ilmu (Sumantri, 1998:95).

Dalam studi empiris tentang faktor sosial ekonomi yang menyebabkan kemiskinan masyarakat di Kabupaten Buru Propinsi Maluku, maka kerangka proses berpikir yang merupakan suatu landasan untuk mengantarkan pemahaman yang dimulai dengan mengkaji studi teori dari berbagai ahli sesuai disiplin ilmunya sebagaimana dijelaskan pada bab 2. Tidak semua teori yang ada dijadikan sebagai pilar utama studi ini, tetapi yang mempunyai relevansi sangat kuat dengan

studi inilah yang digunakan ditambah dengan studi empiris. Kemudian disusunlah kerangka hipotesis yang merupakan suatu pendapat atau kesimpulan yang sifatnya sementara, belum benar-benar berstatus sebagai tesis (Suratno dan Lincoln, 1999: 22). Selanjutnya diuji kuantitatif dengan menggunakan path analisis.

3.1.2 Model Kerangka Proses Berpikir

Dari uraian landasan kerangka proses berpikir jelas terlihat bahwa kemiskinan mempunyai kaitan yang sangat erat dengan pembangunan, kependudukan, ketenagakerjaan, dan pemerdayaan. Secara empirik beberapa studi telah membuktikan bahwa kemiskinan dipengaruhi oleh banyak faktor. Keterkaitan antara teori dan studi empirik digambarkan dalam sebuah model pada Gambar 3.1 sebagai berikut.



Gambar 3.1 KERANGKA PROSES BERPIKIR

3.2 Kerangka Konseptual

Berdasarkan gambar 3.2 tersebut dapat dijelaskan secara rinci bahwa untuk menguji hipotesisi digunakan analisis jalur (*path analysis*) yang dikembangkan sebagai model untuk mempelajari pengaruh secara langsung dan tidak langsung dari variabel eksogen terhadap variabel endogen. Analisis ini merupakan salah satu pilihan dalam rangka mempelajari ketergantungan di dalam model dan merupakan metode yang baik untuk menerangkan apabila terdapat seperangkat yang besar untuk dianalisis dan mencari hubungan kausal. Analisis jalur digunakan untuk menelaah hubungan antar model kausal yang telah dirumuskan peneliti atas dasar pertimbangan teoritis dan pengetahuan tertentu (Wibowo, 2003:1).

Menurut Singanambun (1996:45) konsep adalah generalisasi dari sekelompok fenomena tertentu, sehingga dapat untuk menggambarkan berbagai fenomena yang ada. Konsep dapat mempunyai tingkat generalisasi yang berbeda, semakin dekat suatu konsep dengan realita, semakin mudah konsep itu diuraikan dan diartikan. Kerangka konseptual perlu dikemukakan dalam rencana penelitian agar rencana itu padu dan terarah

Pedesaan dicirikan dengan kemiskinan dan keterbelakangan pada negara sedang berkembang. Kemiskinan tersebut secara jelas terlihat dari rendahnya tingkat pendapatan, tidak meratanya distribusi pendapatan dan pemilikan faktor produksi antar kelompok masyarakat.

Faktor produksi yang dimiliki oleh masyarakat miskin sangat terbatas sekali sebagaimana ditunjukkan dengan modal yang kurang, kepemilikan lahan

yang sempit, rendahnya tingkat pendidikan, rendahnya tingkat kesehatan, rendahnya atau keterbatasan mengakses fasilitas serta budaya yang tidak mendukung masyarakat untuk lebih berkembang mengakibatkan sangat terbatasnya kegiatan ekonomi yang dapat dilakukan oleh keluarga miskin untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraannya.

Kerangka konseptual yang mendasari penelitian ini adalah tentang kemiskinan. Terjadinya kemiskinan pada sekelompok masyarakat disebabkan beberapa faktor. Grand theory yang melandasi penelitian ini adalah teori kemiskinan Anne Booth yang secara detail membahas faktor-faktor penyebab kemiskinan. Pemahaman tentang kemiskinan juga didukung oleh teori kemiskinan Michael P. Todaro.

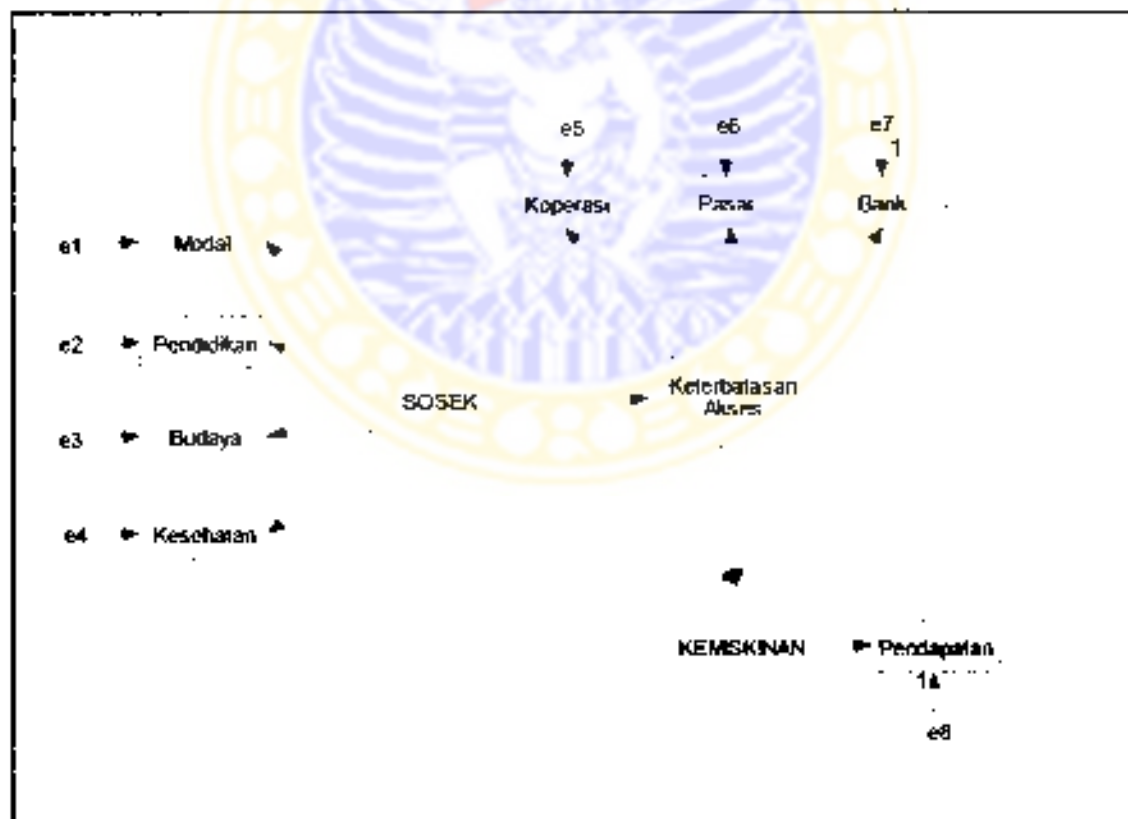
Multidimensionalitas kemiskinan menimbulkan beragam teori-teori kemiskinan. Oleh karena itu semakin banyak *space* pengetahuan terhadap kemiskinan, semakin tajam daya analisis suatu penelitian. Sebagai bahan kajian lebih lanjut dalam penelitian ini, dilakukan penelaahan penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan di Indonesia, seperti dikemukakan pada Bab II.

Teori Anne Booth yang dijadikan teori dasar pada studi ini, seperti telah disebutkan pada Bab 2, menyatakan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadi kemiskinan ada lima. Kelima faktor tersebut adalah faktor ekonomi yang terdiri dari kurang modal dan rendahnya teknologi. Kedua faktor sosial budaya yang terdiri dari rendahnya keahlian dan pendidikan, terbatasnya kerja dan adanya budaya miskin. Ketiga faktor geografi dan lingkungan yang terdiri dari keterbatasan sumberdaya alam, banyaknya penyakit dan kurang suburannya lahan.

Kecmpat faktor personal dan fisik yang terdiri dari umur, jenis kelamin dan tingkat kesehatan perorangan. Yang terakhir adalah keterbatasan dalam mengakses heberapa hal seperti pasar produk, fasifitas publik dan fasilitas kredit. Menurut Anne Booth ada 14 penyebab terjadinya kemiskinan suatu masyarakat.

Studi ini tidak meneliti semua faktor penyebab kemiskinan dari teori Anne Booth, tetapi hanya mengambil sebagian saja. Penyebab yang diteliti adalah masalah modal, tingkat pendidikan, budaya, penyakit atau tingkat kesehatan.

Tidak semua teori Anne Booth diteliti karena ada beberapa hal yang tidak dikuasai seperti teknologi, kesempatan kerja, kesuburan tanah, usia dan pengaruhnya terhadap kemiskinan, mengukur kesehatan, dan fasilitas kredit.



Gambar 3.2 Kerangka Konseptual

3.3 Hipotesis

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, kerangka konsep berpikir pada gambar 3.1 dan kerangka konseptual pada gambar 3.2, maka disusunlah hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut .

1. Modal berpengaruh signifikan terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat Kabupaten Buru
2. Pendidikan berpengaruh signifikan terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat Kabupaten Buru.
3. Budaya berpengaruh signifikan terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat Kabupaten Buru.
4. Kesehatan berpengaruh signifikan terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat Kabupaten Buru.
5. Kehidupan sosial ekonomi masyarakat Kabupaten Buru berpengaruh signifikan terhadap akses pasar.
6. Kehidupan sosial ekonomi masyarakat Kabupaten Buru berpengaruh signifikan terhadap akses koperasi.
7. Kehidupan sosial ekonomi masyarakat Kabupaten Buru berpengaruh signifikan terhadap akses bank.
8. Kehidupan sosial ekonomi berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan masyarakat Kabupaten Buru.
9. Aksesibilitas berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan masyarakat Kabupaten Buru.
10. Kehidupan Sosial ekonomi berpengaruh signifikan terhadap aksesibilitas pada masyarakat Kabupaten Buru.
11. Kehidupan Sosial ekonomi berpengaruh signifikan terhadap ketnisknaan masyarakat Kabupaten Buru melalui aksesibilitas

BAB 4

METODE PENELITIAN

4.1 Rancangan Penelitian

Berdasarkan sifat permasalahannya, rancangan penelitian dibedakan atas: Penelitian Historis; Penelitian Deskriptis; Penelitian Perkembangan ; Penelitian Kasus; Penelitian Korelasional, Penelitian Kausal Komperatif, Penelitian Experimental; Penelitian Tindakan; dan Penelitian Eksplorasi (Djoko Moesinto 2004 : 24).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini termasuk penelitian kausal komperatif atau *expost facto* atau *explanatory research*. Alasannya penelitian ini menjelaskan hubungan dan pengaruh antara beberapa variabel bebas (*independent variable*) terhadap satu variabel terikat (*dependent variable*). Selain itu penelitian ini menggunakan data saat itu (*Crossectional*), data yang diperoleh dipergunakan untuk memprediksi keadaan di masa depan, atau untuk memprediksi keadaan daerah lain yang kondisinya sama dengan daerah yang diteliti.

Penelitian ini dilakukan untuk pengujian hipotesis. Hipotesis disusun atas dasar teori dan hasil kajian sejenis di masa lalu yang telah dipelajari. Dengan demikian hipotesis dalam suatu penelitian haruslah diuji. Untuk pengujiannya diperlukan ketajaman dalam perumusan variabel-variabelnya sehingga bersifat *aplicable* yang patut dapat diuji untuk diangkat menjadi generalisasi yang berlaku umum (Nawawi 1985:161).

Rancangan penelitian juga berarti rencana penelitian yang dilakukan. Rencana dan pelaksanaan tersebut digambarkan secara runtut pada bab ini. Diharapkan rencana penelitian ini mampu menerangkan dengan benar tahap-tahap pelaksanaan penelitian, sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan, sehingga hasil penelitian ini akan dapat menggambarkan dengan benar keadaan kemiskinan di daerah penelitian, menerangkan sebab-sebab terjadinya kemiskinan dan memprediksi kemiskinan di masa mendatang.

4.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Buru Provinsi Maluku. Pemilihan lokasi ini didasarkan atas pertimbangan: (1) daerah ini adalah salah satu daerah pengembangan dan berada pada alur pelayaran internasional, (2) terdapat penduduk miskin lebih dari 30 % merupakan masalah besar bagi kabupaten Buru untuk segera ditangani, padahal pada saat yang bersamaan dana pembangunan khusus untuk menangani penduduk miskin tidak teralokasi dalam dana alokasi umum (DAU) maupun Dana Alokasi Khusus (DAK), (3) merupakan daerah tujuan migrasi penduduk dari daerah lain, (4) sumber daya alamnya cukup kaya, (5) jumlah penduduknya relatif sedikit.

Proporsi penduduk di Kabupaten Buru hingga saat ini adalah sebagai berikut, Suku Jawa 20 persen, Suku Sulawesi 26 persen, Suku Maluku 25 persen, dan sisanya sekitar 29 persen suku-suku Sumatra, serta suku Buru asli.

4.3 Populasi

Ruang lingkup penelitian ini adalah dinamika rumah tangga miskin yang tinggal di Kabupaten Buru. seperti diketahui bahwa jumlah rumah tangga di daerah ini sebesar 1.142 kepala keluarga, yang tersebar pada berbagai desa dan dusun (lihat Tabel 5.5, halaman 10). Sebagian dari mereka atau sebanyak 861 kepala keluarga adalah keluarga miskin. Rumah tangga miskin yang dimaksud dalam penelitian ini sesuai dengan batasan rumah tangga yang dikemukakan Biro Pusat Statistik (BPS, 1993) bahwa rumah tangga adalah sekelompok komunitas yang memiliki sumber pendapatan bersama (*joint income*). Oleh karenanya modal yang dimiliki keluarga, pendidikan kepala keluarga, curahan jam kerja kepala keluarga, jenis penyakit, budaya, jumlah anggota keluarga dan fasilitas publik akan sangat menentukan miskin atau tidaknya sebuah rumah tangga.

Di kabupaten Buru terdapat satu kecamatan kota yaitu Kecamatan Namica sedangkan sisanya sembilan kecamatan desa. Kecamatan desa terpilih empat kecamatan yaitu Airbuara, Kecamatan Leksula, Kecamatan Ambalau, Kecamatan Wacama sebagai sampel kecamatan. Kecamatan ini dipilih karena jauh dari kota dan cukup terisolir karena hubungan ke daerah ini hanya dilakukan dengan laut, di mana pada musim ombak dan laut tidak bersahabat masyarakat sangat merasakan kesulitan.

4.4 Sampel

Penarikan sampel dilakukan atas dua langkah yang terdiri atas penentuan sample desa dan penentuan sample rumah tangga.

- a) Penentuan sampel desa dilakukan atas dua tahap (*double stage*) yaitu sebagai berikut. Tahap pertama, penentuan sampel daerah kecamatan dengan pendekatan *Cluster Random Sampling* karena Kabupaten Buru secara geografis dikelompokkan kedalam tiga kelompok wilayah yang terdiri dari wilayah dataran rendah, wilayah dataran tinggi dan wilayah pantai.

Wilayah dataran rendah terdiri atas kecamatan Waiapo, Namlea, dan Airbuaya. Wilayah dataran tinggi terdiri atas kecamatan Leksula dan Kepala Madan, sedang wilayah pantai terdiri atas kecamatan Ambalau, Namrole dan Waisama. Di masing-masing wilayah secara acak (*random*) dipilih satu wilayah kecamatan sebagai sampel wilayah. Untuk wilayah dataran rendah terpilih secara *random* diambil dua kecamatan yakni kecamatan Airbuaya dan Namlea, wilayah dataran tinggi terpilih secara *random* satu Kecamatan yakni Leksula, dan untuk wilayah pantai secara *random* terpilih dua kecamatan yakni kecamatan Ambalau dan Waesama.

Terpilihnya kecamatan yang mewakili kawasan dataran tinggi tersebut sangat *representative* karena daerah ini paling luas porsi dataran tingginya yang mempunyai implikasi pada kendala transportasi. Untuk kecamatan Airbuaya yang mewakili dataran rendah juga sangat *representative* karena kecamatan ini paling luas daerah pertaniannya sedang kecamatan Namlea termasuk kawasan kota kabupaten, sehingga mewakili kondisi kemiskinan kota secara *relative*, Kecamatan Ambalau mewakili kawasan nelayan merupakan kawasan pulau tersendiri sehingga *culture* pantai sangat menonjol, sedang untuk Waesama merupakan kawasan pantai pesisir di daratan pulau Buru yang cukup potensial.

Tahap kedua, memilih desa sampel pada masing-masing kecamatan terpilih dengan pendekatan *Proportional Random Sampling*. Pada masing-masing kecamatan ditetapkan sekitar 20 % sebagai sampel dari total desa yang ada di masing-masing kecamatan sampel tersebut. Secara lengkap kecamatan dan desa terpilih disajikan dalam Tabel 4.1

Tabel 4.1
DAFTAR NAMA KECAMATAN DAN DESA TERPILIH
SEBAGAI SAMPEL UNTUK KECAMATAN DAN
DESA TEMPAT RUMAH TANGGA KATEGORI MISKIN
DI KABUPATEN BURU

No	Kategori Kec. Sampel		Desa Sampel
	Kecamatan	Kategori	
1	Namlea	Dataran rendah kota	Santeke dan Namlea
2	Airbuaya	Dataran rendah desa	Waipure dan Wawamaharu
3	Leksula	Dataran tinggi	Wackating dan Tifu
4	Waisama	Wilayah pantai daratan	Wamsisi dan Lena
5	Ambalau	Wilayah pantai pulau	Ulina dan Wasawoi

Sumber : Data primer, 2005

b) Ketiga, penentuan sampel meliputi dua tahap, yakni ukuran sampel rumah tangga dilakukan dengan menggunakan jumlah sampel. Satuan analisis penelitian ini adalah rumah tangga miskin yang terpilih secara random sesuai dengan penyebaran penduduk miskin di setiap desa sampel. Sebagai responden rumah keluarga miskin terpilih, yaitu ayah atau ibu (bila suami telah meninggal), dalam hal menjawab pertanyaan tertentu kepala rumah tangga yang mengalami kesulitan, dapat dibantu anggota keluarga seperti istri atau anaknya yang dianggap mampu

Jumlah rumah tangga yang diteliti sebanyak 861 rumah tangga yang termasuk kategori miskin. Sebanyak rumah tangga tersebut tersebar di 10 desa, yaitu 2 desa kota (pinggiran kota) dan dua desa mewakili kawasan

dataran rendah. Empat desa berbasis pantai pesisir, di mana masing-masing dua desa pertama berada di gugusan pulau Amhalau dan dua desa di kawasan pantai pulau Buru. Dua desa sampel mewakili satu kecamatan berbasis pegunungan yakni Wakakin dan Tifu. Setelah dilakukan pengecekan dan editing, daftar pertanyaan yang lengkap jawabannya ada 150 rumah tangga. Oleh karenanya data yang dianalisis hanya 150 rumah tangga, hasilnya dimuat pada Tabel 4.2.

Dari seluruh kepala keluarga miskin di Kabupaten Buru, diambil sampel rumah tangga miskin yang ada pada masing-masing kecamatan dan desa miskin. Berdasarkan Tabel 4.2, diketahui bahwa total rumah tangga miskin di sepuluh desa miskin tersebut berjumlah 861 rumah tangga miskin. Untuk memperoleh sampel secara proporsional di sepuluh desa tersebut dipergunakan metode "*proportional stratified random sampling*". Berdasarkan metode tersebut diperoleh distribusi untuk rumah tangga miskin sampel seperti tampak pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2
DAFTAR DESA SAMPEL, JUMLAH RUMAH TANGGA MISKIN
DAN RUMAH TANGGA SAMPEL

No	Desa Sampel	Jumlah Rumah Tangga (kk)		Jumlah Rumah Tangga Miskin Sampel (kk)
		Total	Miskin	
1	Sanleko	103	56	10
2	Nanlea	1430	139	24
3	Waipure	182	46	9
4	Wawanabaru	137	137	23
5	Waikatin	39	36	8
6	Tifu	116	58	10
7	Lena	238	109	18
8	Wamsisi	268	132	23
9	Ulima	211	97	16
10	Masahoi	133	56	9
Jumlah		1142	861	150

Sumber : Data Kabupaten Bura Dalam angka, diolah 2005

4.5 Jenis dan Sumber Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer untuk melengkapinya diperlukan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari tangan pertama, yaitu hasil wawancara dengan responden dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan. Data primer yang dikumpulkan meliputi data demografis, sosial, budaya dan ekonomi dari responden.

Data sekunder, adalah data yang diperoleh dari instansi pemerintah dan lembaga-lembaga sosial yang terkait dengan penelitian ini, seperti jumlah Badan Pusat Statistik, Dinas Kependudukan, pasar, bank, koperasi, lembaga pendidikan, puskesmas dan sebagainya seperti telah disebutkan. Data sekunder ini

dipergunakan untuk mendeskripsikan daerah penelitian, sehingga diperoleh gambaran yang lengkap dari obyek penelitian

Seperti telah disebutkan pada studi ini, data yang dipergunakan dalam analisis adalah data primer, datanya diperoleh dari hasil wawancara dengan responden yang terpilih. Data primer yang dikumpulkan meliputi data yang telah tertuang pada daftar pertanyaan, kemudian dipergunakan untuk mengukur variabel yang telah ditetapkan.

4.6 Definisi Operasional

Bagian ini mendefinisikan variabel-variabel yang digunakan untuk memperoleh persepsi dan konsistensi terhadap penggunaan variabel-variabel. Studi ini menggunakan empat variabel bebas, satu variabel antara dan satu variabel terikat, seperti telah dijelaskan pada halaman sebelumnya dalam bab ini.

Kemiskinan (Y), di dalam studi ini memakai konsep yaitu pendapatan keluarga yang mempunyai pendapatan di bawah garis kemiskinan (*poverty line*). Garis kemiskinan yang dipakai dalam studi ini adalah menurut kriteria kebutuhan kalori rata-rata perhari per penduduk, yaitu sebesar 2500 kalori (minimal) setiap 360 kalori ekuivalen dengan 100 gram beras giling, maka setiap hari setiap penduduk memerlukan \pm 6,944 ons beras. Harga beras sedang pada saat penelitian dilakukan sebesar Rp 3.000,- per Kg, sehingga kebutuhan minimum hidup per hari adalah Rp 1.944,- dikalikan jumlah hari atau per tahun sebesar Rp 780.000,- dikalikan jumlah anggota keluarga. Ukuran variabel kemiskinan adalah rasional, karena berupa angka mutlak, yaitu pendapatan keluarga per tahun dalam rupiah.

Modal (X_1) adalah barang modal yang dipergunakan di dalam usaha keluarga, dapat berupa peralatan (cangkul, parang, perahu) dan uang. Peralatan dinilai dengan harga jual, dengan demikian modal dinilai dalam rupiah, nilainya penjumlahan antara harga barang dengan uang modal.

Kualitas sumber daya manusia adalah kualitas tenaga kerja yang ada pada keluarga dinyatakan dengan pendidikan (X_2), diukur dengan ukuran skala rasio, bila tidak mengenyam pendidikan tidak sekolah bernilai 0, pernah di pondok dinilai 1, tidak tamat SD bernilai 2, tamat SD dan pernah kursus keterampilan 4, pernah SLTP dinilai 5, pernah SLTP dan kursus ketrampilan dinilai 6 dan tamat SLTP dinilai 7.

Budaya (X_3) adalah kebiasaan dan sikap hidup kepala keluarga terhadap hidup miskin, diukur dengan skala interval kemudian dirata-ratakan.

Penyakit (X_4) adalah banyaknya jenis penyakit yang diderita kepala keluarga dan anggotanya selama satu tahun, dihitung dalam skala rasio, untuk menentukan penyakit dideteksi dengan tanda-tanda yang dirasakan penderita, tanda-tanda ini telah dimintakan informasi dan dinas kesehatan kabupaten.

Fasilitas umum (Z) adalah banyaknya fasilitas yang disediakan pemerintah dan keluarga menggunakan fasilitas tersebut, diukur dengan banyaknya fasilitas yang digunakan oleh keluarga: fasilitas tersebut misalnya pasar, jalan raya, listrik, PDAM, lembaga pendidikan, lembaga perkreditan, puskesmas.

4.7 Metode Pengumpulan Data

Dalam setiap penelitian diperlukan kemampuan memilih dan menyusun teknik serta alat pengumpul data yang relevan, di samping diperlukan dalam kecermatan memilih data, perlu dipilih juga orang yang mengumpulkan data, yaitu pewawancara.

Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Pengamatan, secara langsung (*survey*), dimaksudkan untuk memperoleh Gambaran secara langsung terhadap permasalahan yang ada, obyek penelitian, sekaligus mendapatkan dokumen-dokumen terkait dengan penelitian.
- 2) Wawancara, dalam penelitian ini dipakai wawancara langsung kepada responden dengan menggunakan daftar pertanyaan, tujuannya adalah untuk menggali informasi yang telah disusun pada daftar pertanyaan atau dalam dokumen yang ada
- 3) Kuesioner, digunakan daftar pertanyaan yang telah disusun secara cermat untuk bahan wawancara dengan responden. Daftar pertanyaan ini dimaksudkan untuk memperoleh data secara tertulis, sedangkan item dalam daftar pertanyaan disusun berdasarkan keperluan data yang diinginkan.
- 4) Dokumentasi, adalah pengumpulan data dan keterangan yang diperoleh pada lokasi penelitian maupun instansi terkait, misalnya : data tentang fasilitas publik, profit desa dan lain-lain.

Setelah hasil wawancara terkumpul, dilakukan pengolahan data. Pertama daftar pertanyaan yang telah tersi diedit untuk melihat ada tidaknya kesalahan. Setelah itu hasilnya dimasukkan ke dalam Tabel induk untuk selanjutnya diolah, untuk melakukan pengujian-pengujian dan analisis. Agar supaya dapat menerangkan keadaan daerah penelitian dipergunakan Tabel frekuensi dan tabulasi silang (*cross tabulating*)

4.8 Metode Analisis

4.8.1 Uji Validitas dan Reliabilitas

Benar tidaknya suatu data sangat penting keberadaanya. Hal ini tergantung pada pengumpulan data. Sedangkan instrumen yang baik harus memiliki dua persyaratan penting yaitu *valid* dan *reliable*.

Sebuah instrumen dikatakan valid jika mampu mengukur apa yang diinginkan dan dapat mengungkap data dari variabel yang diteliti secara tepat. Tingkat validitas instrumen menunjukkan sejauh mana data yang terkumpul tidak menyimpang dari variabel tentang gambaran yang dimaksud.

Secara statistik, uji validitas dilakukan dengan teknik *Korelasi Product Moment* dari masing-masing item terhadap nilai total faktor (Singarimbun dan Effendi, 1996).

$$R = \frac{n \sum (xy) - (\sum x) (\sum y)}{\sqrt{[n \sum x^2 - (\sum x)^2] [n \sum y^2 - (\sum y)^2]}}$$

Keterangan :

- r = reliabilitas
- x = nilai setiap item
- y = total nilai untuk setiap variabel yang diteliti
- n = jumlah sampel

Biasanya syarat minimum untuk dianggap memenuhi syarat bila $r \geq 0,3$. Jadi apabila korelasi antara butir dengan skor total kurang dari 0,3 maka butir dalam instrumen tersebut dinyatakan tidak valid.

Reliabilitas pada dasarnya menunjukkan tingkat ketepatan/keajegan alat dalam mengungkapkan gejala tertentu dari sekelompok individu, Nawawi (1985: 139). Kata-kata lain untuk reliabilitas (keandalan) adalah : kemantapan, konsisten, prediktibilitas/keteramalan dan kejituan/ketepatan alias akurasi. Alat ukur yang

dimaksud untuk menunjukkan sejauh mana alat ukur dapat dipercaya. Sehingga hasil pengukuran tetap konsisten bila dilakukan pengukuran ulang terhadap gejala yang sama dengan alat ukur yang sama pula.

Untuk uji reliabilitas ini digunakan Teknik *Alpha Cronbach* (Arikunto, 1996:36), dimana suatu instrumen dapat dikatakan handal (*reliable*) bila koefisien keandalan atau alpha 0,6 atau lebih besar.

$$r_1 = \left\{ \frac{k}{k-1} \right\} \left\{ 1 - \left(\frac{\sum \alpha_i^2}{\tau^2} \right) \right\}$$

Keterangan :

- r_1 = reliabilitas instrumen
- k = banyaknya butir pertanyaan
- $\sum \alpha_i^2$ = jumlah varian butir
= $\left[\frac{\sum^2 - \{(\sum)^2 : n\}}{n} \right]$
- τ^2 = variabel total
= $\left[\frac{\sum^2 \text{ skor total} - \{(\text{skor total})^2 : n\}}{n} \right]$

4.8.2 Analisis Jalur (Path Analysis)

Setelah Kuesioner terkumpul, tahap selanjutnya adalah mengolah data. Pertama daftar pertanyaan diedit, diteliti lembar jawabannya, dipisahkan daftar pertanyaan yang lengkap dan sempurna dan yang ada kesalahan. Daftar pertanyaan yang ada kesalahan didrop tidak dipergunakan.

Daftar pertanyaan yang benar datanya dimasukkan pada tabel induk, setelah dianggap benar pada pengolahan tabel induk, kemudian diproses analisis. Teknik analisis mempergunakan *Path Analysis*, dengan menggunakan program software AMOS 4.01. Setelah dilakukan editing data, seperti telah disebutkan dimuka jumlah data responden yang dapat dianalisis sebanyak 150 sampel dari 200 rencana responden

Alasan menggunakan *Path Analysis* atau analisis jalur adalah dengan alat ini dapat dijelaskan tata hitung antar variabel dan hubungan mana yang perlu diperhitungkan karena dianggap penting. Analisis jalur ini memungkinkan dilakukannya analisis terhadap serangkaian hubungan secara simultan sehingga memberikan efisiensi secara statistik.

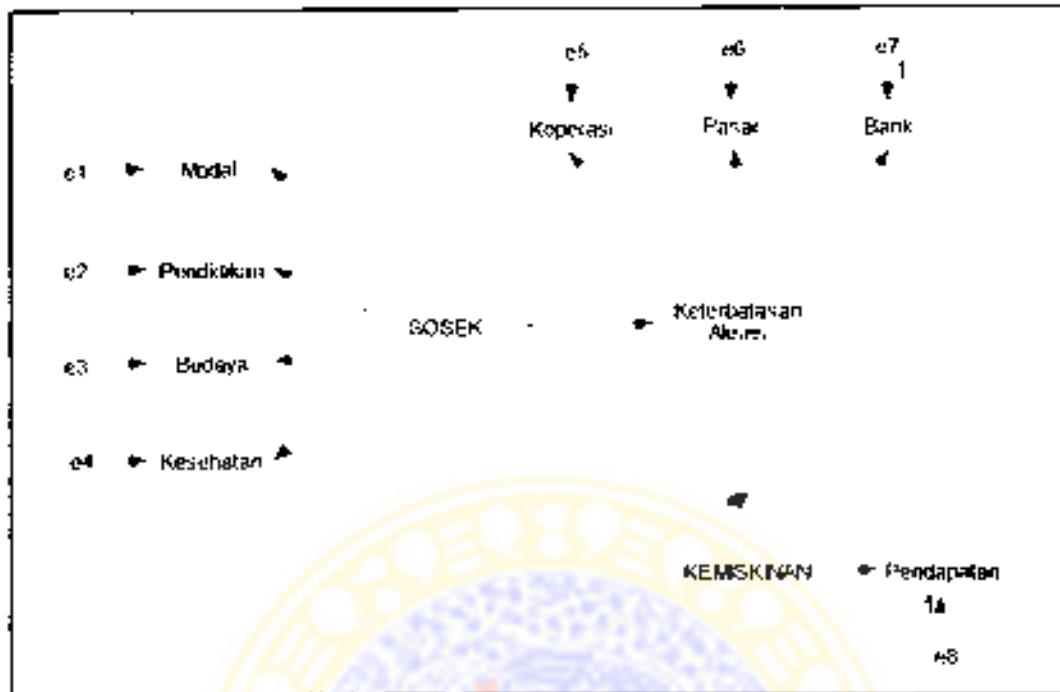
Pada studi ini analisis jalur digunakan untuk menganalisis data yang diperoleh karena dari model yang disusun terdapat keterkaitan hubungan antara sejumlah variabel yang dapat diestimasi secara simultan. Selain itu variabel dependen pada satu hubungan yang ada akan menjadi variabel independen pada hubungan selanjutnya.

Menurut Solimun, (2002:48-55) bahwa Dalam analisis jalur terdapat beberapa langkah sebagai berikut

1. Merancang model berdasarkan konsep dari teori.

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya diketahui bahwa: 1) variabel modal, pendidikan, budaya miskin dan tingkat kesehatan berpengaruh terhadap keterbatasan mengakses fasilitas; 2) variabel modal, pendidikan, budaya miskin, tingkat kesehatan dan keterbatasan mengakses fasilitas berpengaruh terhadap kemiskinan; dan 3) variabel modal, pendidikan, budaya miskin, tingkat kesehatan berpengaruh secara tidak langsung terhadap kemiskinan melalui keterbatasan mengakses fasilitas.

Berdasarkan hubungan antar variabel secara teoritis tersebut, dapat dibuat model alam bentuk diagram path seperti pada Gambar 4.1



Gambar 4.1 Model Path Analysis Penelitian
Sumber: Diolah dari Gambar 3.2

Model tersebut bisa dinyatakan dalam bentuk persamaan model struktural sebagai berikut

$$1) Z = \alpha_0 + \alpha_1 X_1 + \alpha_2 X_2 + \alpha_3 X_3 + \alpha_4 X_4 + \varepsilon_1$$

$$2) Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 Z + \varepsilon_2$$

2. Pemeriksaan terhadap asumsi yang melandasi. Asumsi yang melandasi analisis path adalah:

- 1) Di dalam model analisis path, hubungan antar variabel adalah linear dan aditif.
- 2) Hanya model rekursif dapat dipertimbangkan, yaitu hanya sistem aliran causal ke satu arah. Sedangkan pada model yang mengandung causal resiprokal tidak dapat dilakukan analisis path.

- 3) Variabel endogen minimal dalam skala ukur interval.
 - 4) *Observed variables* diukur tanpa kesalahan (instrumen pengukuran valid dan reliabel).
 - 5) Model yang dianalisis dispesifikasikan (diidentifikasi) dengan benar berdasarkan teori-teori dan konsep-konsep yang relevan.
3. Pendugaan parameter atau perhitungan koefisien path.
 4. Pemeriksaan validitas model.

Sahh tidaknya suatu hasil bergantung pada terpenuhi atau tidaknya asumsi yang melandasinya. Asumsi yang melandasi analisis path adalah :

- 1) Di dalam model analisis path, hubungan antar variabel adalah linier dan aditif.
- 2) Hanya model rekursif dapat dipertimbangkan, yaitu hanya sistem aliran causal ke satu arah. Sedangkan pada model yang mengandung causal resiprokal tidak dapat dilakukan analisis path.
- 3) Variabel endogen minimal dalam skala ukur interval.
- 4) *Observed variables* diukur tanpa kesalahan (instrumen pengukuran valid dan reliabel).
- 5) Model yang dianalisis dispesifikasikan (diidentifikasi) dengan benar berdasarkan teori-teori dan konsep-konsep yang relevan.

Dalam penelitian ini uji validitas akan menggunakan program SPSS versi 11.05.

5. Melakukan interpretasi hasil analisis

BAB 5

HASIL PENELITIAN

5.1 Deskripsi Daerah Penelitian

5.1.1 Sejarah, Luas dan Potensi Kabupaten Buru

Studi ini dilakukan di daerah Kabupaten Buru Provinsi Maluku. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, maka Kabupaten Buru dan Pulau-pulau sekitarnya telah ditetapkan menjadi Kabupaten Buru.

Secara astronomis Kabupaten Buru terletak antara 2° 25' – 3° 55' Lintang Selatan dan 121° 21' – 125° 21' Bujur Timur dengan batas-batas sbb:

Sebelah Utara	: Laut Seram
Sebelah Selatan	: Laut Banda
Sebelah Barat	: Laut Buru
Sebelah Timur	: Selat Manipa

Salah satu keunggulan yang menjadi sifat khusus Kabupaten Buru terletak pada kesuburan tanah dan letaknya yang sangat strategis dalam lafultintas perdagangan internasional yang dimulai jauh sebelum Indonesia merdeka yaitu pada tahun 1785 yang ditandai dengan dibangunnya benteng Bruyns oleh Serikat dagang Belanda, *Verenigde Oost Indische Compagnie* (VOC), di desa Kayeli Kabupaten Buru

Kesuburan tanah Kabupaten Buru mendorong T.J. Willer (ahli peneliti Belanda) pada tahun 1858 menerbitkan sebuah buku yang berjudul *Het Eiland Boeroe, zyne Exploitatie en Halfoersche Instellingen*. Willer yakin bahwa tanah di Kabupaten Buru jika didayagunakan dengan tepat sama suburnya dengan pulau Jawa. Dalam buku karangannya tersebut Willer menguraikan bahwa pulau ini berpotensi besar menghasilkan komoditi Pertanian dan Perkebunan, selain rempah-rempah. Menurut penelitiannya tanah Kabupaten Buru ini cocok untuk tanaman tembakau, kopi, merica, coklat dan sagu. Penemuan ini baru bisa dibuktikan seabad kemudian, tatkala sepeinggal wilayah Kabupaten Buru ditetapkan sebagai kawasan bagi pembuangan narapidana tahanan politik (tapol) yang sedang menjalani rehabilitasi. Kawasan seluas 3000 hektar kemudian dikembangkan sebagai lahan pertanian dan pemukiman. Warga dalam rehabilitasi (*inrehab*) itulah yang membuktikan tepatnya hasil penelitian tersebut.

Sifat khusus lainnya bahwa pada era perang dunia Ke-II, yaitu pada zaman pendudukan Jepang di Indonesia, Kabupaten Buru juga memiliki arti penting dalam sistem pertahanan keamanan saat itu, dimana Kabupaten Buru tepatnya disekitar Namlea, merupakan pangkalan transit pesawat-pesawat tempur Jepang yang terlibat perang dengan pasukan sekutu yang dipimpin oleh Amerika Serikat.

Wilayah Kabupaten Buru memiliki letak yang strategis dalam menjembatani Provinsi-Provinsi lain dengan Provinsi Maluku dengan 3 (tiga) pintu keluar, yakni Buru Utara Timur (Namlea) dan Buru Utara Barat (Fogi dan Pasir putih) merupakan pintu keluar ke Maluku Utara, Sulawesi Utara dan Sulawesi Tenggara. Buru Utara Barat (teluk bara) merupakan pintu keluar ke

kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara. Buru Selatan (leksula) merupakan pintu keluar ke Sulawesi Tenggara. Namun tiga pintu keluar tersebut belum didukung dengan fasilitas dermaga serta jaringan jalan, baik yang menghubungkan daerah-daerah sentra produksi dengan pintu-pintu keluar maupun yang berhubungan dengan daerah-daerah internal Kabupaten Buru.

Sejak Indonesia merdeka dan dibentuknya pemerintahan, termasuk Provinsi Maluku pada tahun 1945, Kabupaten Buru dengan luasnya wilayah sebesar 12.345 Km² terdiri dari beberapa pulau besar kecil seperti: (1) Pulau Buru, (2) Pulau Ambalau, (3) Pulau Pasir Putih, (4) Pulau Fogi, (5) Pulau Tomahu, dan (6) Pulau Oki, hanya terdiri dari dua Kecamatan yaitu Kecamatan Buru Utara dengan Ibu Kota Namlea dan Kecamatan Buru Selatan dengan Ibu Kota Leksula.

Dengan wilayah yang luas dihadapkan dengan terbatasnya pelayanan pemerintahan pada tingkat Kecamatan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat turut menentukan perkembangan kehidupan sosial ekonomi masyarakat Kabupaten Buru, terutama yang hidup dipulau terpencil dengan kondisi relatif tertinggal dibandingkan dengan daerah lain atau sekitarnya berdasarkan fungsi Inter spasial yang dicirikan oleh kondisi, antara lain tingkat kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat yang rendah, produktivitas lahan yang rendah, tingkat kerusakan lahan yang luas, atau keterbatasan infrastruktur dan sarana pendukung di bidang sosial, budaya, ekonomi dan perhubungan.

Menurut Kantor Statistik Provinsi Maluku bahwa tidak semua kawasan di Pulau Buru sudah tergolong maju, karena masih terdapat banyak kawasan atau

desa terpencil seperti; Walbele, Fogi, Biloru di Kecamatan Buru Selatan. Selasi, Ulima, Maswoy, Lumoy Kecamatan Buru Selatan Timur, Ilath, Waimorat, Batu Jungku Kecamatan Buru Utara Selatan, Sanleko Kecamatan Buru Utara Timur dan Waikeka Kecamatan Buru Utara Barat. Di Kabupaten Buru Kawasan terpencil bukan saja berada di pesisir pantai Kawasan Buru dan Ambalau tetapi, terutama di Kabupaten Buru masih terdapat bahagian terbesar dari penduduk asli yang tinggal di daerah pedalaman yang sangat terpencil.

Walaupun daerah ini relatif terpencil namun memiliki potensi yang sangat besar sebagaimana hasil penelitian dari Belanda pada tahun 1817. Dengan hasil penelitian itulah maka pada awal Orde Baru Kabupaten Buru dijadikan sebagai tempat pembuangan para tahanan politik G-30 S PKI sebanyak 10.000 orang pada tahun 1969. Dengan bertambahnya penduduk sejak tahun 1969 maka pada tahun 1973 terjadi penambahan satu Kecamatan di Buru Utara Barat.

Secara fisik Kabupaten Buru sangat dekat dengan Kota Ambon sebagai Ibu Kota Provinsi Maluku. Idealnya dengan kedekatan ini maka akan terjadi transmisi informasi dan berbagai kemudahan lainnya yang berdampak terhadap perkembangan Kabupaten Buru. Realitasnya tidak demikian karena setelah daerah ini dijadikan sebagai tempat rehabilitasi tahanan politik yang dimulai sejak tahun 1969 faktor politik yang dominan adalah pemberian status Daerah Koordinator Kabupaten Buru yang sama sekali tidak ada dalam Undang-undang tentang pemerintah daerah yang meliputi tiga bidang yaitu; adat, ekonomi, dan pendidikan. Pemberian status daerah ini ternyata sebuah keistimewaan simbolik. Demikian halnya di bidang keamanan idealnya penempatan kodim

berada pada daerah Kabupaten, namun karena keistimewaan tabanan politik maka kelompok ditempatkan di Kabupaten Buru

Penempatan kedua institusi itu sama sekali diluar aturan-aturan normal sehingga tidak membawa dampak positif yang cukup berarti bagi peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu para tokoh masyarakat mendesak kepada pemerintah Kabupaten Maluku Tengah agar dapat menambah satu kecamatan di wilayah bagian barat dan Buru Utara. Atas dasar pertimbangan-pertimbangan yang obyektif pada tahun 1973 pemerintah menambah satu Kecamatan di Kabupaten Buru dan semula dua kecamatan menjadi tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Buru Utara barat, Kecamatan Buru Utara Timur dan Kecamatan Buru Selatan

Sejalan dengan makin mantapnya konsolidasi pembinaan tabanan politik untuk dirchabilitir statusnya menjadi transmigran maka Lembaga Koordinator Pemerintahan Kabupaten Buru dan Kodim 1505 Buru dileburkan tanpa ada pertanggungjawaban sosial kepada masyarakat, dan inilah embrio lahirnya kemiskinan di Kabupaten Buru saat ini.

Sejalan dengan efora reformasi yang terbuka demikian luas dan merambah sampai ke daerah pedesaan maka masyarakat Kabupaten Buru yang selama ini merasakan adanya diskriminasi dan ketidakadilan memanfaatkan momentum tersebut untuk menuntut pemekaran menjadi Kabupaten walaupun dari berbagai segi persiapan infrastruktur maupun sumber daya manusia sesungguhnya masih jauh dari yang diharapkan

Kabupaten Buru yang walaupun secara natural memiliki sumber daya alam yang cukup baik di darat maupun laut, seperti, kayu, minyak kayu putih dan sumber daya lainnya, namun dirasakan adanya ketimpangan yang relatif sangat tinggi untuk Kabupaten Buru dibandingkan dengan Pulau-Pulau lainnya di Maluku, seperti Pulau Ambon, Seram, Tual, Makian. Di Kabupaten Buru sendiri terdapat ketimpangan kesejahteraan masyarakat yang relatif sangat merata sebagai hasil dari kebijakan pemerintah. Kebijakan yang tidak membesarkan putra daerah baik di bidang ekonomi, sosial, politik maupun pemerintahan merupakan bukti adanya ketidakberdayaan masyarakat Buru untuk ikut secara aktif dalam menyusun, melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya sendiri.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kaitan antara potensi daerah dengan tingkat kesejahteraan masyarakat di daerah yang bersangkutan sangat lemah. Tingginya kekayaan daerah tidak secara signifikan diikuti oleh tingkat kesejahteraan masyarakat yang tinggi pula. Dengan demikian terdapat kegagalan untuk merefleksikan kekayaan daerah ke dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu masyarakat lokal, khususnya penduduk asli sangat terkait erat dengan daerahnya, mengingat sentimen psikologis dan kultur mengatakan bahwa mereka adalah pewaris utama dari kekayaan alam yang terdapat di daerahnya.

5.1.2 Pemerintahan

Gambaran pada sub bab sebelumnya memperlihatkan adanya ketidakadilan dalam melaksanakan pembangunan yang mengakibatkan adanya

kesenjangan antar daerah, terutama dalam mempersiapkan berbagai pihak yang secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan jalannya pembangunan. Ketimpangan ini mendorong adanya tuntutan dari seluruh daerah yang dilandasi oleh kesadaran akan kurang berkembangnya kapasitas pembangunan daerah dan masyarakat karena kurang diberikannya kesempatan dan kekuasaan yang memadai terutama di bidang ekonomi dan sosial. Akibat dari sentralisasi yang berlebihan tersebut tidak saja mengakibatkan kesenjangan hubungan pemerintah pusat dan daerah yang lebar, tetapi juga rasa keadilan masyarakat di daerah yang selama ini terlupakan.

Diberlakukannya UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan diberikannya keleluasaan bagi daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri maka masyarakat Kabupaten Buru dengan dukungan pemerintah Provinsi Maluku dan berbagai pihak lainnya mendapatkan pengakuan sebagai Kabupaten. Langkah utama yang dilakukan adalah meningkatkan Pembangunan Subsektor Pembangunan Daerah dengan tujuan menciptakan keserasian laju pertumbuhan antar wilayah di daerah, yang meliputi perbaikan dan peningkatan sarana dan prasarana, peningkatan kemampuan aparatur pemerintah, serta peningkatan peran aktif masyarakat dalam pembangunan daerah guna lebih meningkatkan wujud otonomi yang nyata dan bertanggungjawab. Untuk itu, pemerintah daerah terus berupaya memantapkan pembangunan daerah, terutama ditujukan pada pembangunan wilayah-wilayah terpencil dan kritis disamping wilayah-wilayah yang sudah maju.

Untuk mencapai tujuan tersebut maka dalam kurun waktu yang relatif singkat pemerintah Kabupaten Buru menambah pemekaran Kecamatan dari tiga menjadi lima kecamatan dengan menambah dua Kecamatan dari tiga Kecamatan yang telah ada yaitu Kecamatan Wamsisi dan Kecamatan Waeapo. Dari berbagai kesadaran masyarakat tentang keteringgalan dan keterisolasian yang dirasakan selama ini maka dalam kurun waktu dua tahun kemudian masyarakat yang berada di berbagai desa menuntut adanya pemekaran baik pada tingkat desa maupun kecamatan sebagaimana disajikan pada Tabel 5.1 sebagai berikut.

Tabel 5.1
NAMA KECAMATAN, JUMLAH DESA/DUSUN
DI KABUPATEN BURU TAHUN: 2003

No.	Kecamatan	Ibu Kota	Jml Desa	Jml Dusun
1.	Namlea	Namlea	11	9
2.	Waplau	Waplau	9	5
3.	Air Buaya	Air Buaya	8	33
4.	Waeapo	Waenetat	17	40
5.	Batabual	Ilath	5	4
6.	Leksula	Leksula	14	14
7.	Ambalau	Lumoy	7	0
8.	Waesama	Wamsisi	7	5
9.	Kepala Madan	Biloro	8	6
10.	Namrole	Elfulu	8	8
	Total		94	124

Sumber : BKKBN Kabupaten Buru, 2003.

Tabel 5.1 menjelaskan bahwa telah terjadi perluasan jangkauan pelayanan masyarakat oleh pemerintah karena kecamatan di kabupaten Buru telah bertambah dari lima menjadi sepuluh. Demikian juga terdapat peningkatan status dusun menjadi desa. Penambahan jumlah Kecamatan dan Desa dimaksudkan untuk perpanjangan tangan perluasan pelayanan kepada masyarakat yang umumnya

miskin dan termasuk dalam kategori keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I yang yang tersebar hampir merata di seluruh di Kabupaten Buru.

Penambahan struktur pemerintahan Kecamatan dimaksudkan untuk lebih meningkatkan dukungan dan kemampuan dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat secara lebih efektif dan efisien. Realitasnya menunjukkan bahwa banyak Pemerintahan Kecamatan belum berfungsi sebagaimana mestinya, karena beberapa hal yaitu: (a) belum tersedianya fasilitas Kantor untuk melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan, (b) terbatasnya aparatur Pemerintahan baik jumlah maupun mutu, (c) belum tersedianya rumah atau perumahan Camat, (d) belum tersedianya fasilitas angkutan yang memadai, dan atau kendaraan operasional untuk tugas pemerintahan.

5.1.3 Kesehatan

Keistimewaan yang dirasakan masyarakat baik langsung maupun tidak langsung dari penempatan tahanan Politik di Buru bukan saja pada aspek keamanan dan pemerintahan tetapi juga aspek kesehatan Masyarakat Buru pada waktu-waktu tertentu mendapat kunjungan dari tim medis INREHAB untuk melakukan pengobatan masal secara Cuma-Cuma. Tim medis yang didatangkan khusus dari Jakarta bertugas di Pulau Buru untuk suatu kurun waktu tertentu pada lokasi tertentu.

Dengan berakhirnya penugasan Tim Medis maka embrio untuk membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan mengalami keterputusan yang panjang dihadapkan dengan sentralisasi pengelolaan program

sektoral di bidang kesehatan menjadi penyebab belum tersedianya pelayanan minimal di bidang kesehatan. Sejalan dengan keberadaan Kabupaten Buru sebagai salah satu kawasan yang tertinggal dan masih banyaknya rumah masyarakat yang tergolong miskin maka salah satu faktor penting yang menjadi penyebab terjadinya keadaan yang demikian adalah kekurangan tenaga kesehatan di daerah tertentu akibat eksodus/pindah tenaga kesehatan/medis baik antar kecamatan/kabupaten dalam Provinsi maupun luar Provinsi. Keadaan ini dapat mengakibatkan terjadinya peningkatan angka kesakitan, angka kematian bayi dan angka kematian kasar.

Sejalan dengan kewenangan otonom pada daerah Kabupaten, maka Pemerintah Kabupaten Buru menyadari sungguh bahwa persoalan utama di bidang kesehatan terletak pada keterbatasan prasarana dan sarana kesehatan baik jumlah, kualitas maupun penyebaran. Khusus untuk tenaga medis, telah terjadi kekurangan tenaga kesehatan di daerah tertentu akibat eksodus/pindah tenaga kesehatan/medis baik antar kecamatan/kabupaten dalam provinsi maupun luar provinsi. Untuk Pemerintah kabupaten Buru menaruh perhatian besar dengan mengalokasikan dana terhadap pembangunan subsektor kesehatan dengan tujuan meningkatkan derajat kesehatan dan kualitas hidup, meningkatkan jangkauan dan fasilitas pelayanan kesehatan, meningkatkan gizi kesehatan, mendorong peran aktif masyarakat dan dunia usaha dalam bidang kesehatan, meningkatkan kesadaran masyarakat untuk hidup sehat dan bersih, peduli terhadap lingkungan serta didukung dengan pembangunan permukiman dan perumahan yang layak.

Sasaran pembangunan subsektor kesehatan yang ingin dicapai adalah terselenggaranya pelayanan kesehatan yang makin merata dan bermutu di Kabupaten Buru sehingga terwujud manusia yang tangguh, sehat, cerdas, dan

produktif. Fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Buru telah didukung oleh fasilitas pelayanan program maupun tenaga pengelola di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa. Sarana pelayanan kesehatan di Kabupaten Buru dan jumlah tenaga program dapat dilihat pada Tabel 5.2 dan Tabel 5.3 berikut ini.

Tabel 5.2
KONDISI SARANA PELAYANAN KESEHATAN
DI KABUPATEN BURU TAHUN: 2003

No.	Nama	Jumlah
1.	Rumah Sakit tipe D	1 buah
2.	Puskesmas Rawat Inap	4 buah
3.	Puskesmas	6 buah
4.	Puskesmas Pembantu	46 buah
5.	Klinik KB	19 buah
6.	Posyandu	144 buah

Sumber : BKKBN Kabupaten Buru, 2003.

Tabel 5.3
TENAGA PELAYANAN KESEHATAN
DI KABUPATEN BURU TAHUN: 2003

No.	Nama	Jumlah
1.	Dokter Umum	7 orang
2.	Dokter Gigi	2 orang
3.	Perawat	39 orang
4.	Bidan	29 orang

Sumber : BKKBN Kabupaten Buru, 2003.

Penyediaan sarana dan prasarana kesehatan sebagaimana pada Tabel 5.2, di atas memperlihatkan adanya komitmen yang kuat dan pemerintah terhadap pembangunan kesehatan dengan tujuan meningkatkan derajat kesehatan dan kualitas hidup, meningkatkan jangkauan dan fasilitas pelayanan kesehatan, meningkatkan gizi kesehatan, mendorong peran aktif masyarakat dan dunia usaha dalam bidang kesehatan, meningkatkan kesadaran masyarakat untuk hidup sehat dan bersih, peduli terhadap lingkungan serta didukung dengan pembangunan permukiman dan perumahan yang layak. Dengan demikian sasaran pembangunan

subsektor kesehatan yang ingin dicapai adalah terselenggaranya pelayanan kesehatan yang makin merata dan bermutu di Kabupaten Buru sehingga terwujud manusia yang tangguh, sehat, cerdas, dan produktif

Sarana Puskesmas dan Puskesmas Pembantu walaupun tersedia di beberapa wilayah kecamatan namun belum merata dalam melayani kesehatan masyarakat. Selain itu, masih kurangnya tenaga medis (dokter dan bidan) pada beberapa wilayah kecamatan sehingga berdampak pada mutu sumber daya manusianya.

5.1.4 Kependudukan dan Keluarga Sejahtera

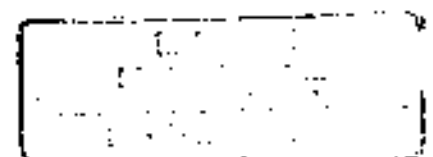
Kabupaten Buru memiliki sumber daya alam yang potensial baik di darat maupun laut namun belum dimanfaatkan secara optimal sehingga berpeluang bagi investor untuk menanamkan modalnya di berbagai sektor pengelolaan sumber daya alam seperti: pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan. Untuk memanfaatkan potensi tersebut maka penduduk merupakan salah satu sumber daya yang sangat dibutuhkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Sebagai Sumber Daya maka penduduk perlu dikembangkan agar potensi-potensi yang di miliki dapat dimanfaatkan secara optimal. Dalam perkembangannya, penduduk yang seharusnya menjadi sumber daya pendukung pembangunan sering sebaliknya justru menjadi beban berat pembangunan bagi pemerintah maupun pihak lainnya. Karena pertumbuhan penduduk yang begitu cepat dan tidak didukung dengan kemampuan yang dimiliki (Pendidikan dan Kesehatan) sehingga telah menempatkan penduduk pada permasalahan tersendiri.

Besarnya jumlah penduduk di Kabupaten Buru antara lain disebabkan karena tingginya laju pertumbuhan penduduk. Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Buru pada tahun 1970 - 1980 sebesar 2,10 %, dan pada tahun 1981 - 1990 meningkat menjadi 2,57 %, sedangkan untuk tahun 1991 - 2000 sedikit menurun menjadi 2,54 %. Dengan tingkat pertumbuhan sebesar itu maka pada tahun 2002 jumlah penduduk Kabupaten Buru sebanyak 120.995 jiwa yang tersebar secara merata pada berbagai Kecamatan dan desa dengan komposisi umur sebagaimana terdapat pada Tabel 5.4 sebagai berikut. Tabel ini juga menjelaskan tentang jumlah kepala keluarga yang berada di Kabupaten Buru yaitu sebanyak 27.696 kepala keluarga.

Jika dilihat dari laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Buru, maka angka sebesar 2,54 persen relatif tinggi dibandingkan dengan rata-rata Maluku maupun nasional. Tetapi jumlah penduduk yang ada dikaitkan dengan luas wilayah maka tidak menimbulkan masalah karena tingkat kepadatannya relatif rendah. Untuk itu kebijakan kependudukan di kabupaten Buru dalam jangka pendek harus lebih ditekankan pada aspek kualitas disamping kuantitas.

Kebijakan kependudukan haruslah diarahkan pada jumlah penduduk yang dapat dicukupi kebutuhan pokoknya oleh sumber daya alam yang dimanfaatkannya tanpa mengganggu keseimbangan suatu ekosistem di kabupaten Buru, dimana jumlah manusia yang dapat dilayani keperluan hidup secara layak oleh ruang, prasarana, sarana pemukiman, dan fasilitas pelayanan yang tersedia.



Tabel 5.4
DATA JUMLAH JIWA MENURUT KELOMPOK UMUR PER
KECAMATAN DI KABUPATEN BURU TAHUN: 2003

NO	KECAMATAN	JUMLAH KEPALA KELUARGA	JUMLAH ANGGOTA KELUARGA MENURUT KELOMPOK UMUR					JUMLAH
			0-4 TH	5-6 TH	7-15 TH	16 - 59 TH	60 TH KEATAS	
1	NAMUFA	5.492	3.842	1.468	5.542	13.884	980	25.716
2	WAPLATI	1.850	1.217	465	2.934	3.511	163	8.710
3	AIR BUAYA	4.048	2.222	1.169	3.739	9.794	485	17.414
4	WASAPU	6.955	2.797	1020	5.967	14.720	1.557	26.061
5	WASAMA	1.812	1.044	612	2.346	3.844	127	8.175
6	NANROJE	1.208	729	451	1.409	2.540	215	5.344
7	AMBALAI?	1.298	676	486	1.929	2.988	130	6.479
8	KATAPSAI	1.221	831	254	1.648	2.985	157	5.855
9	KEPALA MADAN	1.149	771	322	1.640	2.667	267	5.667
10	LEKSULA	2.663	1.323	614	3.191	5.939	712	11.579
	KABUPATEN	27.696	15.272	7.841	30.413	62.875	5.393	120.996

Sumber : BPS Kabupaten Buru, 2003.

Tabel 5.4, di atas menjelaskan bahwa dari 120.996 jiwa penduduk Kabupaten Buru berada dalam 27.696 rumah tangga terdapat 9.900 rumah tangga mempunyai tingkat kesejahteraan sosial ekonomi sangat rendah sehingga menjadi tantangan berat bagi pemerintah kabupaten untuk melaksanakan program Pembangunan Keluarga Sejahtera yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan ketahanan keluarga sebagai unit sosial dalam masyarakat.

Upaya meningkatkan kesejahteraan keluarga antara lain ditandai oleh meningkatnya kesadaran dan kemampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan dasar sosial dan psikologis. Selain itu kesejahteraan keluarga juga dicerminkan dengan meningkatnya peranan perempuan terutama ibu dalam proses pengambilan keputusan di tingkat keluarga. Meningkatnya ketahanan keluarga antara lain ditunjukkan oleh kemampuan keluarga dalam membina keluarga termasuk dalam membina kemampuan pengasuhan dan penumbuh kembang anak, pembinaan anggota remaja, dan keharmonisan keluarga.

Tabel 5.4 menunjukkan data jumlah jiwa berdasarkan kelompok umur di mana secara rata-rata jumlah jiwa usia 16-59 tahun atau usia kerja adalah yang terbanyak yaitu sebesar 62.875 orang atau lebih dari 50 %. diikuti penduduk usia 7-15 tahun yang berjumlah 30.415 orang

Penduduk usia kerja 10 tahun keatas di Indonesia sebagaimana diterapkan umumnya pada negara berkembang lainnya adalah fenomena walau kenyataan menyimpang dari batasan *International Labour Organisation* (ILO).

Penduduk usia kerja (10 tahun ke atas) di Kabupaten Buru pada tahun 2003 berjumlah 99.875 jiwa dan dari seluruh penduduk usia kerja tersebut, penduduk angkatan kerja sekitar 50 % dari penduduk usia kerja. Dari seluruh angkatan kerja tercatat 6.208 jiwa yang mencari kerja, itu berarti pengangguran terbuka di Kabupaten Buru adalah sekitar 13 %. Angka ini merupakan rasio antara pencari pekerjaan dan jumlah angkatan kerja. Jika dilihat penduduk 10 tahun keatas menurut lapangan usaha tercatat sebagian besar penduduk di Kabupaten Buru bekerja di sektor pertanian berjumlah kurang lebih 37.000 jiwa atau sekitar 80 %, selain sektor pertanian sektor jasa kemasyarakatan dan sektor industri pengolahan juga menyerap tenaga cukup berarti masing-masing sebesar 6 % dan 2 %.

Tabel 5.5
DATA JUMLAH KEPALA KELUARGA MENURUT TAHAPAN
KELUARGA SEJAHTERA PER KECAMATAN
DI KABUPATEN BURU TAHUN: 2003

NO	KECAMATAN	PRASEJAHTERA			KSL			KSH	KSHI	KSHI PLUS	JMG
		ALSI TK	ALSI NON TK	JML.	ALSI TK	ALSI NON TK	JMT				
1	NAMLEA	526	302	949	516	320	636	320	32	50	3931
2	WAPLAI	526	415	949	251	517	691	351	35	30	3867
3	AIRBUAYA	2408	303	2711	248	567	815	282	42	19	1850
4	WACAPO	3172	396	4068	505	509	1095	1761	390	51	7355
5	WATSAMA	616	170	826	346	319	665	340	37	6	1863
6	NAMBOLE	629	140	769	274	98	372	38	19	9	1267
7	AMBALAI	457	107	544	475	182	654	156	50	1	1407
8	BALAHUAI	635	40	673	192	24	216	315	87	15	1359
9	KEPALA MADAN	2357	487	317	76	69	685	68	5	1	14827
10.	LEKSULA	682	488	1172	447	530	977	346	308	39	2862
	KABUPATEN	9696	3724	13674	3577	3147	8724	5290	1451	259	30948

Sumber : BPS Kabupaten Buru, 2004

Tabel 5.5 menunjukkan data jumlah keluarga berdasarkan tahapan keluarga sejahtera. Dari Tabel 5.5 terlihat bahwa keluarga pra sejahtera terbanyak terjadi pada kecamatan Wacapo, dan 7355 kepala keluarga sebanyak 3172 kepala keluarga adalah keluarga pra sejahtera, diikuti kecamatan Air Buaya sebanyak 2408 keluarga pra sejahtera.

5.1.5 Pendidikan

Pendidikan adalah salah satu aspek penting untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang berkualitas sangat tergantung dari sumber daya manusia sedangkan sumber daya manusia yang berkualitas sangat tergantung pada pendidikan bangsa itu sendiri. Pembangunan pendidikan di Kabupaten Buru Provinsi Maluku diarahkan untuk meningkatkan harkat dan martabat serta kualitas sumber daya manusia Indonesia dan memperluas serta meningkatkan pemerataan

kesempatan memperoleh pendidikan termasuk di daerah terpencil, dengan memberikan perhatian khusus kepada peserta didik yang berasal dari keluarga yang kurang mampu dan penyandang cacat. Sasaran pembangunan pendidikan yang ingin diwujudkan adalah pemerataan dan perluasan pendidikan dasar dalam menunjang program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun serta meningkatkan mutu pendidikan pada semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan terutama pendidikan keahlian dan kejuruan yang disesuaikan dengan tuntutan pembangunan di daerah.

Untuk mencapai sasaran pembangunan subsektor pendidikan tersebut, maka sampai dengan tahun 2003 telah dilaksanakan program pembinaan pendidikan dasar dan prasekolah, program pendidikan menengah, program pendidikan tinggi. Gambaran umum mengenai pendidikan di Kabupaten Buru dapat dilihat pada Tabel 5.6 jumlah gedung sekolah selama tahun 2003/2004 pada tingkat Taman Kanak-Kanak sebanyak 9 buah, sekolah dasar 167 buah, SLTP 32 buah dan SLTA 16 buah.

Tabel 5.6
JUMLAH SEKOLAH, MURID, GURU DAN LULUSAN MENURUT
TINGKAT PENDIDIKAN DI KABUPATEN BURU TAHUN 2003

No.	Tingkat Pendidikan	Sekolah	Murid	Guru	Lulusan
1.	Taman Kanak-Kanak	9	324	16	171
2.	Sekolah Dasar				
	- SD	159	23.821	1.078	2.623
	- Madrasah Ibtidayah	8	788	47	57
3.	Sekolah Lanjutan Pertama				
	- SLTP	26	5.867	313	1.662
	- Madrasah Tsanawiyah	6	556	74	143
4.	Sekolah Lanjutan Atas				
	- SLTA	15	4.150	254	882
	- Madrasah Aliyah	1	108	8	22

Sumber : BPS Kabupaten Buru, 2003

Pembangunan pendidikan di Kabupaten Buru Provinsi Maluku diarahkan untuk meningkatkan harkat dan martabat serta kualitas sumber daya manusia Indonesia dan memperluas serta meningkatkan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan termasuk di daerah terpencil, dengan memberikan perhatian khusus kepada peserta didik yang berasal dari keluarga yang kurang mampu dan penyandang cacat.

Sasaran pembangunan pendidikan yang ingin diwujudkan adalah pemerataan dan perluasan pendidikan dasar dalam menunjang program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun serta meningkatkan mutu pendidikan pada semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan terutama pendidikan keahlian dan kejuruan yang disesuaikan dengan tuntutan pembangunan di daerah.

5.1.6 Potensi Ekonomi

5.1.6.1 Pertanian

Pembangunan pertanian di Kabupaten Buru diarahkan untuk membangun sistem usaha tani guna meningkatkan kapasitas produksi dan ketersediaan pangan, meningkatkan taraf hidup petani melalui pengembangan usaha pertanian dengan wawasan agrobisnis, meningkatkan produksi bahan pangan pada sentra-sentra produksi dalam rangka mencapai ketahanan pangan Kabupaten Buru dan wilayah Maluku, dan mendorong pembangunan ekonomi pedesaan melalui pengembangan sistem usaha tani.

Dalam upaya mencapai tujuan tersebut maka strategi pembangunan subsektor pertanian adalah:

- a. Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian melalui penerapan teknologi tepat dan spesifik lokasi, pengembangan pelayanan sarana produksi dan permodalan pertanian, pelayanan perlindungan tanaman, pelayanan mekanisasi pertanian, pelayanan perbenihan, pelayanan informasi dan penyuluhan teknis.
- b. Pemanfaatan dan perluasan usaha pertanian di bidang penanganan pasca panen, pengolahan hasil pertanian dan pemasaran dengan memperhatikan potensi dan keragaman keunggulan sumberdaya lokal, kondisi sosial budaya setempat serta kelestarian lingkungan.

Pengembangan kualitas sumber daya manusia pertanian, khususnya dalam pengetahuan dan ketrampilan berusaha tani dengan wawasan agribisnis, antara lain melalui pendidikan, pelatihan dan penyuluhan pertanian. Pertanian tanaman pangan di Kabupaten Bunu selama tahun 2003 tercatat padi sawah 12.000 dengan luas panen 4000 Ha dan rata-rata produksi 30,0 kwintal per hektar, sedangkan produksi padi lading 7.015 ton dengan luas panen 5.518 Ha dan rata-rata produksi 13,60 kwintal per hektar.

Sementara produksi jenis komoditi tanaman pangan lain pada tahun 2003 antara lain jagung 1.082 ton, ubi kayu 2.550 ton, ubi jalar 925 ton, kacang kedele 856 ton, kacang hijau 320 ton dan kacang tanah 534 ton dan sayur-sayuran 419,86 ton.

Table 5.7 menjelaskan bahwa petani belum memanfaatkan lahan pertanian yang ada secara optimal karena lahan yang baru dimanfaatkan sebesar 11 308,36 hektar dari luas lahan potensial sebesar 39.000 hektar. Pemanfaatan lahan

pertanian didominasi untuk komoditi padi sawah dan padi gogo dengan luas lahan lebih dari separuh luas lahan yang ada. Demikian juga dengan produksi berbagai komoditi pertanian yang pada tahun 2003 sebanyak 25.255,17 ton.

Tabel 5.7
JENIS KOMODITI, LUAS AREA DAN PRODUKSI PERTANIAN
DI KABUPATEN BURU TAHUN: 2003

No	Komoditi	Luas Area (Ha)	Produksi (Ton)
1.	Padi Sawah	4.000,00	12.600,00
2.	Padi Gogo	4.916,00	6.685,80
3.	Hotong	5,00	10,00
4.	Kacang Tanah	541,49	541,49
5.	Kacang Hijau	329,93	329,93
6.	Jagung	541,00	1.082,00
7.	Kacang Kedelai	865	865,00
8.	Ubi Kayu	78,49	2.354,70
9.	Ubi Jalar	31,45	786,25
Total		11.308,36	25.255,17

Sumber Dinas Perkebunan Kab. Buru 2003

5.1.6.2 Perkebunan

Sub sektor perkebunan merupakan sub sektor yang strategis dan memiliki keunggulan komperatif dalam meningkatkan pendapatan masyarakat maupun struktur perekonomian Kabupaten Buru. Hal ini dilatarbelakangi oleh asumsi bahwa hampir seluruh masyarakat Kabupaten Buru memiliki lahan untuk pengembangan usaha tersebut. Luas lahan potensial untuk pengembangan usaha Tanaman Perkebunan di Kabupaten Buru sebesar 83.000 Ha dan baru dimanfaatkan sebesar 20.725 Ha atau sebesar 26,50 persen untuk berbagai tanaman perkebunan seperti, Kelapa, cengkik, Kakao (Coklat) Pala, Jambu Mete, dan Kopi. Pemanfaatan lahan yang ada untuk perkebunan rakyat yang diusahakan secara tradisional. Sedangkan sisanya seluas 61.000 Ha atau sebesar 73,50 persen

belum dimanfaatkan sehingga berpeluang besar dan memungkinkan pemilik modal untuk menanamkan modalnya di sektor perkebunan

Berdasarkan potensi yang ada maka pengembangan perkebunan di Kabupaten Buru diarahkan pada upaya peningkatan produksi dan produktivitas dalam rangka peningkatan pendapatan dan taraf hidup petani, peningkatan ekspor serta perluasan kesempatan dan berusaha. Upaya peningkatan produksi perkebunan di Kabupaten Buru ditekankan pada perkebunan rakyat melalui diversifikasi, intensifikasi, ekstensifikasi, rehabilitasi terhadap tanaman perkebunan rakyat.

Tabel 5.8
JENIS KOMODITI, LUAS AREAL DAN PRODUKSI PERKEBUNAN
DI KABUPATEN BURU TAHUN: 2003

No	Komoditi	Kep. Keluarga	Luas Areal	Produksi
1	Kelapa	8.991	9.140,9	8.609,10
2	Kakao	8.348	5.553,4	4.564,00
3	Cengkeh	5.412	4.482,1	4.382,30
4	Jambu Mete	1.435	1.143,9	964,90
5	Kopi	519	95,1	68,83
6	Pala	593	299,6	266,00
	Jumlah	25.100	20.725	18.855,13

Sumber Dinas Perkebunan Kab. Buru 2003

Hasil tanaman perkebunan yang dominan di Kabupaten Buru pada tahun 2003 adalah kelapa, kakao, cengkeh, jambu mete, pala dan kopi yang masing-masing memproduksi sebanyak 8.609,10 Ha, 4.564,00 Ha, 4.382,30 Ha, 964,90 Ha, 266,00 Ha dan 68,83 Ha

5.1.6.3 Peternakan

Tujuan pembangunan subsektor peternakan di Kabupaten Buru diarahkan pada upaya peningkatan populasi dan produksi hasil ternak dalam rangka peningkatan gizi protein hewani, peningkatan pendapatan dan taraf hidup peternak, perluasan kesempatan kerja dan berusaha disamping sebagai penyediaan bahan baku industri. Dalam rangka pencapaian tujuan tersebut maka pembangunan subsektor peternakan diupayakan melalui diversifikasi, intensifikasi, ekstensifikasi dan rehabilitasi peternakan.

Usaha peternakan yang memiliki prospek untuk dikembangkan adalah pengembangan sarana produksi (bibit makanan ternak), usaha budidaya, usaha pasca panen (pemotongan dan pengolahan) dan pemasaran. Usaha peternakan memiliki prospek yang luas karena didukung dengan ketersediaan lahan kering berupa padang penggembalaan peternakan seluas 116.651 Ha yang tersebar secara merata di seluruh Kecamatan. Besarnya luas lahan yang belum dimanfaatkan berpeluang besar dan memungkinkan pemilik modal untuk menanamkan modalnya di sektor peternakan.

Usaha peternakan di Kabupaten Buru umumnya merupakan peternakan rakyat yang masih bersifat tradisional namun dengan adanya usaha pemerintah untuk memberikan bimbingan, penyuluhan dan sarana melalui instansi/dinas, diharapkan dapat memberikan dorongan kepada masyarakat untuk lebih mengembangkan usahanya sejalan dengan perkembangan teknologi. Populasi ternak pada tahun 2003 di Kabupaten Buru mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2002

Persentase kenaikan masing-masing : sapi 20,87%, kerbau 44,94%, kambing 28,10%, babi 0,03%, kuda 14,60%, unggas terdiri dari 269,68 % itik dan 272,18% ayam buras. Masyarakat untuk lebih meningkatkan usahanya sejalan dengan perkembangan teknologi.

5.1.6.4 Perikanan

Wilayah perairan Kabupaten Buru seluas 3 326,44 Km² serta garis pantai sepanjang 394,5 km² memiliki potensi sumber daya hayati laut yang cukup besar. Dari keanekaragaman jenis yang sangat berpotensi untuk dikembangkan sebagai penghasil devisa adalah jenis ikan Pelagis besar, pelagis kecil, ikan demersal, ikan karang, udang, kepiting, bakau dan lain-lain. Dalam rangka pemanfaatan dan pengembangan sumber daya perikanan di Kabupaten Buru, maka tujuan pembangunan subsektor perikanan di arahkan pada upaya peningkatan produksi dan mutu hasil perikanan serta pengembangan usaha perikanan dalam rangka memberdayakan usaha ekonomi rakyat.

Untuk mencapai tujuan dimaksud maka sasaran pembangunan subsektor perikanan adalah terwujudnya pembangunan perikanan yang handal, mampu memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat, peningkatan pendapatan dan taraf hidup nelayan, peningkatan pemasaran khususnya ekspor dan penerimaan devisa, peningkatan gizi masyarakat serta perluasan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha dan mendorong pertumbuhan industri dalam negeri serta menunjang pembangunan daerah.

Luasnya wilayah laut Kabupaten Buru yang didukung dengan tersedianya berbagai jenis ikan dan bukan ikan memberi peluang yang cukup besar bagi para investor untuk menanamkan modal dan mengembangkan usaha perikanan

Kabupaten Buru jumlah nelayan pada tahun 2003 sebanyak 2.961 dengan operasi perikanan menggunakan motor kapal 518 orang, perahu tanpa motor 974 orang terdiri dari jakung 1.781, perahu kecil 184 orang, perahu sedang 108 orang sedangkan yang menggunakan perahu besar adalah 39 orang.

5.1.6.5 Kehutanan

Berdasarkan Peta Kawasan Hutan dan Perairan, luas kawasan hutan di Kabupaten Buru adalah 633.061 Ha yang terdiri dari hutan lindung 155.396 Ha, hutan suaka alam 8.816 Ha, hutan produksi terbatas 333.452 Ha, hutan produksi tetap 159.678 Ha, dan hutan konversi seluas 175.717 Ha. Berdasarkan potensi sumberdaya alam hutan tersebut, maka tujuan pembangunan subsektor kehutanan di Kabupaten Buru diarahkan pada usaha peningkatan produksi hasil hutan dalam rangka peningkatan penguasaan hutan produksi, penyempurnaan tata guna hutan serta menjaga kelestarian fungsi dan kemampuannya dalam perlindungan dan pelestarian alam.

Dibhat dari luas hutan yang ada dan yang telah dimanfaatkan maka cukup besar peluang bagi investor untuk dapat mempertimbangkan potensi yang ada di Kabupaten Buru guna menanamkan modalnya pada sub-sektor kehutanan

5.1.6.6 Pertambangan

Tujuan pembangunan sub sektor pertambangan Kabupaten Buru diarahkan pada upaya untuk peningkatan produksi, pemanfaatan seoptimal mungkin kekayaan tambang bagi pembangunan daerah, peningkatan lapangan kerja dan kesempatan berusaha dengan tetap memperhatikan kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup. Untuk mencapai tujuan dimaksud maka sasaran pembangunan pertambangan adalah mengembangkan dan penganekaragaman produksi bahan tambang baik untuk memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha serta dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, pengendalian pengelolaan air bawah tanah serta bahan galian golongan C, meningkatkan sumberdaya manusia dan usaha pertambangan daerah, pembinaan dan pengendalian pertambangan tanpa izin dan peningkatan sistem informasi geografi.

Kabupaten Buru memiliki potensi pertambangan yang cukup besar. Jenis tambang yang dapat dikembangkan adalah minyak bumi di Buru Selatan, Emas di Wacuren Buru Selatan, Pasir Kwarsa, granit, grafit, felspar, batuan sabak, batuan sekis, Batu Gemping, Batu Apung, Molibdonit, Mangan. Kesemua potensi ini belum dimanfaatkan secara optimal sehingga berpeluang untuk dikembangkan oleh investor.

5.1.6.7 Industri

Sektor industri yang merupakan salah satu sektor strategis dalam pembangunan ekonomi daerah diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah, menciptakan lapangan kerja dan berusaha, mendorong pembangunan daerah, meningkatkan serta pemerataan pendapatan yang pada akhirnya dapat

meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Tujuan pembangunan sektor industri adalah mewujudkan iklim usaha yang kondusif untuk berkembang secara sehat, meningkatkan kontribusi Industri Kecil dan menengah secara nyata dalam ekonomi nasional/daerah dan meningkatkan efisiensi produksi dan mutu produksi IKM.

Untuk mencapai tujuan dimaksud, maka sasaran pembangunan sektor industri adalah pengembangan industri dasar, industri kecil dan menengah yang memiliki daya saing tinggi yang berorientasi ekspor dengan memanfaatkan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan IPTEK, pengembangan industri yang memiliki jangkauan strategis dan mempunyai nilai tambah khususnya industri maritim baik yang berskala besar, menengah dan kecil maupun industri rumah tangga, serta mengembangkan wirausaha yang kuat dan mandiri.

Berdasarkan potensi sumber daya alam yang dimiliki Kabupaten Buru baik di darat maupun laut dapat menjadi pertimbangan yang ekonomis dan menguntungkan untuk mengembangkan berbagai industri yang berskala besar, sedang maupun kecil.

5.1.6.8 Perdagangan

Pembangunan subsektor perdagangan di Kabupaten Buru bertujuan untuk mendukung kelancaran penyaluran arus barang dan jasa, memenuhi kebutuhan pokok rakyat, mendorong pembentukan harga yang wajar, meningkatkan peranan ekspor non migas, mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan, menciptakan lapangan usaha, perluasan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat, menciptakan dan mempertahankan stabilitas ekonomi dalam mengendalikan laju inflasi.

Untuk mencapai tujuan tersebut maka sasaran pembangunan subsektor perdagangan Kabupaten Bunu dititik beratkan pada :

- a) mengembangkan perdagangan dalam negeri atau daerah untuk menjamin kelancaran arus barang dan jasa melalui pemantapan pengadaan dan penyaluran guna membentuk harga yang sesuai, memperluas pasar hasil-hasil produksi daerah dalam rangka peningkatan pendapatan produsen;
- b) melindungi kepentingan konsumen serta mendorong dan membantu pedagang/pengusaha kecil melalui penciptaan iklim yang mendukung peningkatan kemampuan berusaha;
- c) meningkatkan ekspor yaitu dengan diversifikasi baik melalui diversifikasi produk maupun negara tujuan ekspor dan meningkatkan promosi perdagangan baik dalam rangka kerja sama bilateral, regional maupun multilateral, serta mengendalikan import dengan kebijaksanaan yang tidak bertentangan dengan kesepakatan-kesepakatan internasional.

5.2 Deskripsi Variabel

Telah disebutkan pada Bab 4, bahwa variabel bebas pada studi ini adalah terdiri dari : modal, pendidikan, budaya miskin, dan penyakit. Satu variabel *intervening* yaitu keterbatasan mengakses fasilitas, dan Variabel terikatnya berupa pendapatan keluarga miskin Pada sub bab ini didiskripsikan masing-masing variabel.

5.2.1 Modal

Modal adalah salah satu indikator yang mencerminkan kondisi kehidupan masyarakat yang menjadi subjek penelitian ini. Dari 150 responden (kepala keluarga) penduduk miskin sebesar Rp 544.000,- sedang modal terbesarnya senilai Rp 1.372.000,-. Dengan demikian rata-rata modal yang dimiliki oleh keluarga miskin di kabupaten ini adalah sebesar Rp 882.020,- dengan jumlah responden 150 orang. Distribusi kepemilikan modal dari responden disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.9
KEPEMILIKAN MODAL RESPONDEN

No	Interval Modal Yang Dimiliki	Frekuensi	Persentase
1	< 600.000	9	6 %
2	600.000 – 700.000	12	9 %
3	700.000 – 800.000	24	16 %
4	800.000 – 900.000	78	52 %
5	900.000 – 1.000.000	19	12 %
6	> 1.000.000	8	5 %
	Jumlah	150	100 %

5.2.2 Pendidikan

Tingkat pendidikan merupakan salah satu variabel yang diteliti, apakah variabel ini berpengaruh terhadap kemiskinan atau tidak. Kurang lebih 62,71 % responden penelitian, paling tinggi tingkat pendidikannya menyatakan pernah sekolah tingkat dasar tetapi tidak tamat, kurang lebih 34,74 % tamat sekolah dasar dan sisanya 2,55 % tamat sekolah lanjutan pertama (SLTP)

Tabel 5.10
TINGKAT PENDIDIKAN RESPONDEN

No	Tingkat Pendidikan	Frekuensi	Persentase
1	Tidak tamat SD	52	35 %
2	SD	78	52 %
3	SLTP	16	11 %
4	SMU	4	2 %
5	DIPLOMA	-	-
6	SARAJANA	-	-
	Jumlah	150	100 %

5.2.3 Budaya Miskin

Anne Booth (1996:11) dalam studinya masalah kemiskinan di negara terbelakang menyatakan bahwa salah satu penyebab orang miskin sulit untuk maju adalah adanya budaya miskin dari bangsa itu sendiri. Adanya pamco di kalangan orang miskin, seperti "pasrah pada Allah", "Hidup Ini Apa Adanya", "Tidak Usah Berusaha Keras, Semua Sudah Diatur Yang di Atas", "Kita Memang Sudah Ditakdirkan Miskin", dan lain sebagainya.

Untuk melihat hal tersebut pada studi ini diajukan pertanyaan kepada responden, yaitu :

1. Apakah dengan pendapatan Saudara yang relatif rendah ini Saudara tidak berusaha untuk bekerja lebih giat lagi ?
2. Apakah Saudara akan berusaha merubah pekerjaan (usaha) yang sekarang, agar supaya pendapatan Saudara lebih banyak lagi ?
3. Apakah Saudara tidak ingin pindah tempat tinggal untuk mencari penghidupan yang lebih baik lagi ?
4. Apabila Saudara diberi pinjaman uang, akan Saudara pergunakan untuk usaha apa ?

Jawaban dari empat pertanyaan tersebut ada tiga, intinya adalah : (1) tidak ada usaha apapun, atau sudah nasibnya, sudah ditakdirkan miskin, (2) ada harapan untuk usaha lebih baik lagi dan (3) akan bekerja keras untuk memperbaiki kehidupan. Jawaban tersebut dijumlah kemudian dibuat dirata-rata.

Jawaban dari responden rata-rata yaitu sudah ditakdirkan miskin, sebagian besar responden tidak ada niat untuk berusaha lebih baik lagi.

5.2.4 Kesehatan

Penyakit yang diderita oleh kepala keluarga dan anggotanya serta jumlah jenis penyakitnya mencerminkan tingkat kesehatan keluarga responden. Jenis penyakit yang menyerang keluarga adalah jenis-jenis penyakit yang dapat dideteksi oleh pewawancara (pengumpul data), seperti influenza, batuk rejan, diare, malaria, cacar, tifus dan kecelakaan yang dapat mengganggu aktivitas sehari-hari penderita

Rata-rata keluarga dan anggotanya terserang penyakit kurang lebih 3 jenis penyakit, penyakit yang sering menyerang adalah influenza, diare serta malaria.

5.2.5 Aksesibilitas Publik

Fasilitas publik adalah fasilitas yang dibangun oleh pemerintah atau masyarakat untuk kepentingan umum. Fasilitas ini berupa, ruas jalan, pelabuhan, transportasi darat, transportasi sungai, pasar, sekolah, fasilitas kesehatan, bank, koperasi. Pada penelitian ini Variabel fasilitas publik adalah koperasi, bank dan pasar yang dimanfaatkan oleh kepala keluarga dan anggotanya

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rendahnya responden yang menggunakan fasilitas publik. Kondisi ini menunjukkan bahwa masyarakat miskin di kabupaten Buru rendah sekali memanfaatkan fasilitas umum yang dibangun pemerintah maupun masyarakat. Berikut disajikan penggunaan fasilitas publik oleh responden.

Tabel 5.11
AKSES RESPONDEN TERHADAP FASILITAS

FASILITAS	FREKUENSI	FASILITAS DIAKSES		Jumlah
		YA	Tidak	
BANK	6	144	150	
KOPERASI	47	103	150	
PASAR	79	71	150	
Persentase	29,3%	70,7 %		

Dari tabel 5.11 di atas tampak bahwa hanya 29,3 % responden yang mengakses fasilitas-fasilitas yang dapat meningkatkan derajat ekonomi mereka, selebihnya 70,7 % belum dapat mengakses fasilitas bank, pasar maupun koperasi.

5.2.6 Pendapatan Keluarga

Pendapatan keluarga merupakan salah satu ukuran dari kemiskinan. Telah disebutkan pada Bab terdahulu, bahwa rumah tangga masyarakat yang penghasilannya di bawah ukuran garis kemiskinan termasuk golongan orang miskin. Seperti telah disebutkan pada bab terdahulu bahwa ukuran garis kemiskinan itu banyak, salah satunya adalah kebutuhan akan kalori rata-rata per hari yang harus dikonsumsi setiap orang. Dalam studi ini menggunakan ukuran kalori perorang per hari, setelah dihitung dengan konversi beras dan dinilai dengan satuan rupiah maka batasnya adalah kurang lebih Rp 730.000,- per orang per tahun. Oleh karena itu untuk mengukur pendapatan keluarga, dikalikan jumlah anggota keluarga.

Seluruh responden (150 responden) rata-rata pendapatan keluarga sebesar Rp 3.178.636,- pendapatan terendah sebesar Rp 1.404.000,- dan pendapatan tertinggi sebesar Rp 4.403.000. Angka rata-rata pendapatan keluarga untuk dasar perhitungan batas garis kemiskinan adalah Rp 3.178.636,- dengan jumlah anggota keluarga 5,36 orang (6 orang).

Tabel 5.12
TINGKAT PENDAPATAN RESPONDEN

No	Tingkat Pendapatan	Frekuensi	Persentase
1	< 600.000	9	6 %
2	6000.000 - 700.0000	12	9 %
3	7000.000 - 800.0000	78	52 %
4	8000.000 - 900.0000	24	16 %
5	9000.000 - 1.00.0000	19	12 %
6	> 1.000.000	8	5 %
Jumlah		150	100 %

5.3 Uji Validitas dan Reliabilitas

Untuk menjamin adanya tingkat akurasi dan validitas data untuk instrumen yang digunakan, maka perlu dilakukan pengujian terhadap instrumen yang digunakan dalam penelitian. Pengujian validitas instrumen menggunakan teknik korelasi item dengan total item, dimana pengujian dilakukan terpisah pada indikator indikator yang digunakan. Tabel berikut memperlihatkan rata-rata nilai korlasi item pada masing-masing indikator. Secara keseluruhan item-item instrumen yang digunakan adalah valid, dengan koefisien korelasi positif dan signifikan.

Tabel 5.13
UJI VALIDITAS DAN REABILITAS

Indikator	Korelasi item total	Keterangan
Modal	0,5095	Valid
Pendidikan	0,6927	Valid
Budaya	0,5730	Valid
Kesehatan	0,6030	Valid
Pasar	0,6318	Valid
Koperasi	0,5231	Valid
Pendapatan	0,7124	Valid

Sumber : Diolah dari Lampiran 3

Pengujian reliabilitas dengan menggunakan koefisien *Alpha cronbach* dan teknik belah dua adalah sebesar 0,8114 > 0,60, berarti paket instrumen yang digunakan sudah reliabel.

5.4 Analisis Data

Analisis yang dipergunakan pada penelitian ini seperti telah dijelaskan pada Bab 4 adalah menggunakan analisis jalur atau *Path Analysis*. Penggunaan analisis jalur atau *path analysis* menggunakan paket program AMOS 4.02. Penggunaan *path analysis* dengan paket program AMOS adalah sebuah pendekatan dari model persamaan terstruktur (SEM : *Structural Equation Model*). Analisis data dengan menggunakan SEM ini adalah untuk pengujian hipotesis yang diajukan. Prosedur yang digunakan untuk analisis ini menurut Hair et al (1998) adalah sebagai berikut

1. Pengembangan model berbasis teori. Model teoritis (model konseptual) yang dikembangkan dengan dilandasi pada telaah teori yang memadai dan telah di bahas pada bagian awal. Model teoritis dalam penelitian ini pada intinya menggambarkan hubungan kausal antara variabel-variabel yang diteliti

2. Pengembangan diagram alur, Diagram alur untuk pengujian model penelitian dikembangkan berdasarkan telaah teori yang kuat dan mengacu pada model teoritis
3. Konversi diagram alur ke dalam persamaan struktural, Persamaan-persamaan struktural dan spesifikasi model pengukuran telah berdasarkan diagram alur telah ditampilkan pada bab 4.
4. Pemilihan matriks input dan teknik estimasi model, Input data yang digunakan adalah dalam analisis ini adalah matriks varians kovarians. Sedangkan teknik estimasi yang digunakan adalah dengan menggunakan maksimum likelihood (ML).
5. Mengevaluasi masalah identifikasi, Masalah identifikasi model struktural pada prinsipnya adalah masalah ketidakmampuan model menghasilkan estimasi yang unik (*unique solution*). Gejala masalah identifikasi antara lain :
 - a. Standard error pada satu atau beberapa koefisien sangat besar
 - b. Muncul angka-angka aneh seperti error varians yang negatif
 - c. Muncul korelasi yang sangat tinggi antar variabel
6. Evaluasi kriteria goodness of fit model, Pengujian kesesuaian model dilakukan melalui evaluasi terhadap kriteria goodness of-fit yang dalam penelitian menggunakan beberapa kriteria sebagai berikut

Tabel 5.14
INDIKATOR PENGUJIAN GOODNESS OF-FIT

Indikator goodness of-fit	Nilai cut off
Statistik Chi-square (χ^2)	Lebih kecil dari χ^2 tabel
Nilai Probabilitas (P value)	> 0,05
CMIN/DF (χ^2/df)	< 3,00
RMSEA (root mean square error of approximation)	<= 0,08
GFI (goodness of fit index)	> 0,90
CFI (comparative fit index)	> 0,90

Sumber : Gerson (2001)

7. Interpretasi dan modifikasi model Pada tahap terakhir ini akan dilakukan interpretasi model dan memodifikasi yang tidak memenuhi syarat pengujian. Modifikasi model dilakukan dengan memeriksa *Modification index* dan *standardized residual covariance*. Apabila nilai *Modification index* lebih besar dari 3,84 mengindikasikan bahwa model perlu dispesifikasi ulang. Akan tetapi spesifikasi ulang terhadap model harus dengan menggunakan *Modification index* dan *standardized residual covariance* harus berpijak pada justifikasi teori yang kuat untuk menghindari bias spesifikasi.

5.4.1 Model Pengukuran (Measurement Model)

Pada prinsipnya pemodelan SEM dalam penelitian ini menggunakan pendekatan atau langkah yang digunakan oleh Gerbig dan Anderson (1988). Pendekatan ini menggunakan dua langkah. Langkah pertama adalah Mengembangkan dan menganalisis model pengukuran, setelah model pengukuran dinyatakan fit, baru dilakukan langkah kedua yaitu menganalisis model struktural, yang memuat hubungan kausal antar variabel

Model pengukuran pada dasarnya adalah merepresentasikan hubungan antar indikator-indikator dengan *underlying factor*-nya (Gerbing & Anderson, 1988). Model pengukuran diuji dengan menggunakan analisis faktor konfirmatori (CFA = *Confirmatory Factor Analysis*). CFA pada prinsipnya mengkonfirmasi apakah indikator-indikator yang digunakan secara tepat mengukur faktor yang dituju oleh indikator-indikator tersebut.

Dalam penelitian ini pengujian model pengukuran melalui analisis faktor konfirmatori dilakukan dengan pendekatan *separate factor model* yaitu konfirmasi

pada setiap faktor yang dibentuk oleh indikatornya secara terpisah. Hal ini dimaksudkan untuk menguji apakah model pengukuran yang dikembangkan benar-benar telah fit (cocok) dengan data atau tidak.

5.4.2 Analisis Faktor Konfirmasi Variabel Penelitian

5.4.2.1 Faktor Konfirmasi Variabel Sosial Ekonomi

Untuk mengetahui *confirmatory factor analysis* dari variabel sosial ekonomi (SOSEK), maka akan dilakukan sesuai dengan tahapan-tahapan seperti yang telah disebutkan diatas, yaitu mengevaluasi *goodness of-fit indices* dan menganalisis *factor loadings*.

Analisis yang pertama adalah faktor konfirmasi untuk variabel SOSEK dengan mengevaluasi *goodness of-fit indices*, hasilnya ditampilkan dalam gambar berikut ini.

Gambar 5.1
ANALISIS FAKTOR KONFIRMASI VARIABEL

ANALISIS FAKTOR KONFIRMATORI			
e1	Modal	.46	
e2	Pendidikan	.98	.68
e3	Budaya	.37	.61
e4	Kesehatan	.74	.86
			SOSEK
GOODNESS OF FIT			
		Chi Square	=1,256
		p_value	=,740
		GFI	=,994
		TLI	=1,015
		CFI	=1,000
		RMSEA	=,000

Evaluasi terhadap model fit sebagaimana nampak pada gambar 5.1 menunjukkan bahwa secara keseluruhan model pengukuran untuk faktor SOSEK dapat diterima dengan nilai chi square (χ^2) dan probabilitas (p) yang signifikan untuk pengujian model. Hasil evaluasi terhadap model konfirmasi faktor SOSEK dirangkum dengan indikator cut off sebagai berikut.

Tabel 5.15
EVALUASI MODEL PENGUKURAN UNTUK FAKTOR SOSEK

Indikator goodness of-fit	Nilai cut off	Hasil Estimasi	Keputusan
Chi square (χ^2)	6,872	1,215	good fit
Probabilitas (p)	>= 0,05	0,740	good fit
CMIN/DF (χ^2/df)	<= 3,00	0,246	good fit
RMSEA	<= 0,08	0,000	good fit
GFI	> 0,90	1,015	good fit
CFI	>= 0,90	1,000	good fit

* Chi Square Tabel pada $\alpha=0.05$ dan $df=3$

Sumber : Hasil Analisis dengan Amos 2005

Tabel 5.15 di atas menunjukkan bahwa hasil estimasi dengan acuan indikator terhadap model adalah fit. Beberapa kriteria menunjukkan hasil yang baik, misalkan akar kuadrat error yang diestimasi (RMSEA) berada di bawah nilai cut off-nya.

Hasil evaluasi terhadap faktor-faktor loading disajikan dalam tabel berikut

Tabel 5.16
EVALUASI MODEL PENGUKURAN SOSEK

		Factor Loading	S.E	C.R	p. value
Modal	← SOSEK	0.676	0,061	67,510	0,000
Pendidikan	← SOSEK	0.992	0,056	75,538	0,000
Budaya	← SOSEK	0.607	0,079	52,733	0,000
Kesehatan	← SOSEK	0.859	0,056	77,214	0,000

Sumber : Hasil Analisis dengan Amos 2005

Dari tabel 5.16 di atas nampak bahwa nilai CR, signifikan pada $\alpha=0.05$, nilai loading faktor juga melebihi dua kali dari nilai standar error (SE). Hal ini

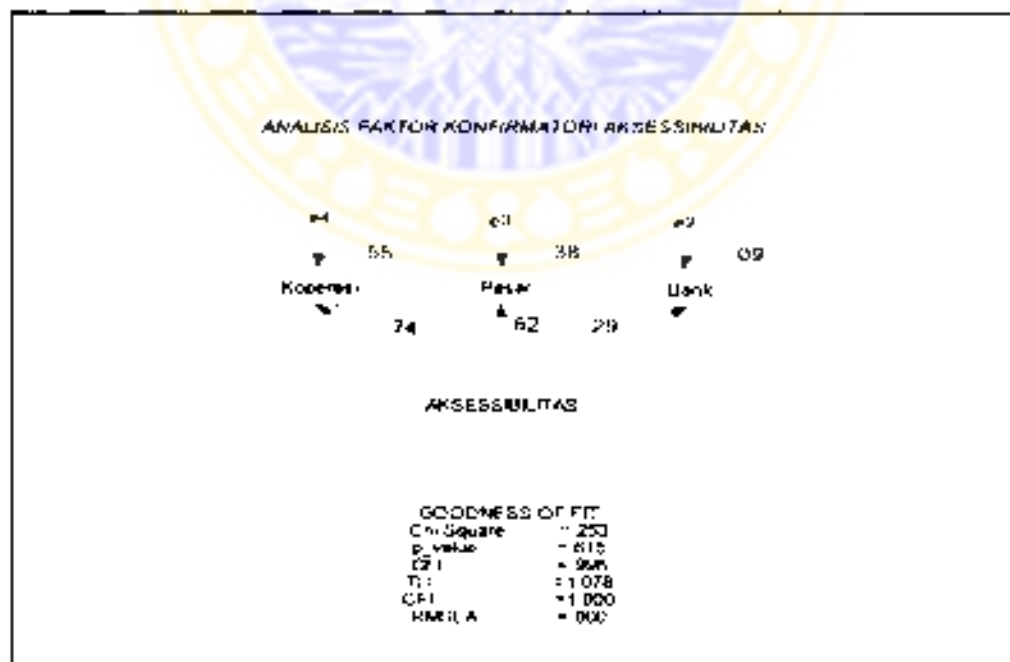
mengindikasikan bahwa dipenuhinya validitas konvergen dalam pengukuran. Apabila sebuah faktor tidak diukur dengan tepat maka analisis terhadap hubungan faktor tersebut dengan faktor lainnya akan bias (Anderson 1988).

5.4.2.2 Faktor Konfirmasi Variabel Aksesibilitas

Untuk mengetahui *confirmatory factor analysis* dari variabel Aksesibilitas, maka akan dilakukan sesuai dengan tahapan-tahapan seperti yang telah disebutkan diatas, yaitu mengevaluasi *goodness of-fit indices* dan menganalisis *factor loadings*.

Analisis yang pertama adalah faktor konfirmasi untuk variabel SOSEK dengan mengevaluasi *goodness of-fit indices*, hasilnya ditampilkan dalam gambar berikut ini.

Gambar 5.2
ANALISIS FAKTOR KONFIRMASI VARIABEL AKSESIBILITAS



Evaluasi model untuk menunjukkan bahwa model konfirmasi itu fit sebagaimana nampak pada gambar 5.2. Secara keseluruhan model pengukuran untuk faktor Aksesibilitas tidak sepenuhnya dapat diterima, hal ini disebabkan indikator bank yang menjadi salah satu indikator memiliki nilai loading faktor yang kecil. Penerimaan terhadap model dengan nilai chi square (χ^2) dan probabilitas (p) yang signifikan untuk pengujian model. Hasil evaluasi terhadap model konfirmasi faktor Aksesibilitas dirangkum dengan indikator cut off sebagai berikut.

Tabel 5.17
EVALUASI MODEL PENGUKURAN UNTUK FAKTOR AKSESIBILITAS

Indikator goodness of-fit	Nilai cut off	Hasil Estimasi	Keputusan
Chi-square (χ^2)	6,872	0,253	good fit
Probabilitas (p)	> 0,05	0,615	good fit
CMIN/DF (χ^2/df)	<= 3,00	0,205	good fit
RMSEA	<= 0,08	0,000	good fit
GFI	> 0,90	0,998	good fit
CFI	> 0,90	1,000	good fit

* Chi Square Tabel pada $\alpha=0,05$ dan $df=3$

Sumber : Hasil Analisis dengan Amos 2005

Tabel 5.17 di atas menunjukkan bahwa hasil estimasi dengan acuan indikator terhadap model adalah fit. Beberapa kriteria menunjukkan hasil yang baik, misalkan akar kuadrat error yang diestimasi (RMSEA) berada di bawah nilai *cut off*-nya.

Hasil evaluasi terhadap faktor-faktor loading disajikan dalam tabel berikut

Tabel 5.18
EVALUASI MODEL PENGUKURAN UNTUK FAKTOR AKSESIBILITAS

		Factor Loading	S.E.	C.R.	p-value
Koperasi	Aksesibilitas	0,618	0,086	3,847	0,000
Pasar	Aksesibilitas	0,618	0,114	5,644	0,000
Bank	Aksesibilitas	0,029	0,053	6,932	0,078

Sumber : Hasil Analisis dengan Amos 2005

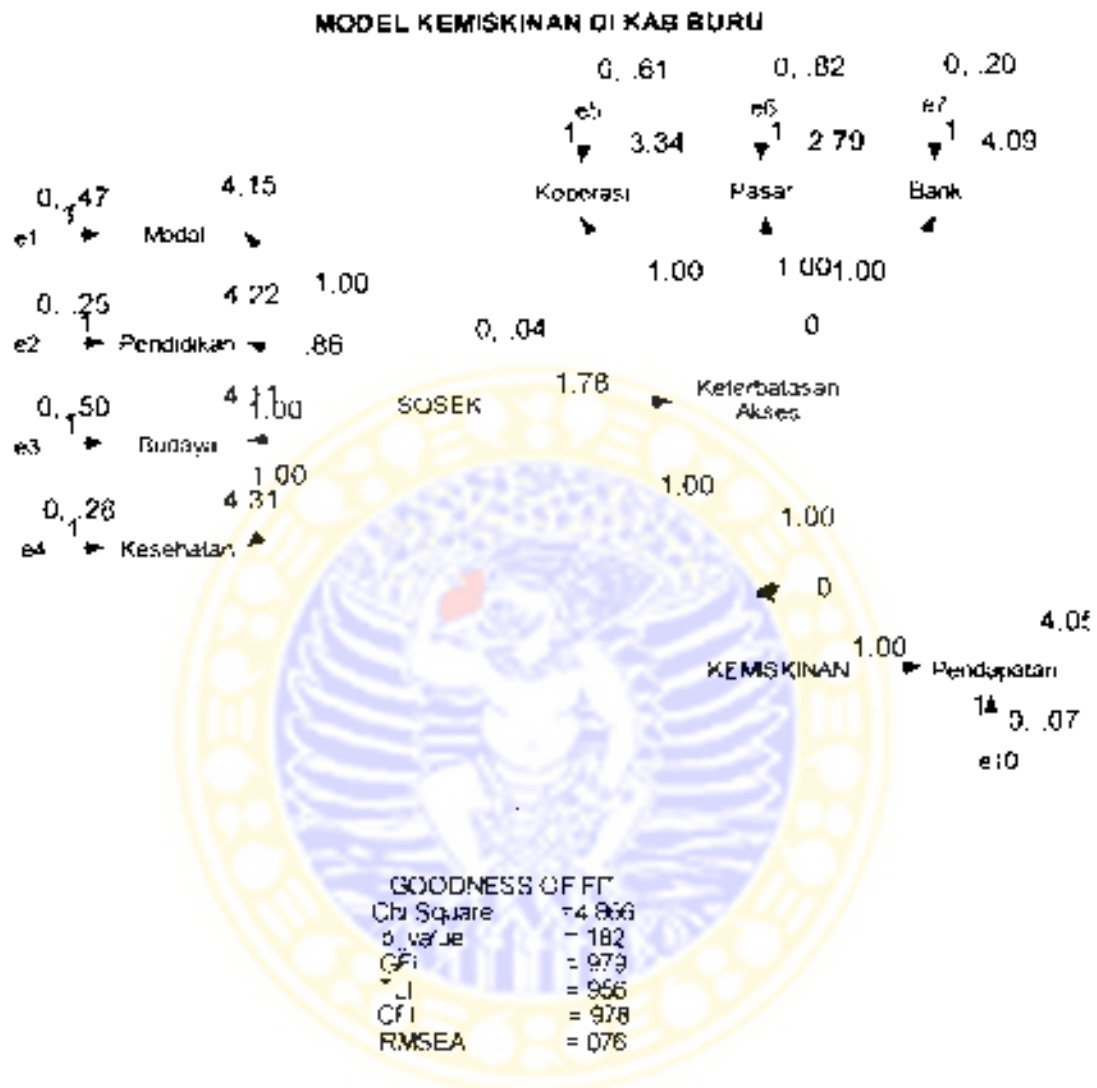
Dari tabel 5.18 di atas nampak bahwa nilai CR, signifikan pada $\alpha = 0,05$, nilai loading faktor juga melebihi dua kali dari nilai standar error (SE). Hal ini mengindikasikan bahwa dipenuhinya validitas konvergen dalam pengukuran. Apabila sebuah faktor tidak diukur dengan tepat maka analisis terhadap hubungan faktor tersebut dengan faktor lainnya akan bias (Anderson 1988).

5.4.3 Analisis Model Lengkap (Model Struktural)

Untuk menguji hubungan kausalitas lengkap dan pengujian terhadap hipotesis yang diajukan, maka dilakukan analisis terhadap model yang dibangun. Analisis ini tetap menggunakan tahapan- seperti yang telah disebutkan diatas yaitu mengevaluasi *goodness of-fit indices* dan *estimasi parameter* yang memerlihatkan hubungan antar faktor baik secara langsung maupun tidak langsung.

Analisis yang pertama adalah dengan mengevaluasi *goodness of-fit indices*, hasilnya ditampilkan dalam gambar berikut ini.

Gambar 5.3
ANALISIS STRUKTUR MODEL LENGKAP



Hasil evaluasi terhadap model lengkap yang menggambarkan hubungan kausalitas pada gambar 5.3 adalah menunjukkan bahwa model yang dibangun adalah cocok dengan data (fit). Pemeriksaan terhadap model dengan nilai chi square (χ^2) dan probabilitas (p) yang signifikan untuk penguatan model dirangkum dengan indikator cut off sebagai berikut

Tabel 5.19
EVALUASI MODEL LENGKAP KEMISKINAN

Indikator goodness of-fit	Nilai cut off	Hasil Estimasi	Keputusan
Chisquare (χ^2)	16,918*	4,866	good fit
Probabilitas (p)	≥ 0.05	0,182	good fit
CMIN/DF (χ^2/df)	≤ 3.00	0,540	good fit
RMSEA	≤ 0.08	0,076	good fit
GFI	≥ 0.90	0,979	good fit
CFI	≥ 0.90	0,978	good fit

* Chi Square Tabel pada $\alpha=0.05$ dan $df=9$

Sumber : Hasil Analisis dengan Amos 2005

Tabel 5.19 di atas menunjukkan bahwa indikator yang menjadi acuan jika di konfirmasi dengan *cut off* menunjukkan hasil yang baik, misalkan akar koadrat error yang diestimasi (RMSEA) berada di bawah nilai *cut off*-nya dan beberapa indikator menunjukkan hal yang sama. Dengan demikian model dapat diterima.

Setelah model struktural dinyatakan diterima, maka tahap berikutnya adalah analisis dan interpretasi terhadap parameter estimasi antar faktor yang terakomodir dalam model. Hasil estimasi untuk parameter model disajikan dalam tabel berikut,

Tabel 5.20
ESTIMASI PARAMETER MODEL PENGUKURAN

	Parameter estimasi	C.R	p. value	Keputusan
SOSEK ← Modal	0,700	6,680	0,009	signifikan
SOSEK ← Pendidikan	0,972	1,211	0,015	signifikan
SOSEK ← Budaya	0,575	7,100	0,026	signifikan
SOSEK ← Kesehatan	0,837	5,725	0,000	signifikan
AKSES (Pasar) ← SOSEK	0,036	6,839	0,000	signifikan
AKSES (Koperasi) ← SOSEK	0,022	7,313	0,079	Tidak signif
AKSES (Bank) ← SOSEK	0,027	7,301	0,067	Tidak signif
Kemiskinan ← SOSEK	0,048	1,000	0,017	signifikan
Kemiskinan ← AKSES	0,567	0,876	0,025	signifikan
AKSES ← SOSEK	1,000	0,505	0,034	signifikan
Kemiskinan ← AKSES ← SOSEK	0,058	1,000	0,007	signifikan

5.4.3.1 Pengujian Hipotesis

Hasil analisis terhadap model struktural dengan mengacu pada hasil evaluasi selanjutnya akan dilakukan pengujian terhadap hipotesis yang diajukan.

Hipotesis-1

Hipotesis pertama yang diajukan dalam penelitian ini adalah, "Modal berpengaruh signifikan terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat Kabupaten Buru". Hasil uji dengan parameter estimasi antara modal dengan kondisi sosial ekonomi menunjukkan pengaruh yang positif (0,700) dan signifikan dengan probabilitas ($p= 0,009$)

Hipotesis-2

Hipotesis kedua yang diajukan dalam penelitian ini adalah, "Pendidikan berpengaruh signifikan terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat Kabupaten Buru". Hasil uji dengan parameter estimasi antara pendidikan dengan kondisi sosial ekonomi menunjukkan pengaruh yang positif (0,972) dan signifikan dengan probabilitas ($p= 0,015$)

Hipotesis-3

Hipotesis ketiga yang diajukan dalam penelitian ini adalah, "Budaya berpengaruh signifikan terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat Kabupaten Buru". Hasil uji dengan parameter estimasi antara budaya dengan kondisi sosial ekonomi menunjukkan pengaruh yang positif (0,575) dan signifikan dengan probabilitas ($p= 0,026$)

Hipotesis-4

Hipotesis keempat yang diajukan dalam penelitian ini adalah, "Kesehatan berpengaruh signifikan terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat Kabupaten Buru". Hasil uji dengan parameter estimasi antara kesehatan dengan kondisi sosial ekonomi menunjukkan pengaruh yang positif (0,837) dan signifikan dengan probabilitas ($p=0,000$)

Hipotesis-5

Hipotesis kelima yang diajukan dalam penelitian ini adalah, "Kehidupan sosial ekonomi berpengaruh signifikan terhadap akses pasar masyarakat Kabupaten Buru". Hasil uji dengan parameter estimasi antara kehidupan sosial ekonomi dengan akses pasar menunjukkan pengaruh yang positif (0,036) dan signifikan dengan probabilitas ($p=0,000$)

Hipotesis-6

Hipotesis keenam yang diajukan dalam penelitian ini adalah, "Kehidupan sosial ekonomi tidak berpengaruh terhadap akses koperasi masyarakat Kabupaten Buru". Hasil uji antara kehidupan sosial ekonomi dengan akses koperasi menunjukkan tidak ada pengaruh dengan parameter estimasi (0,002) dan signifikan dengan probabilitas ($p=0,079$)

Hipotesis-7

Hipotesis ketujuh yang diajukan dalam penelitian ini adalah, "Kehidupan sosial ekonomi tidak berpengaruh terhadap akses bank masyarakat Kabupaten Buru". Hasil uji antara kehidupan sosial ekonomi dengan akses bank menunjukkan tidak ada pengaruh dengan parameter estimasi (0,027) dan signifikan dengan probabilitas ($p=0,067$)

Hipotesis-8

Hipotesis kedelapan yang diajukan dalam penelitian ini adalah, "Kehidupan sosial ekonomi berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan masyarakat Kabupaten Buru". Hasil uji dengan parameter estimasi antara kehidupan sosial ekonomi dengan kemiskinan menunjukkan pengaruh yang positif (0,048) dan signifikan dengan probabilitas ($p= 0,017$).

Hipotesis-9

Hipotesis kesembilan yang diajukan dalam penelitian ini adalah, "Aksesibilitas berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan masyarakat Kabupaten Buru". Hasil uji dengan parameter estimasi antara aksesibilitas dengan kemiskinan menunjukkan pengaruh yang positif (0,567) dan signifikan dengan probabilitas ($p= 0,025$).

Hipotesis-10

Hipotesis kesepuluh yang diajukan dalam penelitian ini adalah, "Kehidupan sosial ekonomi berpengaruh signifikan terhadap aksesibilitas pada masyarakat Kabupaten Buru". Hasil uji dengan parameter estimasi antara kehidupan sosial ekonomi dengan aksesibilitas menunjukkan pengaruh yang positif (1,000) dan signifikan dengan probabilitas ($p= 0,034$).

Hipotesis-11

Hipotesis kesebelas yang diajukan dalam penelitian ini adalah, "Kehidupan sosial ekonomi berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan melalui aksesibilitas pada masyarakat Kabupaten Buru". Hasil uji dengan parameter koefisien jalur antara (kehidupan sosial ekonomi dengan kemiskinan melalui aksesibilitas menunjukkan pengaruh tidak langsung dengan nilai koefisien jalur tidak langsung adalah (0,058) dan signifikan dengan probabilitas ($p= 0,007$).

BAB 6

PEMBAHASAN

6.1 Pembahasan

Berdasarkan kerangka teori, hipotesis penelitian dan memperhatikan hasil analisis, maka pembahasan difokuskan kepada telaahan pendapat para ahli tentang pembangunan, tenaga kerja dan kemiskinan. Semua ahli berpendapat bahwa pembangunan baik dalam arti sempit (ekonomi) maupun dalam arti luas (sosial, budaya, politik) idealnya dapat memberikan kesempatan yang luas kepada angkatan kerja untuk bekerja pada berbagai lapangan kerja baik formal maupun informal, sesuai amanat UUD 1945. Keterlibatan angkatan kerja dalam lapangan kerja berdampak pada kehidupan rumah tangga masyarakat baik yang bersifat fisik, material maupun mental spiritual. Jika proses pembangunan berjalan seperti disebutkan di atas maka akan terjadi perubahan struktur di dalam masyarakat sesuai dengan tahapannya yaitu adanya kesiapan fundamental yang kuat pada struktur masyarakat agraris menuju industri dan jasa.

Jika tahapan ini berjalan sebagaimana yang diharapkan maka tidak akan terjadi kepincangan yang telalu mencolok baik dalam distribusi pendapatan maupun pembangunan desa kota. Argumentasi yang memperkuat kesimpulan tersebut yaitu dengan bekerja maka angkatan kerja akan memperoleh balas jasa berupa uang atau pendapatan. Dengan pendapatan yang kontinyu maka angkatan kerja atau rumah tangga masyarakat dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan fisik, mental, pendidikan, kesehatan, air bersih, listrik dan sanitasi.

Dengan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tersebut, maka produktivitasnya akan meningkat dan berdampak terhadap kenaikan pendapatan dan kesejahteraan sehingga mengurangi kemiskinan. Realitasnya menunjukkan keadaan yang berbeda baik pada tingkat nasional, regional dan lokal. Di tingkat lokal/ Kabupaten Buru memiliki potensi sumber daya alam di darat maupun laut, kekayaan ini seharusnya diarahkan oleh pemerintah dengan melibatkan berbagai pihak dan didukung dengan kebijakan untuk mempermudah masuknya investor, akan memberikan peluang yang sangat besar bagi terciptanya kesempatan kerja dan kesempatan berusaha yang merupakan kunci bagi pengentasan kemiskinan.

Anne Booth maupun Todaro menyebutkan faktor-faktor penentu kemiskinan adalah modal, pendidikan, budaya dan kesehatan. Hasil penelitian lapangan juga menunjukkan hal yang sama, namun jika dikaji secara mendalam penelitian seharusnya dapat mengungkapkann bahwa faktor kemiskinan bukan melakat pada rumah tangga miskin atau rumah tangga yang dianggap miskin, karena semua indikator tersebut berada di luar jangkauannya.

Pendidikan sebagai salah satu faktor penyebab kemiskinan yang diukur dari lamanya waktu mengikuti jenjang pendidikan pada tingkat lokal penduduk yang dianggap miskin, memberikan jawaban melalui wawancara secara mendalam bahwa mereka ingin mencurahkan waktu yang panjang untuk mengikuti pendidikan tapi di tempat mereka tidak terdapat sekolah, walaupun ada jauh pada desa tetangga. Demikian juga dengan modal, bagi penduduk miskin modal secara operasional didefinisikan sebagai jalan, jembatan dan angkutan.

Samuelson menyatakan bahwa terjadinya kemiskinan di negara sedang berkembang salah satunya karena kekurangan modal (aset) yang dimilikinya, yang berupa pemilikan luas lahan pertanian, peralatan yang sederhana (modal tetap) dan kurangnya bantuan modal dari pemerintah setempat. Hal ini diakui pula oleh San Afri Awang di desa tipologi hutan di Jawa Timur, 1994, kemiskinan terjadi karena kekurangan modal dan pemerintah (Perhutani) tidak mampu memberikan bantuan modal. Rusnadi Ridwan dalam studinya tahun 1994 di desa nelayan Kalimantan Selatan terjadinya kemiskinan karena keterbatasan modal yang dimilikinya. demikian pula studi dan Gadri Dedyo Yuwono (1994) yang dilakukan di Sulawesi Selatan. Anne Booth menyatakan pula bahwa kemiskinan di negara tidak maju karena pemilikan modal yang terbatas.

Studi ini menemukan temuan yang sama dengan ilmuwan terdahulu dan peneliti lain sebelumnya. Pemilikan modal berpengaruh terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat dan kemiskinan, pengaruhnya positif artinya semakin kecil modal yang dimiliki masyarakat Kabupaten Buru semakin buruk kondisi sosial ekonomi dari masyarakat yang diteliti, berarti semakin miskin kualitasnya.

Modal yang dimaksud bukan saja berupa modal lancar (uang) yang dipergunakan untuk berdagang atau berjualan, tetapi termasuk modal tetap (modal tetap) yaitu barang-barang tahan lama yang dipergunakan untuk usaha, seperti misalnya sampian, pancung, jala, keranjang untuk berjualan, cangkul, parang dan becak atau sepeda. Oleh karena terbatasnya modal yang dimiliki maka hasil yang diperolehnya juga kecil, sehingga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kemiskinan.

Temuan ini sejalan dengan pendapat Anne Booth, dengan demikian temuan ini mendukung teori Anne Booth dan Samuelson, dan temuan-temuan peneliti lain di Indonesia tentang kemiskinan. Untuk mengatasi kemiskinan yang bertumpu pada keterbatasan modal pemerintah dan dunia usaha telah melakukan berbagai upaya namun belum menunjukkan tanda-tanda keberhasilan sebagaimana yang diharapkan. Padahal kelompok masyarakat miskin yang menckuni usaha kecil yang merupakan pilar ekonomi rakyat perlu dibangkitkan dan ditingkatkan perannya. Untuk itu para ahli menyarankan agar paket-paket deregulasi dapat secara langsung membantu atau mendorong tumbuhnya perekonomian rakyat khususnya penduduk miskin, sekaligus untuk mengatasi kesenjangan antara golongan ekonomi kuat dengan golongan ekonomi lemah. Untuk itu, selain perlunya peranan pemerintah, maka pengembangan keswadayaan masyarakat juga penting artinya. Pengembangan keswadayaan masyarakat selain memerlukan kebijakan publik yang menyentuh kepentingan masyarakat, inisiatif dari bawah, yang berasal dari masyarakat, juga diperlukan. Program perkreditan, seperti Kredit Investasi Kecil (KIK), Kredit Usaha Kecil (KUK), Kredit Modal Kerja Permanen (KMKP), Kredit Umum Pedesaan (Kupedes), dan program perkreditan lainnya yang merupakan bagian dari usaha menggerakkan ekonomi rakyat. Namun hal tersebut masih perlu dikembangkan dan masih memerlukan kajian, terutama yang menyangkut efektivitasnya. Kebijakan perkreditan untuk golongan ekonomi lemah ini sering mendapat kritikan, terutama faktor bunga yang terlalu tinggi atau bunga terlalu rendah, bahkan bantuan cuma-cuma sekalipun sehingga tidak mendorong petani untuk menggunakan fasilitas kredit tersebut untuk meningkatkan usaha produktif.

Ditengah kesulitan ekonomi maka kebijakan ekonomi makro juga mempengaruhi proses pemerataan yaitu melalui kebijakan di sektor perpajakan. Pertanyaan yang sering muncul adalah sejauh mana kebijakan di sektor perpajakan dapat mengurangi beban golongan ekonomi lemah dan sejauh mana pengalokasian penerimaan pajak dalam program-program yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan

Proyek-proyek Inpres juga merupakan salah satu sarana yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong program pengentasan kemiskinan, namun efektivitas dan manfaatnya terhadap golongan masyarakat miskin masih perlu ditingkatkan. Program Inpres Desa Tertinggal (IDT) yang dikenalkan mulai awal tahun sembilan puluhan merupakan upaya mendorong perekonomian rakyat, terutama untuk meningkatkan kemampuan permodalan dan usaha masyarakat miskin. Mengingat keberadaan program ini masih pada tahap permulaan, maka perkembangan dan keberhasilannya masih memerlukan pengamatan lebih lanjut.

Michael Todaro dalam bukunya *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga* menyatakan bahwa salah satu penyebab kemiskinan suatu bangsa (masyarakat) adalah rendahnya pengetahuan mereka. Rendahnya pengetahuan disebabkan karena rendahnya pendidikan dan kesempatan memperoleh pengetahuan. Hal senada juga dikemukakan oleh Peter Hagul dalam studinya tentang *Pembangunan Desa di daerah Yogyakarta (1985)*, menurutnya pendidikan merupakan kunci utama mengentas kemiskinan.

Studi Triono Sundoro di *Nusa Tenggara Barat (1994)* mendapatkan kesimpulan bahwa masyarakat tidak cepat menyerap motivasi yang diberikan oleh

aparap pemerintah. Hal ini disebabkan karena rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Demikian pula studi Mannaroto di Timor Timur (1994), yang menyatakan masyarakat sulit menerima informasi yang diberikan petugas pemerintah karena rendahnya tingkat pendidikan penduduk.

Studi di Kabupaten Buru menunjukkan hal yang sama, sebagian besar penduduknya tidak sekolah dan yang sekolah tidak tamat sekolah dasar. Oleh karena pendidikannya rendah maka informasi yang diterima tidak dengan mudahnya bisa dicerna, juga pengetahuan untuk usaha lebih maju menjadi terhambat, akibatnya mereka bekerja untuk mencari penghidupan seadanya.

Hasil studi menunjukkan bahwa tingkat pendidikan mempunyai pengaruh terhadap kondisi sosial ekonomi. Hal ini dapat diartikan bahwa dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka mereka dapat dengan mudah mengembangkan ekonomi keluarga dengan bekerja atau menggunakan ketrampilan untuk berusaha, dengan pendidikan yang semakin tinggi maka akan berdampak pada pendapatan keluarga terutama pendapatan dan kepala keluarga karena kepala keluarga yang menjadi responden dalam penelitian juga akan semakin tinggi. Kebanyakan responden dalam penelitian ini pekerjaannya adalah bertani, berternak dan nelayan. Jenis-jenis pekerjaan itu tidak ditentukan oleh tingkat pendidikan tetapi tergantung dari alam, apabila hutan ada bencana alam masyarakat tidak dapat bekerja untuk mencari penghasilan. Bahkan untuk masa-masa tertentu seperti pada saat panen maka sekolah akan ditinggalkan oleh muridnya karena membantu orang tuanya panen.

Studi ini secara implisit sama dengan yang dilakukan oleh Anne Booth dan Michael Todaro, dengan mengukur tingkat pendidikan responden, studi ini mendukung kedua teori tersebut.

Michael Todaro, menyatakan bahwa kondisi kesehatan yang tidak memadai dari penduduk memperparah keadaan kemiskinan. Hal ini senada dengan studi Anne Booth, menurutnya keterbatasan masyarakat mengakses fasilitas publik termasuk fasilitas kesehatan, menyebabkan terjadinya kemiskinan.

Di dalam studi Anne Booth masalah kesehatan dibahas sangat mendalam. Ada dua pembahasan yang lengkap mengenai kesehatan, yang pertama pada pembahasan faktor geografi dan lingkungan pengaruhnya terhadap kemiskinan, di sini dibahas unsur penyakit yang di derita masyarakat sehingga menyebabkan kemiskinan. Kedua pada pembahasan faktor personal dan fisik pengaruhnya terhadap kemiskinan, di sini dibahas kondisi kesehatan masyarakat pengaruhnya terhadap kemiskinan penduduk.

Pada studi di Kabupaten Buru ini diteliti pula masalah tingkat kesehatan atau penyakit, yang diderita kepala keluarga dan anggotanya. Banyak sedikitnya jenis penyakit yang diderita keluarga akan berpengaruh terhadap kemiskinan. Semakin banyak jenis penyakit atau semakin ganas/berbahaya penyakit yang diderita keluarga akan mengurangi aktifitas kepala keluarga mencari penghasilan dan juga menambah pengeluaran keluarga untuk berobat. Penyakit juga dapat mengakibatkan cacat fisik dan mental penderita, semua itu akan menambah kondisi miskin yang semakin parah. Selain itu faktor penyakit ini disebabkan karena jumlah anggota keluarga bertambah berakibat waktu kerja bertambah,

sehingga energi kepala keluarga untuk menafkahi keluarganya semakin bertambah, akibatnya resiko untuk terserang penyakit semakin tinggi artinya modal yang harus dikeluarkan untuk pengobatan penyakit juga semakin besar sehingga berdampak pada penambahan waktu kerja yang dilakukan akhirnya tidak memberikan kontribusi yang positif untuk meningkatkan kesejahteraannya. Berdasarkan data responden, di Kabupaten Buru masih banyak ditemukan masyarakat yang menderita sakit, meskipun telah ada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Pusat Pelayanan Kesehatan Terpadu. Dampak dari penyakit yang diderita oleh masyarakat adalah mereka kehilangan hari kerjanya, hal ini tentu akan berakibat terhadap pendapatan rumah tangga mereka karena semakin banyak hari sakit berarti semakin banyak pula pendapatan mereka yang hilang.

Tingkat kesehatan berpengaruh positif terhadap kemiskinan. Semakin rendah tingkat kesehatan keluarga atau semakin banyak penyakit yang diderita, maka semakin rendah pendapatan perkapita keluarga berarti semakin miskin keluarga tersebut. Hasil studi ini mendukung teori Michael Todaro dan Anne Booth dan studi kesehatan pengaruhnya ini belum pernah dilakukan oleh ahli ekonomi di Indonesia.

Studi tentang budaya pengaruhnya terhadap kemiskinan dilakukan oleh Anne Booth, studi ini juga dilakukan oleh Michael Todaro. Menurut Anne Booth "*Cultural Poverty*" berpengaruh kuat terhadap kemiskinan melalui keterbatasan masyarakat di dalam mengakses fasilitas publik. Sedangkan menurut Michael Todaro, kemiskinan terjadi karena sikap malas dan rendah motivasi dari masyarakat. Oleh karena sikap tersebut menyebabkan tingkat hidupnya rendah seterusnya terciptalah kemiskinan.

Studi tentang budaya dan kemiskinan banyak dilakukan oleh peneliti sebelum ini. Kusumastuti (1998) melakukan penelitian di Bali tepatnya di desa Trunyan (desa terisolir), dalam studinya menyatakan kemiskinan terjadi karena budaya. Mereka patuh dan taat pada pemuka adat dan agama, pengeluaran-pengeluaran untuk ibadah dan adat kadangkala melebihi penghasilannya. Oleh karena itu untuk mengatasi ini juga harus lewat budaya.

Studi yang dilakukan oleh Okerlin Batu Bara di Nias Sumatera Utara pada tahun 1998, menyatakan kemiskinan terjadi karena budaya dan kultura. Aset daerah banyak dikuasai oleh kaum ningrat dan orang-orang terpandang. Untuk mengatasinya perlu upaya terpadu antara pendekatan budaya dan pembangunan fisik.

Studi Nurimansyah Hasibuan di desa Tulang Buluh (1996), salah satu temuannya adalah kemiskinan terjadi karena budaya yang terjadi di desa tersebut. Anak lelaki dewasa harus merantau meninggalkan desa, setelah merantau ternyata memperoleh jodoh dirantau dan tidak pulang lagi. Akhirnya desa ini dihuni orang-orang tua dan wanita yang belum kawin (tidak kawin).

Studi ini menemukan fakta bahwa tidak terdapat pengaruh budaya terhadap kemiskinan. Diduga budaya tidak mempunyai pengaruh terhadap pendapatan (kemiskinan) karena beberapa hal diantaranya : 1) adanya kesamaan secara rata-rata jawaban dari responden seperti budaya pekerjaan yang dilakukan saat ini adalah turun temurun serta apabila mendapatkan modal bukannya digunakan untuk kegiatan produksi tetapi lebih banyak digunakan untuk keperluan sehari-hari (sandang, pangan dan papan); 2) responden beranggapan bahwa terjadinya kemiskinan bukan karena sifat dari masyarakat yang tidak mau berusaha untuk melepaskan diri dari kondisi miskin, kondisi miskin yang diderita karena merasa sudah takdirnya miskin, mereka menganggap sejak lama nenek

moyangnya miskin, usaha apapun yang dilakukan tidak akan merubah nasibnya. Responden lebih beranggapan bahwa kemiskinan yang terjadi dikarenakan tidak adanya keadilan bagi mereka, wilayah yang kaya akan sumber daya alam tetapi mereka sendiri tidak dapat mengelolanya. Hal ini dimungkinkan karena tingkat penguasaan teknologi dan pendidikan yang rendah sehingga cara berpikir mereka bukan untuk merubah masa depan anak keturunan mereka tetapi hanya berusaha bagaimana mereka dapat bertahan hidup untuk hari ini

Hasil Penelitian ini menolak teori Anne Booth dan Teori Michael Todaro, serta penelitian-penelitian sebelumnya, yaitu budaya berpengaruh terhadap kemiskinan.

Studi Anne Booth mengatakan bahwa fasilitas publik berpengaruh terhadap kemiskinan. Terbatasnya fasilitas publik dan kemampuan masyarakat mengakses fasilitas yang tersedia akan mempengaruhi kemampuan usahanya, semakin mampu mereka mengakses fasilitas dan memanfaatkannya semakin baik kondisi kehidupannya, semakin baik pula tingkat kesejahteraannya.

Masyarakat miskin biasanya rendah diri, apabila memerlukan fasilitas yang ada tidak bersedia atau malu untuk menggunakan, misalnya apabila ada anggota keluarga yang sakit mereka tidak mau datang ke Puskesmas, alasannya tidak mempunyai biaya. Fasilitas umum yang biasa dipakai adalah jalan raya dan pasar, di tepi jalan raya dan di pasar masyarakat dapat melakukan kegiatan yaitu berjualan, tetapi di daerah pedalaman di mana fasilitas umum yang sangat jarang dan mereka kurang memanfaatkannya. Dalam memanfaatkan pasarpun peran masyarakat miskin bukan sebagai pemain pasar (produsen) tapi umumnya sebagai konsumen hal terjadi karena terbatasnya modal dan pengetahuan mereka dalam berusaha.

Penelitian sebelumnya yang membahas pengaruh fasilitas publik terhadap kemiskinan di Indonesia kiranya belum ada. Studi ini menemukan fakta bahwa fasilitas publik berpengaruh terhadap kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat miskin tingkat pendidikannya rendah, oleh karenanya juga tidak mampu memanfaatkan dan menggunakan fasilitas yang ada. Di pihak lain di Kabupaten Buru fasilitas yang tersediapun masih terbatas.

6.2 Temuan Ilmiah

Temuan ilmiah diwajibkan bagi ilmuwan yang melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Menurut Chalmers (1982:67) pengembangan ilmu pengetahuan itu ada tiga, yaitu (1) mendukung atau membenarkan teori yang sudah mapan, (2) menentang atau menggagalkan atau menggugurkan teori yang sudah ada, (3) menemukan teori atau metode yang sama sekali baru.

Dasar teori yang dipergunakan pada studi ini adalah teori kemiskinan yang dikemukakan oleh Michael Todaro dan Anne Booth. Menurut Todaro penyebab utama kemiskinan adalah pertumbuhan penduduk yang pesat yang tidak didukung oleh sumber daya alam yang tersedia. Keadaan yang memperparahnya adalah pendidikan rendah, budaya yang tidak mendukung, penguasaan modal yang kecil.

Anne Booth di dalam teorinya masalah kemiskinan menyatakan bahwa yang berpengaruh terhadap kemiskinan adalah (1) faktor ekonomi terdiri dari kurang modal dan rendahnya teknologi, (2) faktor sosial dan budaya terdiri dari, rendahnya keahlian dan pendidikan, terbatasnya kesempatan kerja dan *Cultural Poverty*, (3) faktor geografi dan lingkungan terdiri dari keterbatasan sumber daya alam, penyakit dan kurang subur nya lahan, (4) faktor personal dan fisik terdiri

dari umur, jenis kelamin dan kesehatan. Keempat faktor-faktor tersebut melalui keterbatasan dalam mengakses pasar produk, fasilitas publik dan fasilitas kredit.

Hasil studi ini mendukung teori Michael Todaro, dan sebagian dari temuan Anne Booth. Disebut sebagian karena tidak semua variabel yang diteliti 5 variabel mendukung teorinya, kenyataannya secara budaya masyarakat berkeinginan untuk merubah nasib. Budaya yang kuat untuk berubah tetapi tidak diikuti dengan pendidikan dan ketrampilan yang memadai, modal yang kurang, dan tingkat kesehatan yang kurang, sehingga budaya tidak secara langsung berpengaruh terhadap kemiskinan.

6.3 Keterbatasan Studi

Diakui bahwa studi ini tidak mungkin sempurna, dan diakui pula ada beberapa kelemahan yang dirasakan setelah data terkumpul dan diolah. Kelemahan-kelemahan yang dirasakan misalnya, Keadaan desa yang beragam, ada desa yang mudah terjangkau, yaitu daerah perkotaan, desa dipinggir jalan kelas II dan kelas III dan desa tepi laut. Tetapi sebaliknya ada pula desa yang berada di pedalaman yang sulit dijangkau, hal ini mengganggu pelaksanaan wawancara. Kesulitan untuk bertemu dengan kepala keluarga juga terjadi di daerah pedalaman, pada waktu peneliti dan pembantu peneliti sampai di kediaman responden, responden sedang ke hutan bekerja mencari hasil hutan, sehingga terjadi penundaan wawancara, dirasakan kurang sempurna. Selama melakukan wawancara di pedesaan pewawancara menginap di kota kecamatan dan responden berada antara 50 – 80 km yang harus ditempuh dalam waktu 2 – 4 jam karena sulitnya medan penelitian

BAB 7

PENUTUP

7.1 Kesimpulan

Setelah memperhatikan analisis dan pembahasan pada bab 5 dan bab 6, serta kajian pustaka pada bab 2 maka secara jelas terlihat bahwa kemiskinan merupakan sebuah fenomena yang sangat kompleks, memiliki pengungkapan empiris yang sangat bervariasi dan sebagai akibatnya tidak mungkin dapat dijelaskan dengan memuaskan melalui perspektif teori tunggal mana pun. Demikian kompleksnya pemahaman dan pengertian teoritis mengenai fenomena kemiskinan, sehingga setiap deskripsi dan penjelasan oleh perspektif teori mana pun harus dianggap tentatif. Dengan demikian dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Pembangunan yang dilaksanakan baik pada zaman sentralistik maupun era desentralisasi belum dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.
2. Modal merupakan sebuah kekuatan yang dapat memperbaiki kehidupan sosial ekonomi penduduk miskin. Tanpa modal penduduk miskin tidak dapat berbuat banyak, karena itu penduduk miskin selalu berharap untuk mendapatkan bantuan modal dari berbagai pihak, terutama pemerintah. Dengan modal yang terbatas maka skala usahapun menjadi terbatas. Karena itu Modal berpengaruh positif terhadap keterbatasan mengakses fasilitas.
3. Pendidikan dalam arti luas, formal, informal dan non formal dapat menjadi sarana untuk merubah cara pandang dan cara berfikir. Rendahnya pendidikan

penduduk miskin bukan merupakan kemauan penduduk miskin itu sendiri tapi sebuah sistem yang tidak dapat dihindari. Oleh karena itu rendahnya pendidikan berpengaruh positif secara tidak langsung terhadap keterbatasan mengakses fasilitas.

4. Dari perspektif budaya miskin kekurangan dan keterbatasan barang dan jasa atau bahan dan alat telah diterima secara apa adanya sehingga dengan mudah dapat menyesuaikan hidup tanpa pendapatan. Dengan demikian Budaya berpengaruh positif terhadap keterbatasan mengakses fasilitas.
5. Dengan derajat kesehatan dan kualitas hidup yang rendah menunjukkan bahwa jangkauan dan fasilitas pelayanan kesehatan masih jauh dari yang diharapkan. Keadaan ini merupakan penyebab utama tingkat kesehatan berpengaruh positif terhadap keterbatasan mengakses fasilitas.
6. Kondisi sosial ekonomi berpengaruh terhadap aksesibilitas, pengaruh tidak langsung kondisi sosial ekonomi terhadap akses pasar dan koperasi adalah signifikan, sebaliknya kondisi sosial ekonomi tidak berpengaruh terhadap akses bank.
7. Kondisi sosial ekonomi berpengaruh langsung terhadap kemiskinan masyarakat.
8. Aksesibilitas publik terhadap koperasi dan pasar berpengaruh terhadap kemiskinan terbukti
9. Kondisi sosial ekonomi berpengaruh langsung terhadap aksesibilitas publik.
10. Kondisi sosial ekonomi berpengaruh tidak langsung terhadap kemiskinan tetapi melalui aksesibilitas terbukti

7.2 Saran

Penanggulangan kemiskinan merupakan upaya peramuan berbagai faktor sumber daya alam. Manusia, kapital, ekonomi, sosial, dan budaya. Melalui saran ini diharapkan dapat memecahkan pertanyaan apa, siapa di mana dan bagaimana. Untuk itu beberapa saran yang disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Perlu ada perubahan cara pandang dalam memahami kemiskinan, bukan hanya dari sudut pandang ekonomi saja, tetapi juga dari sudut pandang yang lain.
2. Perlu ada indikator yang lebih tepat untuk mengukur kemiskinan daerah yang tidak hanya mengukur kemiskinan berdasarkan pendapatan saja tetapi juga partisipasi masyarakat.
3. Pengeluaran pembangunan, terutama yang terkait dengan bidang kesehatan, pendidikan harus lebih difokuskan pada pengeluaran yang memiliki pengaruh langsung pada penduduk miskin.
4. Bantuan modal untuk usaha masyarakat miskin sangat besar pengaruhnya terhadap pengentasan kemiskinan, tetapi juga harus diidentifikasi secara jelas sehingga bantuan itu sesuai peruntukannya.
5. Tidak semua penduduk miskin pada saat yang sama harus diberikan bantuan modal dalam bentuk uang, tetapi harus secara spesifik sehingga bantuan dipisahkan antara pengetahuan, keterampilan dan modal dalam arti uang.
6. Semua bantuan harus diikuti dengan pengarahan dan pengawasan terhadap penggunaannya, sehingga akan lebih terarah bantuan tersebut.
7. Pendidikan berpengaruh terhadap kemiskinan, sehingga peran Dinas Pendidikan dan kebudayaan perlu ditingkatkan. Dalam jangka panjang perlu dilakukan peningkatan utamanya dalam memberikan penyuluhan-penyuluhan tentang pentingnya pendidikan 9 tahun kepada anak-anak. Dan selain itu

dalam jangka pendek Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dapat memberikan ketrampilan tambahan kepada kepala keluarga atau Ibu rumah tangga yang dapat digunakan untuk meningkatkan pendapatannya. Karena kebanyakan istri kepala keluarga dalam penelitian ini tidak memiliki pekerjaan selain menjadi Ibu rumah tangga.

8. Tingkat kesehatan berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan, namun di sisi lain masyarakat desa masih sangat rentan dengan berbagai penyakit sehingga peran Dinas Kesehatan perlu ditingkatkan, utamanya dalam hal pemberantasan penyakit dan penerangan motivasi untuk hidup sehat; penambahan tenaga medis dan sarana kesehatan masyarakat lebih diutamakan dalam penambahan pegawai baru.
9. Meskipun dalam studi ini budaya tidak berpengaruh terhadap kemiskinan, tetapi tetap harus memberikan pengarahan-pengarahan dengan cara mengarahkan pada etos kerja dan berbaur dengan etnis lain
10. Berhubung masih banyaknya rumah tangga yang belum memaksimalkan penggunaan fasilitas publik. Untuk itu instansi terkait antara lain Departemen Koperasi, Kesehatan dan Perbankan agar : 1) dapat memberikan motivasi dan pengertian kepada masyarakat mengenai pemanfaatan kelembagaan yang ada; 2) menyederhanakan sistem birokrasi dan administrasi yang telah ada, agar masyarakat mampu mengakses kelembagaan yang ada sesuai dengan keberadaan mereka; dan 3) perlu dipertimbangkan penempatan lokasi kelembagaan agar mudah dicapai oleh masyarakat dari berbagai desa
11. Disarankan kepada peneliti lain untuk melakukan penelitian kemiskinan pada masyarakat pedalaman, karena di daerah Maluku sebagian besar masyarakatnya masih terisolir.

DAFTAR PUSTAKA

- Admiral, 1997. Beberapa Penyebab Kemiskinan di Indonesia. *Buletin Penelitian Kebijakan Kependudukan* Volume. 10 No. 5 tahun 1997. Penerbit PPSK, UGM, Yogyakarta
- Ahmad, Jamaludin, 1993. *Produktivitas Tenaga Kerja dan Elastisitas Kesempurnan Kerja di Daerah Istimewa Aceh*. Penerbit Fakultas Ekonomi Unswah
- Ala, Dayu Andre, 1996. *Kemiskinan dan Strategi Memerangi Kemiskinan*. Penerbit Liberty, Yogyakarta
- Anar Saansul, 2000. Analisis Sosial Ekonomi: Penduduk Miskin dan Strategi Pengentariaannya. *Disertasi Program Pascasarjana*. Universitas Airlangga, Surabaya
- Amarta Aras, 1986. *Modal Manusia Dalam Pembangunan Ekonomi, Pusat Antar Universitas dan Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia*, Jakarta
- Anderson, J.C., 1987. *An Approach for Confirmatory Measurement and Structural Equation Modelling of Organizational Properties*, *Manajemen Science*, Vol 33 no. 4, pp 525-541
- Arnol Satua, 1990. *Dari Prestasi Pembangunan Sampai ke Ekonomi Politik*. Jakarta: UI Press
- , 1990. *Pemikiran Pembangunan dan Kebijakan Ekonomi*. Penerbit Lembaga Riset Pembangunan, Jakarta
- Arkunto, Suharsini, 1996. *Proses Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Edisi Kelevan III. Penerbit PT Rineka Cipta, Jakarta
- Arsyad, Lincoln & Prayitno Hadi, 1991. *Petani Desa dan Kemiskinan*. Penerbit BPF, Yogyakarta
- Arsyad, Lincoln, 1999. *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*. Penerbit BPF-Yogyakarta
- Biro Pusat Statistik, 1993. *Statistik Indonesia*, Penerbit Biro Pusat Statistik Indonesia, Jakarta
- , 1996. *Statistik Indonesia*, Penerbit Biro Pusat Statistik Indonesia, Jakarta
- , 1999. *Survei Sosial Ekonomi Nasional*. Penerbit Badan Pusat Statistik, Jakarta
- Badan Pusat Statistik, 2000. *Indikator Ekonomi*. Penerbit Badan Pusat Statistik Indonesia, Jakarta
- , 2003 a. *Pendapatan Regional Provinsi Maluku*. Penerbit Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku
- , 2003 b. *Maluku Dalam Angka*. Penerbit Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku, Jakarta
- , 2003 c. *Buru Dalam Angka*. Penerbit Badan Pusat Statistik Kabupaten Baru

- , 2003 d *Data dan Informasi Kemiskinan* Badan Pusat Statistik, Jakarta Indonesia
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2000 *Rencana Strategis Penanggulangan Kemiskinan*, Bappenas Jakarta
- Bagozzi, R.P. & Baumgartner, 1994. *The Evaluation of Structural Equation Models and Hypothesis Testing*. Principles of Marketing Research, Oxford/Blackwell, pp 386-586
- Bank Indonesia, 2003 *Laporan Perekonomian Indonesia Periode Januari s/d Desember 2003*. Penerbit bank Indonesia, Jakarta.
- , 2004. Perkembangan Ekonomi makro dan Inflasi. *Buletin Ekonomi dan Perbankan*. Volume 7 No 2 Tahun 2004 Hal 188
- Basri, Faisal, 1995 *Profil dan Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia* Penerbit Erlangga, Surabaya
- Bulkin, Farchan, 1988 *Kemiskinan dalam Studi Politik di Indonesia*, Transformasi, Seri III, Jakarta
- Booth, Anne and Firdaus (1996), *Effect of Prices and Market Reform on the Poverty Situation of Rural Communities and Firm Families*, New York Economic and Social Commission for Asia Pasifik
- Chalmers, A.F., 1982, *Apa Itu Yang Dinamakan Ilmu*, Penerbit Hasta Mitra, Jakarta
- Chambers, Robert. 1987 *Poverty And Livelihood: Whose Reality* Kualalumpur: Institut of Development Studies
- Darwin, Muhadjir, M, 2005 *Memanusiakkan Rakyat. Penanggulangan Kemiskinan Sebagai Arus Utama Pembangunan* Penerbit Henang Merah Yogyakarta
- Daulay, Murni, 2002. Analisis Pengaruh Curahan Jam Kerja Total dan Eksploitasi Terhadap Kemiskinan Petani Padi Sawah di Kabupaten Labuhan Batu Provinsi Sumatera Utara, *Disertasi Program Pascasarjana* Universitas Airlangga, Surabaya
- Dewey, Alice, Michael dan Loekman Soetrisno, 1993 *Suatu Tinjauan Mengenai Usaha-usaha Pemberantasan Kemiskinan di Indonesia 1968-1993*. Realita Mikro dan Konteks Makro, Jakarta
- Dillon, H.S., 1999 *Pertanian Membangun Bangsa* Cetakan Pertama Pustaka Sinar Harapan, Jakarta
- , 2002 *Kebijakan dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia* Dinamika Pedesaan dan Kawasan Penerbit Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan UGM Yogyakarta
- Djojohadikusumo, S., 1979. *Indonesia Dalam Perkembangan Kini dan Masa Mendatang*, LP3ES, Jakarta
- , 1986 *Ekonomi Pembangunan*, Penerbit Pustaka Ekonomi Jakarta
- , 1994. *Dasar Teori Ekonomi Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan*, Penerbit, LP3ES, Jakarta
- Djoko Mursinto, 2004 Pengaruh Derajat Desentralisasi Fiskal dan Tingkat Kemandirian Keuangan Serta Elastisitas PAD Terhadap Kategori Pemerintahan Kabupaten

- dan Kota Pada Awal Otonomi Daerah di Provinsi Jawa Timur. *Disertasi Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya*
- Dyson, 1995 *Perangkap Kemiskinan Problem dan Strategi Pengentasannya* Airlangga University Press
- Effendi, Tadjuddin Noer, 1993 *Sumberdaya Manusia, Peluang Kerja dan Kemiskinan* Tiara Wacana, Yogyakarta
- Esmara, Hendra, 1986 *Perencanaan dan pembangunan Indonesia* Penerbit, Gramedia Jakarta
- Garson, 2001 *Structural Equation Modeling* www2.nelaps.edu, pp 1-45
- Gozaib Imam, 2002 *Model Persamaan Struktural* Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang
- Gunawan dan Erwidodo, 1993 Urbanisasi, Pengangguran dan Kemiskinan *Prisma* No 3 Tahun XII
- Hadiwagono, Soetarwo dan Agus Pakpahar, 1993 *Identifikasi Wilayah Miskin di Indonesia* *Prisma* No 3 Tahun XII
- Hadisumarto, Djunaedi, 1997 *Kemiskinan di Indonesia: Tinjauan Teoritis dan Empiris Kondisi kemiskinan dan faktor Mempengaruhinya* Penerbit Center For Policy And Implementation Studies Jakarta
- Hagul, Peter, 1986. *Pembangunan Desa dan Lembaga Swadaya Masyarakat* Yayasan Duan Desa, Yogyakarta
- Hasibuan, Nurmansjah, 1997 Kemiskinan Struktural di Indonesia Menembus ke Lapisan Bawah *Jurnal Studi Indonesia*, Volume 7 No 1 Pusat Studi Indonesia, Universitas Terbuka, Jakarta
- Huliscian, Mus, 1996 *Kudaya Maluku dan Prospek dan Tantangannya* Lembaga Penelitian Universitas Pattimura, Ambon
- Isnuwan, 1991. *Keternagakerjaan dalam Struktur Agraris di Pedesaan Jawa*. Jakarta UI Press
- Ismanto, IGIN, 1994 *Kemiskinan di Indonesia dan Program Impres Desa Tertinggal (IDT)* Refleksi Setengah Abad Kemerdekaan Indonesia. CSIS, Jakarta.
- Jhingan, M L. 2002 *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan* Penerbit PT Raja Grafindo Jakarta
- Koentjaraningrat, 1997 *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, Penerbit Djambatan, Jakarta
- Kalla Yusuf, 2001 *Indonesia Membangun Konsensus Nasional Untuk Penanggulangan Kemiskinan* Penerbit: Bakti Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Jakarta
- Kartasasmita, Ginandjar, 1993 *Kebijakan dan Strategi Pengentasan Kemiskinan* Penerbit Universitas Brawijaya Malang
- , 1994 Perencanaan Pembangunan Nasional dalam Meningkatkan Pemerataan Karterannya Terhadap Peran Generasi Muda Untuk Mensukseskan Program IDT *Makalah* disampaikan pada Musyawarah Nasional IV Angkatan Muda Perbaharuan Indonesia, Semarang 29 Juni 1994

- , 1996. *Pembangunan Untuk Rakyat Peadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Cides, Jakarta.
- Kartodirdjo, Sentono, 1994. *Pembangunan Bangsa. Nasionalisme, Kesadaran dan Kebudayaan Nasional*. Penerbit Aditya Media Yogyakarta
- Kasto, dan Pariai Wijaya, 2004. Pengaruh Profesi dan Strategi Bertahan Hidup Gelandangan Terhadap Ketahanan Pada Aspek Keamanan *Buletin Penelitian Pascasarjana UGM Volume 17 NO. 2*
- Koentjaraningrat, 1997. *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, Penerbit. Djambatan, Jakarta.
- Kuncoro, Mudrajad, 1997. *Ekonomi Pembangunan. Teori Masalah dan Kebijakan*. Penerbit: Akademi Manajemen Perusahaan, Yogyakarta.
- Lains, Alfian, 1987. Peranan Kualitas Sumberdaya Penduduk Dalam Pembangunan di Indonesia. "Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas Padang.
- Lestari, Umi Sun, 1986. Pengaruh Nilai Waktu Terhadap Tingkat Fertilitas, Studi Kasus Dua Desa Di Kabupaten Jepara. *Disertasi*. Dalam Ilmu Ekonomi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
- Listyaningsih, Umi, 2004. *Dinamika Kemiskinan di Yogyakarta* Penerbit: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan. UGM, Yogyakarta.
- Maryunani, 2002. *Alokasi Dana Desa* Formulasi dan Implementasi. Penerbit: Lembaga Penelitian Ekonomi dan Pengabdian Masyarakat. Fakultas Ekonomi Universitas Bravijaya
- Masri Singarimbun, 1986. *Kemiskinan di desa Sukoharjo Daerah Istimewa Yogyakarta*. Pusat Studi Kependudukan, UGM Yogyakarta.
- , 1989. *Metodologi Penelitian Survei. Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial* Jakarta
- Meir, G.M. dan Baldwin, 1972. *Pembangunan Ekonomi*, (Terjemahan Paul Sitohang) Penerbit Bahrata, Jakarta.
- Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, 2003. *Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia* Kantor Menkokesra, Jakarta
- Mintoro, A 1995. *Distribusi Pendapatan*, Studi Dinamika Pedesaan. Penerbit Institut Pertanian Bogor
- Mubyarto, 1994. *Kewaspadaan Masyarakat Desa Tertinggal*, Aditya Media, Yogyakarta
- Mubyarto, 1996. *Kaji Tindak Program Instruksi Presiden tentang Desa Tertinggal*, Penerbit Aditya Media, Yogyakarta
- Murhadi, I Nyoman Ruja dan Singgih K., 1992. *Mobilias Penduduk Peluang Bekerja dan Modernisasi Pertanian di Pedesaan*. Suatu Studi Kasus di Kabupaten Malang, Madiun dan Mojokerto. Penerbit IKIP Malang, Jawa Timur
- Nasikun, 1992. *Pembangunan Masyarakat Desa Untuk Memerangi Kemiskinan. Suatu Tinjauan Kritis*. Makalah Disampaikan pada Seminar Nasional Pokok-pokok Pikiran Golkar tentang GBHN 1993. Yogyakarta.

- Nasution, Lutfi, 1991. *Taksonomi Kemiskinan di Indonesia: Suatu Kajian Eksploratif* Makalah Semi Loka Nasional Penanggulangan Kemiskinan, IPB, Bogor
- , 1993 *Perspektif Kemiskinan di Indonesia*. Institut Pertanian Bogor.
- Nawawi, Hadari, 1985 *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Penerbit Gadjah Mada University Press
- Nawi, Marnis, 1997. *Hubungan Sosial Ekonomi Kepala Rumah Tangga Terhadap Tingkat Kemiskinan Rumah Tangga di Sumatera Barat* Lembaga Penelitian IKIP Padang
- Nugroho, H ed, 1995 *Kemiskinan, Ketimpangan dan Pemberdayaan*, Aditya, Media, Yogyakarta.
- Nurwidiastuti, 2001 *Kemiskinan. Telaah Kritis dan Alternatif Penanggulangannya*, *Kajian Bisnis* 24 September 2001. STIE Widya Wiraha.
- Nusantoro, Adi, 1995 *Masalah Kemiskinan. Mengapa Yang Miskin tetap Miskin* *Majalah Ilmiah* Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya No 1 Tahun VIII
- Pakpahan, Agus, 1989 *Aspek Kelembagaan Dalam Pembangunan Pertanian* Pusat Studi Dinamika Pedesaan, Gobor
- , 1993. *Kemiskinan dan Keterbelakangan Masyarakat Pesisir*. *Jurnal Studi Indonesia*, Volume 3 No 1 Pusat Studi Indonesia, Universitas Terbuka, Jakarta
- Palandeng, Dylan, 1997 *Program Inpres desa Tertinggal di Desa Perbatasan* Penerbit Aditya Media Yogyakarta
- Partadiredja, Ace., 1996 *Perhitungan Pendapatan Nasional*, Penerbit LPJES, Jakarta
- Pemerintah Republik Indonesia, 2004 *Undang-Undang Nomor 32 Tentang Pemerintahan daerah*.
- Poli, W.I.M, 1993. *Kemiskinan Gejala dan Akar Suatu Pandangan Tentang Kemiskinan* Pengantar Diskusi ISEJ Cabang Ujung Pandang
- , 1994. *Ekonomi Pembangunan*. Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin, Makassar
- , 1998 a. *Pembangunan Berkelanjutan Masyarakat Kota*. Universitas Hasanuddin, Makassar
- , 1998 b *Kumpulan Rancangan Metode Penelitian dan Penulisan Ilmiah*. Universitas Hasanuddin. Ujung Pandang
- Probokusumo Pantyo Nugroho, 2004 *Partisipasi Pendampingan Program UKS Terhadap Keberhasilan Pengentasan Keluarga Miskin*. *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial* Yogyakarta, Volume III, No 7 Maret 2004 Halaman 36-49
- Purbangkoro, Murdjanto, 1994 *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kematran Bayi di Kabupaten Jember*, *Disertasi*, FPS UNAIR, Surabaya
- Qaradhawi, Yusuf, 2002 *Teologi Kemiskinan, Doktrin Dasar dan Solusi atas Problem Kemiskinan* Penerbit Mitra Pustaka Jakarta
- Radhanto, Eha, 2003. *Evaluasi Pembangunan Regional Pasca Kerukhan di Maluku* *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Indonesia* Volume 51 No 4 Halaman 479-499

- Robert, Schiller, 1979 *Urban Policy and Politics in a Bureaucratic*. Prentice-Hall Englewood Cliffs
- Rodgers, Gerry 1996. *Social Exclusion; Retic Reality; Respont*. New York International Institute for Labour Studies
- Rupelu, Djunaidi. 1992 *Penyerapan Tenaga Kerja Pada Industri Plywood Studi Kasus Pada PT WWI di Maluku Tengah*. Tesis, Universitas Gadjah mada Yogyakarta
- , 2003 *Pengembangan Kawasan Tertinggal* Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buru.
- Sahidi, 1997. *Lahirnya Kegiatan Ekonomi Di Desa Tertinggal* Penerbit Aditya Media Yogyakarta
- Salim, Firdi, 1984 *Kebijaksanaan Pemerataan Mengatasi Kemiskinan*, Jakarta. Dayu Press
- , 1990. *Pemerataan dan Pertumbuhan Ekonomi*, UII, Press, Jakarta
- Sallatang, 1986 *Nelayan dan Kemiskinan Di Sulawesi Selatan*. Makalah disampaikan Dalam Seminar Nasional Kemiskinan Di Ujung Pundang
- Samuelson, Paul and Nordhaus William D 1997 *Macro Economic*, MC Graw Hill Inc., New Jersey.
- Santiusti dan Endah Pratiwi, 1997 *Dinamika Kemiskinan di Yogyakarta*. Penerbit. Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan. UGM, Yogyakarta
- Santoso Kabul, 1995 *Kemiskinan di Pedesaan Jawa Timur*, Fakultas Ekonomi Universitas Jember
- Sayogyo, 1993 *Mengatasi Kemiskinan Membangun Pertanian*. Prisma No 3 Tahun XII.
- Sumanjatak Payaman, 1985 *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*, Penerbit, Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi UI, Jakarta.
- , 1992. *Sumberdaya Manusia Kesempatan Kerja dan Pembangunan Ekonomi* Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi UI, Jakarta
- Simatupang, Pancar, 2001 *Sektor Pertanian Sebagai Andalan Pembangunan Ekonomi Indonesia*, Buletin Agro Ekonomi, Vol I No 43, Departemen Pertanian Jakarta.
- Sinaga, Rudolf dan Benyamin White, 1984 *Beberapa Aspek Kelembagaan di Pedesaan Jawa Hubungan dengan Kemiskinan Struktural* Pusat Studi Dinamika Pedesaan IPH Bogor
- , 1986 *Pola Penguasaan Tanah di DAS Cimanuk Dahulu dan Sekarang* Studi Dinamika Pedesaan IPB Bogor.
- Soeratno dan Lincoln Arsyad, 1999 *Metode Penelitian untuk Ekonomi dan Bisnis*, YKPN, Yogyakarta
- Soeroto, 1986 *Strategi Pembangunan dan Perencanaan Tenaga Kerja*, Gadjah Mada University Press. Yogyakarta
- Soetrisno, Loekman, 1993 *Etas Kerja dan Khokesi Sosial* Penerbit, Aditya Media. Yogyakarta
- Sudjana. Brasuka dan Satish Mishara, 2004 *Growth and Tnequality in Indonesia Today: Implications For Future Development Policy*, Jakarta UNSFIR

- Sukirno, Sadono, 1978 *Ekonomi Pembangunan. Proses Masalah dan Dasar Kebijakan*, Penerbit Bina Grafika, Jakarta
- Sumodiningrat, Gunawan, 1996 *Pembangunan Daerah Dan Pemberdayaan Masyarakat* Penerbit, PT. Bina Renu Parawira Jakarta
- , 2002 Paradigma Baru Penanggulangan Kemiskinan *Majalah Suara Ekonomi* Tahun I No 4 Februari 2002
- Sunasumantri, Jujun S, 1994. *Ilmu Dalam Perspektif (Sebuah Kumpulan karangan Tentang hakikat Ilmu)*, Penerbit Yayasan Obor Indonesia, Jakarta
- Suyanto Bagong, 1995 *Perangkap Kemiskinan: Problem Dan Strategi pengentasannya* Yogyakarta Aditya Media
- Syani, 1987 *Kemiskinan dan Keterbelakangan*. Jurnal Kependudukan, PPSK, UGM, Yogyakarta
- Syukur, 1988 *Pola dan Distribusi Pendapatan Rumah Tangga di Pedesaan Jawa Barat* Pusat Agro Ekonomika Lembaga Penelitian dan Pengembangan Departemen Pertanian Bogor
- Tadjoedin Mohammad Zulfan, 2001 *Aspirasi Terhadap Kesidakmerataan. Disparitas Regional Dan Konflik Vertikal Di Indonesia*. Penerbit United Nations Support Facility For Indonesian Recovery, Jakarta
- Tamhanan, Pahlus, 1996 *Perekonomian Indonesia*, Cetakan Pertama Ghalia Indonesia, Jakarta
- , 2004 Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengurangan Kemiskinan Kasus Indonesia *Jurnal Penelitian Bidang Ekonomi* Penerbit Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya Volume 3 No 2 Tahun 2004
- Tjiptoherjanto, Priyono, 1997. *Prospek Perekonomian Indonesia Dalam Rangka Globalisasi* Penerbit Rineka Cipta, Jakarta
- Todaro, Michael.P, 1985. *Economic Development In The Third World* _Terjemahan Burhanuddin Abdulah "Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga. Jakarta Penerbit Erlangga.
- , 1989 *Perkembangan Ekonomi di Dunia Ketiga*, Cetakan Pertama, PT Gelora Aksara Pratama, Jakarta
- Triyono, Lambang, 1995 *Tolok ukur Kemiskinan Harus Menyentuh Aspek Keadilan. Perangkap Kemiskinan. Problem dan Strategi Pengentasannya* Airlangga University Press
- Wahyuni, Ekawati. 1993 *Strategi Nelayan dalam Memenuhi Kebutuhan Ekonomi Keluarga* Penerbit Institut Pertanian Bogor
- World Bank, 1990 *Employment and Income Distribution in The Indonesia*. Washington
- Zadjuhi, Imam Suroso, 1997a *Kaji Tindak Program Inpres Desa Tertinggal di Madura, Jawa Timur* Penerbit Aditya, Yogyakarta
- , 1997b. Ketenagakerjaan di Jawa Timur Telaah Tentang Kesempatan Kerja, Kesejahteraan Tenaga Kerja dan Kualitas Sumberdaya Manusia (SDM) Makalah malam Seminar Jawa Timur menyongsong abad 21 Prospek Investasi Peluang Usaha

2. Jumlah anggota keluarga : Orang
3. Berapa Jumlah anggota keluarga yang bekerja : Orang
4. Berapa luas lahan lahan yang dimiliki Ha
5. Lahan tersebut digunakan untuk tanaman umur pendek apa saja dan berapa luasnya ?

No	Jenis Tanaman	Luas (Ha)	Produksi (Ton/Kg)
1.	Sayur-sayuran		
2.	Buah-buahan		
3.	Kacang-kacangan		
4.			
5.			

6. Untuk menanam sayur-sayuran, buah-buahan dan kacang-kacangan diperlukan bahan dan alat apa saja
1. Bibit berapa banyak harganya berapa Rp
 2. Pupuk berapa banyak harganya berapa Rp
 3. Pacul berapa banyak harganya berapa Rp
 4. Sabit berapa banyak harganya berapa Rp
7. Berapa harga jual dari: 1. Sayur-sayuran per kg Rp
2. Buah-buahan per kg Rp.....
3. Kacang-kacangan per Kg Rp.....
8. Dalam satu tahun berapa kali produksi
9. Lanjutkan dari pertanyaan No 5 Lahan tersebut digunakan untuk tanaman umur panjang apa saja dan berapa luasnya ?

No	Jenis Tanaman	Luas (Ha)	Produksi (Ton/Kg)
1.	Kelapa		
2.	Cengkih		
3.	Pala		
4.	Coklat		
5.	Metc		

10. Untuk menanam Tanaman diperlukan bahan dan alat apa saja

1. Bibit berapa banyak harganya berapa Rp
2. Pupuk berapa banyak harganya berapa Rp
3. Pacul berapa banyak harganya berapa Rp
4. Sabit berapa banyak harganya berapa Rp

11. Berapa harga jual dari. 1. Kelapa per kg Rp

2. Cengkih per kg Rp

3. Pala per Kg Rp

4. Coklat per kg Rp

5. Mete per Kg Rp

12. Berapa hasil penjualan tersebut:

Hasil penjualan barang Rp

Modal dan biaya yang dikeluarkan Rp

Hasil penjualan Rp

Pendapatan rerata per orang per tahun Rp

13. Bagaimana tanggapan Bapak dengan pendapatan yang ada: (1) $Y = C$, (2)

$Y > C$, (3) $Y < C$

14. Berapa orang yang berusaha dan atau bekerja di rumah ini orang

15. Total penghasilan :

Tabel 2. Penghasilan Keluarga

No.	Penghasilan Keluarga	Jumlah
	Penghasilan utama/Pertanian/Perkebunan	
	Penghasilan Tambahan:	
	Peternakan	
	Perikanan	

16. Total pengeluaran:

Tabel 3 Pengeluaran Tangga

No.	Jenis Kebutuhan	Harga
	Makanan	
	Minuman	
	Pakaian	
	Perumahan	
	Pendidikan	
	Kesehatan	
	Rekreasi	
	Sosial	
	Dll	

III. BUDAYA/ETNIS

1. Bapak asalnya dari mana/atau suku apa:
 - 1) Maluku
 - 2) Bugis
 - 3) Buton
 - 4) Jawa
2. Apakah dengan pendapatan Bapak/Ibu seperti keadaan sekarang ini, Bapak/Ibu tidak berusaha untuk meningkatkan? (beri tanda X untuk jawaban yang dimaksud)
 - 1) Tidak perlu karena sudah takdir
 - 2) Kalau ada kesempatan akan berusaha
 - 3) Akan berusaha merubahnya agar lebih baik dari keadaan sekarang
3. Apakah Bapak/Ibu akan merubah usaha atau pekerjaan yang telah Bapak/Ibu tekuni sekarang ini, agar penghasilan bertambah ?
 - 1) Tidak, karena usaha/pekerjaan ini sudah turun temurun
 - 2) Ada niat (angan-angan) untuk berusaha/mencari pekerjaan lain
 - 3) Sekarang sedang merintis pekerjaan baru yaitu sebagai
4. Apakah Bapak/Ibu tidak ingin pindah tempat tinggal untuk mencari penghidupan yang lebih baik ?
 - 1) Tidak perlu
 - 2) Kalau ada yang mengajak
 - 3) Ada rencana pindah ke
5. Apabila Saudara diberi pinjaman uang sebesar ± Rp. 3.000.000,- akan Saudara pakai untuk apa ?
 - 1) Memperbaiki rumah, beli pakaian, menghidanakan anak, mengawinkan anak (hal-hal yang bersifat konsumtif)
 - 2) Beli benih, beli peralatan, memperbaiki peralatan yang telah ada seperti
 - 3) Menambah modal usaha

IV. TINGKAT KESEHATAN

1. Apakah keluarga Bapak/Ibu selama setahun terakhir ini menderita penyakit "

Jawab .

- 1) Ya
- 2) Tidak

2. Apabila ya, jenis-jenis penyakit apa yang menyerang seluruh anggota keluarga benanda X, untuk jawaban yang dimaksud Jawab :

- 1) Influenza
- 2) Diare
- 3) Batuk Rejan
- 4) Malaria
- 5) Cacar
- 6) Penyakit kuning/fever/hepatitis
- 7) Gatal-gatal
- 8) Lainnya, sebutkan gejalanya

3. Berapa lama anggota keluarga menderita sakit Jawab :

- 1) Anggota 1 hari
- 2) Anggota 2 hari
- 3) Anggota 3 hari
- 4) Anggota 4 hari
- 5) Anggota 5 hari

Jumlah sakit : selama setahun

6. Apakah ada anggota keluarga yang meninggal dalam satu tahun terakhir ini:

- 1) Ada, berapa orang orang
- 2) tidak ada.

V. FASILITAS PUBLIK/PASAR

1. Apakah di tempat atau di Desa Bapak sudah tersedia/ada pasar:
 - 1) Ada
 - 2) Tidak
2. Kalau ada, bagaimana bentuk pasar tersebut
 - 1) Permanen
 - 2) Semi Permanen
 - 3) Darurat
3. Lanjutan dari pert. 2 apakah pasar tersebut sudah berfungsi atau digunakan
 - 1) Sudah
 - 2) Belum
4. Kalau belum kenapa
 - 1) Tidak tahu
 - 2) Kemauan orang di atas
 - 3) tujuan proyek
5. Lanjutan pert no. 3 kalau sudah berfungsi apakah Bapak memanfaatkannya
 - 1) memanfaatkan
 - 2) Tidak
6. Lanjutan dari pert. 1 jika jawabannya tidak bapak berjualan di mana:
 - 1) Rumah sendiri
 - 2) Rumah Kontrakan
 - 3) Lainnya
 - 4) Di Kecamatan
 - 5) Di Kabupaten
7. Apakah di Kecamatan Bapak sudah tersedia/ada pasar:
 - 1) Ada
 - 2) Tidak
8. Kalau ada, bagaimana bentuk pasar tersebut
 - 1) Permanen
 - 2) Semi Permanen
 - 3) Darurat
9. Lanjutan dari pert. 8 apakah pasar tersebut sudah berfungsi atau digunakan

- 1) Sudah
- 2) Belum

10. Kalau belum kenapa

- 1) Tidak tahu
- 2) Kemauan orang di atas
- 3) tujuan proyek

11. Jika jawaban No 9 sudah apakah Bapak memanfaatkan pasar tersebut:

- 1) memanfaatkan
- 2) Tidak

12. Jarak dari tempat Bapak ke Pasar Kecamatan berapa Km

- 1) kurang dari 5 km
- 2) 5 s/d 10 Km
- 3) Lebih dari 10 Km

13. Ditempuh dengan cara apa:

- 1) Jalan Kaki
- 2) Oyek
- 3) Kendaraan Umum

14. Berapa biaya atau ongkos yang dikeluarkan Rp

15. Apakah di Kabupaten Bapak sudah tersedia/ada pasar:

- 1) Ada
- 2) Tidak

16. Kalau ada, bagaimana bentuk pasar tersebut

- 1) Permanen
- 2) Semi Permanen
- 3) Darurat

17. Lanjutan dari pert. 15 apakah pasar tersebut sudah berfungsi atau digunakan

- 1) Sudah
- 2) Belum

18. Jika jawaban No 17 sudah apakah Bapak memanfaatkan pasar tersebut:

- 3) memanfaatkan

4) Tidak

19. Jika memanfaatkan berapa biaya yang harus dikeluarkan Rp

20. Jika jawaban no 18 tidak apa alasannya

- 1) Biayanya terlalu mahal
- 2) tidak mempunyai modal yang cukup
- 3) jarak dengan tempat tinggal terlalu jauh
- 4) Prosedurnya terlalu panjang
- 5) Persyaratannya terlalu banyak

VI. FASILITAS PUBLIK/MODAL

1. Bagaimana tanggapan Bapak terhadap modal usaha saat ini:

1. Lebih dari cukup
2. Cukup
3. Tidak cukup
4. Kurang
5. Sangat kurang

2. Apakah Bapak berkeinginan untuk menambah modal usaha :

1. Sangat berkeinginan
2. Berkeinginan
3. Tidak berkeinginan

3. Jika jawaban No 2 adalah 1 dan 2 apa alasannya:

1. Memperluas usaha
2. Terbuka peluang
3. Lainnya

4. Jika jawaban No 2 tidak berkeinginan apa alasannya:

1. Banyak saingan
2. Sulit mendapat pinjaman
3. tidak punya jaringan usaha
4. Lainnya

5. Jika jawaban No 2 adalah 1 dan 2 apakah sudah mendapat pinjaman dari: Bank atau Koperasi, :
- 1.Sudah
 - 2.Belum
6. Jika jawaban No 5 adalah sudah apakah pinjaman tersebut sesuai yang dibutuhkan:
- 1.Sesuai
 - 2.Tidak sesuai
7. Jika jawaban No 5 belum apa alasannya:
- 1.Tidak ada koneksi
 - 2.Persyaratannya banyak
 - 3.Procedurnya berbelit-belit
 - 4.Tidak memiliki agunan
8. Apakah Bapak masih berkeinginan untuk mendapatkan pinjaman Bak ?
- 1.Sangat berkeinginan
 - 2.Berkeinginan
 - 3.Tidak berkeinginan
9. Apak saran Bapak:
- 1.Bank harus lebih berpihak kepada usaha kecil
 - 2.Procedurnya tidak berbelit-belit
 - 3.Persyaratannya dipermudah
 - 4.Perlu perhatian pemerintah
 - 5.Perlu perhatian LSM dll

Lampiran 2 : Hasil Analisis Model

Tuesday, June 28, 2005 02:12:31

Annex

by James L. Arbuckle

Version 4.01



**Copyright 1994-1999 SmallWaters Corporation
1507 E. 53rd Street - #452
Chicago, IL 60615 USA
773-867-8635
Fax: 773-855-6252
<http://www.smallwaters.com>**

Title

KONFIRMASI FAKTOR SOSEK

NOTE:

Bootstrap confidence intervals are not available when the Bollen-Stine bootstrap is performed.

NOTE:

Details of each bootstrap sample are not available for a parametric bootstrap.

Your model contains the following variables

x1	observed	endogenous
x2	observed	endogenous
x4	observed	endogenous
x3	observed	endogenous
e1	unobserved	exogenous
SOSEK	unobserved	exogenous
e4	unobserved	exogenous
e2	unobserved	exogenous
e3	unobserved	exogenous

Number of variables in your model: 9
 Number of observed variables: 4
 Number of unobserved variables: 5
 Number of exogenous variables: 5
 Number of endogenous variables: 4

Summary of Parameters

	Weights	Covariances	Variances	Means	Intercepts	Total
Fixed:	6	0	0	0	6	
Labeled:	0	0	0	0	0	
Unlabeled:	2	0	5	4	11	
Total:	8	0	5	4	17	

NOTE:

The model is recursive.

Sample size: 106

Sample Covariances

	x3	x4	x2	x1
x3	0.608			
x4	0.221	0.349		
x2	0.251	0.296	0.340	
x1	0.187	0.221	0.249	0.404

Eigenvalues of Sample Covariances

4.451e-002 1.672e-001 3.445e-001 1.145e+000

Condition number of Sample Covariances = 2.571571e+001

Sample Correlations

	x3	x4	x2	x1
x3	1.000			
x4	0.479	1.000		
x2	0.551	0.858	1.000	
x1	0.377	0.588	0.671	1.000

Eigenvalues of Sample Correlations

1.288e-001 4.336e-001 6.459e-001 2.792e+000

Condition number of Sample Correlations = 2.167047e+001

Sample Means

x3	x4	x2	x1
4.176	4.324	4.259	4.148

Determinant of sample covariance matrix = 2.9340e-003

Model: Default model

Computation of degrees of freedom

Number of distinct sample moments: 14
 Number of distinct parameters to be estimated: 11

Degrees of freedom: 3

0e	2 0.0e+000	-2.7812e-001	1.00e+004	2.33596004294e+002	0
1.00e+004					
1e*	2 0.0e+000	-4.9487e-001	1.69e+000	5.74998669807e+001	20 6.51e-001
001					
2e*	0 5.6e+003	0.0000e+000	3.52e-001	1.48568923141e+001	6 7.19e-001
001					
3e	0 5.7e+002	0.0000e+000	7.41e-001	1.40812594183e+001	2
0.00e+000					
4e	0 9.3e+002	0.0000e+000	1.67e-001	2.86516015927e+000	1
1.07e+000					
5e	0 8.5e+002	0.0000e+000	1.43e-001	1.37623755198e+000	1
1.06e+000					
6e	0 9.6e+002	0.0000e+000	2.84e-002	1.25593170993e+000	1
1.04e+000					
7e	0 9.8e+002	0.0000e+000	3.85e-003	1.25509788328e+000	1
1.01e+000					
8e	0 9.4e+002	0.0000e+000	3.18e-005	1.25509780720e+000	1
1.00e+000					

Minimum was achieved

Chi-square = 1.255
 Degrees of freedom = 3
 Probability level = 0.740

Maximum Likelihood Estimates

Regression Weights:		Estimate	S.E.	C.R.	Label
x2 ←	SOSEK	1.163	0.085	13.729	par-1
x4 ←	SOSEK	1.000			
x1 ←	SOSEK	0.864	0.103	8.423	par-2
x3 ←	SOSEK	1.000			

Standardized Regression Weights: **Estimate**

x2 ←	SOSEK	0.892
x4 ←	SOSEK	0.859
x1 ←	SOSEK	0.676
x3 ←	SOSEK	0.607

Intercepts:		Estimate	S.E.	C.R.	Label
x1		4.148	0.061	67.510	par-3
x2		4.259	0.056	75.538	par-4
x3		4.176	0.079	52.733	par-5
x4		4.324	0.056	77.214	par-6

Variances:		Estimate	S.E.	C.R.	Label
SOSEK		0.248	0.045	5.556	par-7
e1		0.219	0.031	6.976	par-8
e4		0.088	0.017	5.210	par-9
e2		0.005	0.016	0.341	par-10
e3		0.423	0.059	7.138	par-11

Squared Multiple Correlations: **Estimate**

x3	0.369
x4	0.738
x2	0.984
x1	0.457

Implied (for all variables) Covariances

	SOSEK	x3	x4	x2	x1
SOSEK	0.248				
x3	0.248	0.671			
x4	0.248	0.248	0.336		
x2	0.288	0.288	0.288	0.340	
x1	0.214	0.214	0.214	0.249	0.404

Implied (for all variables) Correlations

	SOSEK	x3	x4	x2	x1
SOSEK	1.000				
x3	0.607	1.000			
x4	0.859	0.522	1.000		
x2	0.992	0.603	0.852	1.000	
x1	0.676	0.411	0.581	0.671	1.000

Implied (for all variables) Means

	SOSEK	x3	x4	x2	x1
	0.000	4.176	4.324	4.259	4.148

Implied Covariances

	x3	x4	x2	x1
x3	0.671			
x4	0.248	0.336		
x2	0.288	0.288	0.340	
x1	0.214	0.214	0.249	0.404

Implied Correlations

	x3	x4	x2	x1
x3	1.000			
x4	0.522	1.000		
x2	0.603	0.852	1.000	

x1	0.411	0.581	0.671	1.000
----	-------	-------	-------	-------

Implied Means

x3	x4	x2	x1
4.176	4.324	4.259	4.148

Residual Covariances

	x3	x4	x2	x1
x3	-0.0631			
x4	-0.0268	0.0131		
x2	-0.0372	0.0077	0.0000	
x1	-0.0269	0.0067	-0.0001	0.0000

Residual Means

x3	x4	x2	x1
-8.882e-016	0.000e+000	0.000e+000	0.000e+000

Standardized Residual Covariances

	x3	x4	x2	x1
x3	-0.687			
x4	-0.517	0.286		
x2	-0.689	0.181	0.000	
x1	-0.495	0.162	-0.001	0.000

Standardized Residual Means

x3	x4	x2	x1
-1.122e-014	0.000e+000	0.000e+000	0.000e+000

Factor Score Weights

	<u>x3</u>	<u>x4</u>	<u>x2</u>	<u>x1</u>	
SOSEK	0.009	0.042	0.793	0.015	

Total Effects

	<u>SOSEK</u>
x3	1.000
x4	1.000
x2	1.163
x1	0.864

Standardized Total Effects

	<u>SOSEK</u>
x3	0.607
x4	0.659
x2	0.992
x1	0.676

Direct Effects

	<u>SOSEK</u>
x3	1.000
x4	1.000
x2	1.163
x1	0.864

Standardized Direct Effects

	<u>SOSEK</u>
x3	0.607
x4	0.859
x2	0.992

	par-1	par-2	par-3	par-4	par-5	par-6	par-7
par-1	0.00718						
par-2	0.00296	0.01052					
par-3	-0.00000	0.00000	0.00378				
par-4	-0.00000	-0.00000	0.00232	0.00318			
par-5	-0.00000	-0.00000	0.00200	0.00269	0.00627		
par-6	-0.00000	-0.00000	0.00200	0.00269	0.00231	0.00314	
par-7	-0.00231	-0.00124	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00199
par-8	0.00046	-0.00004	-0.00000	0.00000	-0.00000	0.00000	-0.00010
par-9	0.00070	0.00008	-0.00000	-0.00000	-0.00000	0.00000	-0.00017
par-10	-0.00069	-0.00004	0.00000	-0.00000	0.00000	-0.00000	
0.00019							
par-11	0.00037	-0.00012	-0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-
0.00004							

	par-8	par-9	par-10	par-11
par-8	0.00099			
par-9	0.00009	0.00029		
par-10	-0.00013	-0.00018	0.00025	
par-11	0.00008	0.00011	-0.00016	0.00352

Correlations of Estimates

	par-1	par-2	par-3	par-4	par-5	par-6	par-7
par-1	1.000						
par-2	0.341	1.000					
par-3	-0.000	0.000	1.000				
par-4	-0.000	-0.000	0.671	1.000			
par-5	-0.000	-0.000	0.411	0.603	1.000		
par-6	-0.000	-0.000	0.581	0.852	0.522	1.000	
par-7	-0.612	-0.270	0.000	0.000	0.000	0.000	1.000
par-8	0.171	-0.011	-0.000	0.000	-0.000	0.000	-0.070
par-9	0.492	0.046	-0.000	-0.000	-0.000	0.000	-0.222
par-10	-0.662	-0.022	0.000	-0.000	0.000	-0.000	0.273
par-11	0.074	-0.019	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.016

	par-8	par-9	par-10	par-11
par-8	1.000			
par-9	0.172	1.000		
par-10	-0.258	-0.665	1.000	

par-11 0.043 0.108 -0.168 1.000

Critical Ratios for Differences between Parameters

	par-1	par-2	par-3	par-4	par-5	par-6	par-7
par-1	0.000						
par-2	-2.757	0.000					
par-3	28.527	27.469	0.000				
par-4	30.428	29.010	2.314	0.000			
par-5	25.983	25.560	0.357	-1.306	0.000		
par-6	31.130	29.610	3.259	2.120	2.143	0.000	
par-7	-7.799	-5.037	-51.393	-55.824	-43.234	-56.965	0.000
par-8	-11.081	-5.991	-56.928	-62.585	-46.441	-63.922	-0.502
par-9	-13.816	-7.519	-63.712	-70.863	-50.485	-72.417	-3.124
par-10	-12.062	-8.244	-65.275	-72.614	-51.635	-74.189	-5.627
par-11	-7.414	-3.687	-43.609	-46.865	-37.924	-47.812	2.354

	par-8	par-9	par-10	par-11
par-8	0.000			
par-9	-3.972	0.000		
par-10	-5.525	-2.762	0.000	
par-11	3.098	5.599	6.538	0.000

Bootstrap Results

Summary of Bootstrap Iterations

iters	m0	m1	m2
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0
5	0	1	0
6	0	27	0
7	0	56	0
8	0	65	0
9	0	38	0
10	0	8	0
11	0	4	0


```

12 0 1 0
13 0 0 0
14 0 0 0
15 0 0 0
16 0 0 0
17 0 0 0
18 0 0 0
19 0 0 0

```

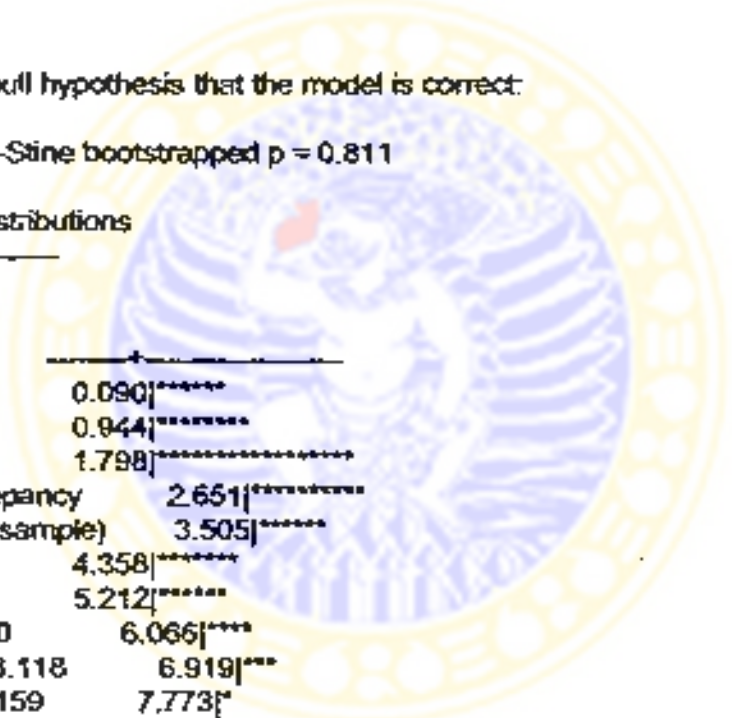
```
Total 0 200 0
```

0 bootstrap samples were unused because of a singular covariance matrix.
0 bootstrap samples were unused because a solution was not found.
200 usable bootstrap samples were obtained.

Testing the null hypothesis that the model is correct:

Bollen-Stine bootstrapped p = 0.811

Bootstrap Distributions



```

-----+-----
0.090|*****
0.044|*****
1.798|*****
ML discrepancy 2.651|*****
(implied vs sample) 3.505|*****
4.358|*****
5.212|*****
N = 200 6.066|****
Mean = 3.118 6.919|***
S. e. = 0.159 7.773|**
8.627|*
9.480|*
10.334|*
11.187|
12.041|*
-----+-----

```

Summary of models

```

-----+-----
Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF
-----+-----

```

Default model	11	1.255	3	0.740	0.418
Saturated model	14	0.000	0		
Independence model	4	1867.845	10	0.000	186.784

Model	DELTA1	RHO1	DELTA2	RHO2		
	NFI	RFI	IFI	TLI	CFI	
Default model	0.999	0.998	1.001	1.003	1.000	
Saturated model	1.000		1.000		1.000	
Independence model	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

Model	PRATIO	PNFI	PCFI
Default model	0.300	0.300	0.300
Saturated model	0.000	0.000	0.000
Independence model	1.000	0.000	0.000

Model	NCP	LO 90	HI 90
Default model	0.000	0.000	4.226
Saturated model	0.000	0.000	0.000
Independence model	1857.845	1719.485	2003.552

Model	FMIN	F0	LO 90	HI 90
Default model	0.012	0.000	0.000	0.039
Saturated model	0.000	0.000	0.000	0.000
Independence model	17.456	17.363	16.070	18.725

Model	RMSEA	LO 90	HI 90	PCLOSE
Default model	0.000	0.000	0.115	0.609
Independence model	1.318	1.268	1.368	0.000

Model	AIC	BCC	BIC	CAIC
-------	-----	-----	-----	------

Default model 23.255 24.334
 Saturated model 28.000 29.373
 Independence model 1875.845 1876.237

Model	ECVI	LO 90	HI 90	MECVI
Default model	0.217	0.234	0.273	0.227
Saturated model	0.262	0.262	0.262	0.275
Independence model	17.531	16.238	18.893	17.535

Model	HOELTER	HOELTER
	.05	.01
Default model	667	968
Independence model	2	2

Execution time summary:

Minimization: 0.643
 Miscellaneous: 1.220
 Bootstrap: 0.218
 Total: 2.281

Monday, June 27, 2005 07:05:22



Title

KONFIRMASI FAKTOR AKSESIBILITAS

Your model contains the following variables

x6	observed	endogenous
x7	observed	endogenous
x5	observed	endogenous
e3	unobserved	exogenous
e2	unobserved	exogenous
o4	unobserved	exogenous
AKSESSIBILITAS	unobserved	exogenous

Number of variables in your model:	7
Number of observed variables:	3
Number of unobserved variables:	4
Number of exogenous variables:	4
Number of endogenous variables:	3

Summary of Parameters

	Weights	Covariances	Variances	Means	Intercepts	Total
Fixed:	5	0	0	0	5	
Labeled:	0	0	0	0	0	0
Unlabeled:	1	0	4	0	0	5
Total:	6	0	4	0	0	10

NOTE:

The model is recursive.

Sample size: 108

Sample Covariances

	x5	x7	x6
x5	0.719		
x7	0.107	0.401	
x6	0.399	0.137	1.053

Eigenvalues of Sample Covariances

3.676e-001 4.554e-001 1.350e+000

Condition number of Sample Covariances = 3.672243e+000

Sample Correlations

	x5	x7	x6
x5	1.000		
x7	0.199	1.000	
x6	0.458	0.211	1.000

Eigenvalues of Sample Correlations

5.415e-001 8.600e-001 1.599e+000

Condition number of Sample Correlations = 2.952225e+000

Determinant of sample covariance matrix = 2.2599e-001

Model: Default model

Computation of degrees of freedom

Number of distinct sample moments: 6
 Number of distinct parameters to be estimated: 5

 Degrees of freedom: 1

0e 2 0.0e+000 -4.9045e-002 1.00e+004 5.17095712605e+001 0
 1.00e+004
 1e* 0 1.8e+001 0.0000e+000 9.96e-001 3.95293014222e+000 20 7 01e-
 001
 2e 0 1.0e+001 0.0000e+000 3.21e-001 5.02594891893e-001 1 9,22e-
 001
 3e 0 8.0e+000 0.0000e+000 8.49e-002 2.53667332961e-001 1
 1.00e+000
 4e 0 8.3e+000 0.0000e+000 3.94e-003 2.52907473218e-001 1
 1.00e+000
 5e 0 8.3e+000 0.0000e+000 2.60e-005 2.52907440070e-001 1
 1.00e+000

Minimum was achieved

Chi-square = 0.253
 Degrees of freedom = 1
 Probability level = 0.615

Maximum Likelihood Estimates

Regression Weights:	Estimate	S.E.	C.R.	Label
x6 <----- AKSESSIBILITAS	1.000			
x7 <----- AKSESSIBILITAS	0.295	0.124	2.384	par-1
x5 <----- AKSESSIBILITAS	1.000			

Standardized Regression Weights: Estimate

x6 ←	AKSESSIBILITAS	0.617
x7 ←	AKSESSIBILITAS	0.294
x5 ←	AKSESSIBILITAS	0.739

Variances: Estimate S.E. C.R. Label

AKSESSIBILITAS	0.396	0.092	4.313	par-2
e3	0.645	0.114	5.644	par-3
e2	0.367	0.053	6.932	par-4
e4	0.329	0.086	3.847	par-5

Squared Multiple Correlations: Estimate

x5	0.546
x7	0.086
x6	0.380

Implied (for all variables) Covariances

	AKSESSIB	x5	x7	x6
AKSESSIB	0.396			
x5	0.396	0.725		
x7	0.117	0.117	0.401	
x6	0.396	0.396	0.117	1.041

Implied (for all variables) Correlations

	AKSESSIB	x5	x7	x6
AKSESSIB	1.000			
x5	0.739	1.000		
x7	0.294	0.217	1.000	
x6	0.617	0.456	0.181	1.000

Implied Covariances

	x5	x7	x6
x5	0.725		
x7	0.117	0.401	
x6	0.396	0.117	1.041

Implied Correlations

	x5	x7	x6
x5	1.000		
x7	0.217	1.000	
x6	0.456	0.181	1.000

Residual Covariances

	x5	x7	x6
x5	-0.0060		
x7	-0.0103	0.0000	
x6	0.0029	0.0201	0.0117

Standardized Residual Covariances

	x5	x7	x6
x5	-0.060		
x7	-0.192	0.000	
x6	0.031	0.317	0.082

Factor Score Weights

	x5	x7	x6
AKSESSIB	0.413	0.110	0.211

Total Effects

	AKSESSIB
x5	1.000
x7	0.295
x6	1.000

Standardized Total Effects

	AKSESSIB
x5	0.739
x7	0.294
x6	0.617

Direct Effects

	AKSESSIB
x5	1.000
x7	0.295
x6	1.000

Variance-covariance Matrix of Estimates

	par-1	par-2	par-3	par-4	par-5
par-1	0.01535				
par-2	-0.00303	0.00843			
par-3	0.00033	-0.00101	0.01308		
par-4	-0.00130	0.00023	0.00001	0.00280	
par-5	0.00263	-0.00296	-0.00132	-0.00036	0.00731

Correlations of Estimates

	par-1	par-2	par-3	par-4	par-5
par-1	1.000				
par-2	-0.266	1.000			
par-3	0.024	-0.096	1.000		
par-4	-0.189	0.047	0.002	1.000	
par-5	0.248	-0.377	-0.135	-0.079	1.000

Critical Ratios for Differences between Parameters

	par-1	par-2	par-3	par-4	par-5
par-1	0.000				
par-2	0.582	0.000			
par-3	2.100	1.627	0.000		
par-4	0.494	-0.283	-2.214	0.000	
par-5	0.254	-0.455	-2.085	-0.361	0.000

Summary of models

Model NPAR	CMIN	DF	P	CMIN/DF
Default model 5	0.253	1	0.615	0.253
Saturated model 6	0.000	0		
Independence model 3	31.587	3	0.000	10.529

Model	RMR	GFI	AGFI	PGFI
Default model	0.011	0.998	0.991	0.156
Saturated model	0.000	1.000		
Independence model	0.178	0.836	0.672	0.418

Model	DELTA1	RHO1	DELTA2	RHO2
Default model	0.992	0.976	1.024	1.078
Saturated model	1.000		1.000	1.000
Independence model	0.000	0.000	0.000	0.000

Model	PRATIO	PNFI	PCFI
Default model	0.333	0.331	0.333
Saturated model	0.000	0.000	0.000
Independence model	1.000	0.000	0.000

Model	NCP	LO 90	HI 90
Default model	0.000	0.000	4.432
Saturated model	0.000	0.000	0.000
Independence model	28.587	14.120	50.603

Model	FMIN	F0	LO 90	HI 90
Default model	0.002	0.000	0.000	0.041
Saturated model	0.000	0.000	0.000	0.000
Independence model	0.295	0.267	0.132	0.472

Model	RMSEA	LO 90	HI 90	PCLOSE
Default model	0.000	0.000	0.204	0.660
Independence model	0.298	0.210	0.397	0.000

Model	AIC	BCC	BIC	CAIC
Default model	10.253	10.641	29.157	28.664
Saturated model	12.000	12.466	34.684	34.093
Independence model	37.587	37.820	48.929	48.634

Model	ECVI	LO 90	HI 90	MECVI
Default model	0.096	0.103	0.144	0.099
Saturated model	0.112	0.112	0.112	0.117
Independence model	0.351	0.216	0.556	0.353

Model	HOELTER	
	.05	.01
Default model	1626	2806
Independence model	27	39

Execution time summary:

Minimization: 0.016
Miscellaneous: 0.093
Bootstrap: 0.000
Total: 0.109



Model_jengkap
Monday, June 27, 2005 06:32:57



Title

MODEL LENGKAP KEMISKINAN

Your model contains the following variables

x1	observed	endogenous
x2	observed	endogenous
x3	observed	endogenous
x4	observed	endogenous
x7	observed	endogenous
x5	observed	endogenous
x6	observed	endogenous
x8	observed	endogenous

Keterbatasan_Akses	unobserved	endogenous
KEMISKINAN	unobserved	endogenous

e1	unobserved	exogenous
e2	unobserved	exogenous
e3	unobserved	exogenous
SOSEK	unobserved	exogenous
e4	unobserved	exogenous
e7	unobserved	exogenous
e5	unobserved	exogenous
e6	unobserved	exogenous
e10	unobserved	exogenous

Number of variables in your model:	19
Number of observed variables:	8
Number of unobserved variables:	11
Number of exogenous variables:	9
Number of endogenous variables:	10

Summary of Parameters

	Weights	Covariances	Variances	Means	Intercepts	Total
Fixed:	17	0	0	0	17	
Labeled:	0	0	0	0	0	
Unlabeled:	2	0	9	0	11	
Total:	19	0	9	0	28	

NOTE:

The model is recursive.

Sample size: 108

Sample Covariances

	x8	x6	x5	x7	x4	x3	x2
x8	0.376						
x6	0.145	1.053					
x5	0.166	0.399	0.719				
x7	0.281	0.137	0.107	0.401			
x4	0.116	0.074	0.059	0.151	0.352		
x3	0.145	0.141	0.189	0.134	0.223	0.614	
x2	0.106	0.001	0.032	0.132	0.298	0.253	0.343
x1	0.111	0.026	0.068	0.119	0.223	0.189	0.251
x1							
x1	0.408						

Eigenvalues of Sample Covariances

4.122e-002 9.943e-002 1.686e-001 3.134e-001 4.604e-001 4.629e-001
 1.058e+000 1.663e+000

Condition number of Sample Covariances = 4.035531e+001

Sample Correlations

	x8	x6	x5	x7	x4	x3	x2
x8	1.000						
x6	0.231	1.000					
x5	0.319	0.458	1.000				
x7	0.724	0.211	0.199	1.000			
x4	0.320	0.121	0.117	0.401	1.000		
x3	0.302	0.176	0.284	0.271	0.479	1.000	
x2	0.296	0.002	0.065	0.355	0.858	0.551	1.000
x1	0.265	0.040	0.123	0.295	0.588	0.377	0.671

	x1
x1	1.000

Eigenvalues of Sample Correlations

1.172e-001 2.543e-001 4.062e-001 5.520e-001 6.209e-001
 1.033e+000
 1.581e+000 3.436e+000

Condition number of Sample Correlations = 2.931392e+001

Determinant of sample covariance matrix = 8.0244e-005

Model: Default model

Computation of degrees of freedom

Number of distinct sample moments: 36
 Number of distinct parameters to be estimated: 11

Degrees of freedom: 25

0e	2	0.0e+000	-1.5804e-001	1.00e+004	3.72026647471e+002	0
1e	1	0.0e+000	-2.1472e-001	1.31e+000	2.22876695957e+002	20 9.28e-001
2e	0	3.5e+001	0.0000e+000	5.37e-001	1.79211044359e+002	5 8.09e-001
3e	0	3.5e+001	0.0000e+000	2.39e-001	1.70488711111e+002	1 1.07e+000
4e	0	3.3e+001	0.0000e+000	5.57e-002	1.70198414320e+002	1 1.01e+000
5e	0	3.3e+001	0.0000e+000	2.84e-003	1.70196537663e+002	1 1.00e+000
6e	0	3.3e+001	0.0000e+000	1.29e-005	1.70196537626e+002	1 1.00e+000

Minimum was achieved

Chi-square = 170,197
 Degrees of freedom = 25
 Probability level = 0.000

Maximum Likelihood Estimates

Regression Weights:	Estimate	S.E.	C.R.	Label
Keterbatasan_Akses ← SOSEK	0.050	0.099	0.505	par-2
KEMISKINAN ← Keterbatasan_Akses	1.000			
KEMISKINAN ← SOSEK	1.000			
x2 ← SOSEK	1.258	0.088	14.306	par-1
x4 ← SOSEK	1.000			
x1 ← SOSEK	1.000			
x3 ← SOSEK	1.000			
x7 ← Keterbatasan_Akses	1.000			
x5 ← Keterbatasan_Akses	1.000			
x6 ← Keterbatasan_Akses	1.000			
x8 ← KEMISKINAN	1.000			

Standardized Regression Weights:	Estimate
Keterbatasan_Akses ← SOSEK	1.000
KEMISKINAN ← Keterbatasan_Akses	0.567
KEMISKINAN ← SOSEK	0.048
KEMISKINAN ← Keterbatasan_Akses ← SOSEK	0.058
x2 ← SOSEK	0.972
x4 ← SOSEK	0.637
x1 ← SOSEK	0.700
x3 ← SOSEK	0.575
x7 ← Keterbatasan_Akses	0.036
x5 ← Keterbatasan_Akses	0.027
x6 ← Keterbatasan_Akses	0.022
x8 ← KEMISKINAN	0.599

Variances:	Estimate	S.E.	C.R.	Label
SOSEK	0.205	0.036	5.713	par-3
e1	0.214	0.031	6.860	par-4
e2	0.019	0.015	1.211	par-5
e3	0.415	0.059	7.100	par-6
e4	0.088	0.015	5.725	par-7
e7	0.391	0.057	6.839	par-8
e5	0.716	0.098	7.301	par-9
e6	1.052	0.144	7.313	par-10
e10	0.405	0.061	6.658	par-11

Squared Multiple Correlations: **Estimate**

x8	0.358
x6	0.000
x5	0.001
x7	0.001
x4	0.701
x3	0.331
x2	0.948
x1	0.490

Implied (for all variables) Covariances

	SOSEK	Keterbat	KEMISKIN	x8	x6	x5	x7
SOSEK	0.205						
Keterbeta	0.010	0.001					
KEMISKINA	0.216	0.011	0.226				
x8	0.216	0.011	0.226	0.632			
x6	0.010	0.001	0.011	0.011	1.052		
x5	0.010	0.001	0.011	0.011	0.001	0.716	
x7	0.010	0.001	0.011	0.011	0.001	0.001	0.391
x4	0.205	0.010	0.216	0.216	0.010	0.010	0.010
x3	0.205	0.010	0.216	0.216	0.010	0.010	0.010
x2	0.258	0.013	0.271	0.271	0.013	0.013	0.013
x1	0.205	0.010	0.216	0.216	0.010	0.010	0.010

	x4	x3	x2	x1
x4	0.293			
x3	0.205	0.621		
x2	0.258	0.258	0.343	
x1	0.205	0.205	0.258	0.419

Implied (for all variables) Correlations

	SOSEK	Keterbat	KEMISKIN	x8	x6	x5	x7
SOSEK	1.000						
Keterbata	1.000	1.000					
KEMISKINA	1.000	1.000	1.000				
x8	0.599	0.599	0.599	1.000			
x6	0.022	0.022	0.022	0.013	1.000		
x5	0.027	0.027	0.027	0.016	0.001	1.000	
x7	0.036	0.036	0.036	0.022	0.001	0.001	1.000
x4	0.837	0.837	0.837	0.501	0.019	0.022	0.030
x3	0.575	0.575	0.575	0.344	0.013	0.015	0.021
x2	0.973	0.973	0.973	0.582	0.022	0.026	0.035
x1	0.700	0.700	0.700	0.419	0.015	0.019	0.025

	x4	x3	x2	x1
x4	1.000			
x3	0.481	1.000		
x2	0.814	0.559	1.000	
x1	0.586	0.402	0.681	1.000

Implied Covariances

	x8	x6	x5	x7	x4	x3	x2
x8	0.632						
x6	0.011	1.052					
x5	0.011	0.001	0.716				
x7	0.011	0.001	0.001	0.391			
x4	0.216	0.010	0.010	0.010	0.293		
x3	0.216	0.010	0.010	0.010	0.205	0.621	
x2	0.271	0.013	0.013	0.013	0.258	0.258	0.343
x1	0.216	0.010	0.010	0.010	0.205	0.205	0.258

	x1
x1	0.419

Implied Correlations

	x8	x6	x5	x7	x4	x3	x2
x8	1.000						
x6	0.013	1.000					
x5	0.016	0.001	1.000				
x7	0.022	0.001	0.001	1.000			
x4	0.501	0.019	0.022	0.030	1.000		
x3	0.344	0.013	0.015	0.021	0.481	1.000	
x2	0.582	0.022	0.026	0.035	0.814	0.559	1.000
x1	0.419	0.015	0.019	0.025	0.586	0.402	0.681

	x1
x1	1.000

Residual Covariances

	x8	x6	x5	x7	x4	x3	x2
x8	-0.256						
x6	0.135	0.001					
x5	0.155	0.398	0.003				
x7	0.270	0.137	0.106	0.010			
x4	-0.099	0.063	0.049	0.141	0.059		
x3	-0.070	0.131	0.178	0.124	0.017	-0.007	
x2	-0.165	-0.012	0.019	0.119	0.040	-0.005	0.000
x1	-0.104	0.016	0.056	0.109	0.017	-0.017	-0.007

x1

x1	-0.012
----	--------

Standardized Residual Covariances

	x8	x6	x5	x7	x4	x3	x2
x8	-2.965						
x6	1.707	0.004					
x5	2.381	4.745	0.027				
x7	5.621	2.202	2.076	0.188			
x4	-2.131	1.182	1.098	4.294	1.472		
x3	-1.100	1.676	2.768	2.602	0.382	-0.084	
x2	-3.165	-0.204	0.402	3.356	1.015	-0.102	0.000
x1	-1.931	0.244	1.060	2.767	0.439	-0.314	-0.164

x1

x1	-0.201
----	--------

Factor Score Weights

	x8	x6	x5	x7	x4	x3	x2	
SOSEK	0.023	0.000	0.001	0.001	0.103	0.022	0.609	
Keterbata	0.001	0.000	0.000	0.000	0.005	0.001	0.030	
KEMISKINA	0.024	0.000	0.001	0.001	0.108	0.023	0.639	

x1

SOSEK	0.042
Keterbata	0.002
KEMISKINA	0.044

Total Effects

	SOSEK	Keterbat
Keterbata	0.050	0.000
KEMISKINA	1.050	1.000
x8	1.050	1.000
x6	0.050	1.000
x5	0.050	1.000
x7	0.050	1.000
x4	1.000	0.000
x3	1.000	0.000
x2	1.258	0.000
x1	1.000	0.000

Standardized Total Effects

	SOSEK	Keterbat
Keterbata	1.000	0.000
KEMISKINA	1.000	0.048
x8	0.599	0.029
x6	0.022	0.022
x5	0.027	0.027
x7	0.036	0.036
x4	0.837	0.000
x3	0.575	0.000
x2	0.973	0.000
x1	0.700	0.000

Direct Effects

	<u>SOSEK</u>	<u>Keterbat</u>
Keterbata	0.050	0.000
KEMISKINA	1.000	1.000
x8	0.000	0.000
x6	0.000	1.000
x5	0.000	1.000
x7	0.000	1.000
x4	1.000	0.000
x3	1.000	0.000
x2	1.258	0.000
x1	1.000	0.000

Standardized Direct Effects

	<u>SOSEK</u>	<u>Keterbat</u>
Keterbata	1.000	0.000
KEMISKINA	0.952	0.048
x8	0.000	0.000
x6	0.000	0.022
x5	0.000	0.027
x7	0.000	0.036
x4	0.837	0.000
x3	0.575	0.000
x2	0.973	0.000
x1	0.700	0.000

Indirect Effects

	<u>SOSEK</u>	<u>Keterbat</u>
Keterbata	0.000	0.000
KEMISKINA	0.050	0.000
x8	1.050	1.000
x6	0.050	0.000
x5	0.050	0.000
x7	0.050	0.000
x4	0.000	0.000
x3	0.000	0.000
x2	0.000	0.000

x1 0.000 0.000

Standardized Indirect Effects

SOSEK Keterbat

Keterbata 0.000 0.000
 KEMISKINA 0.048 0.000
 x8 0.599 0.029
 x6 0.022 0.000
 x5 0.027 0.000
 x7 0.036 0.000
 x4 0.000 0.000
 x3 0.000 0.000
 x2 0.000 0.000
 x1 0.000 0.000

Modification indices

Covariances:

	M.I.	Par Change
e10 <-----> SOSEK	20.122	-0.129
e6 <-----> e10	4.540	0.136
e5 <-----> e10	6.544	0.135
e5 <-----> e6	21.946	0.393
e7 <-----> SOSEK	13.837	0.104
e7 <-----> e10	19.819	0.173
e7 <-----> e6	4.403	0.130
e4 <-----> SOSEK	5.849	0.034
e4 <-----> e7	5.068	0.043
e3 <-----> e5	8.321	0.154
e2 <-----> e10	7.386	-0.046
e2 <-----> e6	8.998	-0.084
e2 <-----> e5	7.064	-0.061

Variances:

M.I. Par Change

Regression Weights:

M.I. Par Change

		M.I.	Par Change
KEMISKINAN <-----	SOSEK	20.122	-0.630
KEMISKINAN <-----	Keterbatasan_Akses	20.122	-12.595
x8 <-----	SOSEK	20.122	-0.630
x8 <-----	Keterbatasan_Akses	20.122	-12.595
x8 <-----	KEMISKINAN	20.122	-0.600
x8 <-----	x6	4.134	0.123
x8 <-----	x5	5.951	0.180
x8 <-----	x7	18.401	0.427
x8 <-----	x4	15.348	-0.451
x8 <-----	x2	21.041	-0.488
x8 <-----	x1	6.096	-0.238
x6 <-----	x5	21.864	0.549
x6 <-----	x7	4.418	0.333
x5 <-----	x8	6.019	0.252
x5 <-----	x6	22.083	0.375
x5 <-----	x3	7.545	0.285
x7 <-----	SOSEK	13.837	0.507
x7 <-----	Keterbatasan_Akses	13.837	10.134
x7 <-----	KEMISKINAN	13.837	0.483
x7 <-----	x8	32.486	0.433
x7 <-----	x6	4.744	0.128
x7 <-----	x5	4.128	0.145
x7 <-----	x4	17.758	0.470
x7 <-----	x3	6.675	0.198
x7 <-----	x2	11.084	0.343
x7 <-----	x1	7.681	0.259
x4 <-----	SOSEK	5.849	0.164
x4 <-----	Keterbatasan_Akses	5.849	3.286
x4 <-----	KEMISKINAN	5.849	0.157
x4 <-----	x6	4.143	0.060
x4 <-----	x7	5.477	0.113
x4 <-----	x2	6.263	0.129
x3 <-----	x5	8.295	0.214
x2 <-----	x8	5.098	-0.077
x2 <-----	x6	8.999	-0.080
x2 <-----	x5	7.065	-0.085

	par-8	par-9	par-10	par-11
par-8	1.000			
par-9	0.021	1.000		
par-10	0.005	0.001	1.000	
par-11	-0.089	-0.013	-0.002	1.000

Critical Ratios for Differences between Parameters

	par-1	par-2	par-3	par-4	par-5	par-6	par-7
par-1	0.000						
par-2	-8.730	0.000					
par-3	-9.402	1.463	0.000				
par-4	-11.641	1.545	0.178	0.000			
par-5	-12.698	-0.332	-5.165	-5.216	0.000		
par-6	-8.266	3.101	3.024	3.067	6.370	0.000	
par-7	-14.264	0.369	-2.766	-3.744	2.692	-5.480	0.000
par-8	-8.457	2.604	2.743	2.748	6.086	-0.308	5.185
par-9	-4.141	4.641	4.885	4.886	6.995	2.636	6.341
par-10	-1.225	5.702	5.708	5.696	7.135	4.101	6.670
par-11	-7.727	3.477	2.925	2.815	6.057	-0.121	5.038

	par-8	par-9	par-10	par-11
par-8	0.000			
par-9	2.893	0.000		
par-10	4.280	1.932	0.000	
par-11	0.169	-2.675	-4.138	0.000

Summary of models

	Model	NPAR	CMIN	DF	P	CMIN/DF
	Default model	11	170.197	25	0.000	6.808
	Saturated model	36	0.000	0		
	Independence model	8	402.354	28	0.000	14.370

Model	RMR	GFI	AGFI	PGFI
Default model	0.123	0.764	0.680	0.530
Saturated model	0.000	1.000		
Independence model	0.155	0.491	0.345	0.382

Model	DELTA1 NFI	RHO1 RFI	DELTA2 IFI	RHO2 TLI	CFI
Default model	0.577	0.526	0.615	0.566	0.612
Saturated model	1.000		1.000		1.000
Independence model	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

Model	PRATIO	PNFI	PCFI
Default model	0.893	0.515	0.547
Saturated model	0.000	0.000	0.000
Independence model	1.000	0.000	0.000

Model	NCP	LO 90	HI 90
Default model	145.197	107.569	190.319
Saturated model	0.000	0.000	0.000
Independence model	374.354	313.201	442.949

Model	FMIN	F0	LO 90	HI 90
Default model	1.591	1.357	1.005	1.779
Saturated model	0.000	0.000	0.000	0.000
Independence model	3.760	3.499	2.927	4.140

Model	RMSEA	LO 90	HI 90	PCLOSE
Default model	0.233	0.201	0.267	0.000
Independence model	0.353	0.323	0.385	0.000

Model	AIC	BCC	BIC	CAIC
Default model	192.197	194.217	244.574	232.700
Saturated model	72.000	78.612	243.417	204.557
Independence model	418.354	419.824	456.447	447.811

Model	ECVI	LO 90	HI 90	MECVI
Default model	1.796	1.445	2.218	1.815
Saturated model	0.673	0.673	0.673	0.735
Independence model	3.910	3.338	4.551	3.924

Model	HOELTER	
	.05	.01
Default model	24	28
Independence model	11	13

Execution time summary:

Minimization: 0.016
 Miscellaneous: 0.156
 Bootstrap: 0.000
 Total: 0.172